
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Jl. Imam Bonjol No. 44 Pariaman

Telp. (0751) 92202, 91012 Fax : (0751) 91012

www.pariamankota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subbhanahuwata'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017 merupakan laporan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013 -2018 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap Kepala Daerah wajib menyusun laporan Kinerja tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan ini juga merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban dari amanah yang diemban pemerintah daerah sebagai pengguna sumber daya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah serta menginformasikannya terkait dengan pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, perbaikan yang terus menerus akan terus Kami lakukan seperti pengembangan dan mensinkronkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, peningkatan SDM, pengembangan anggaran berbasis kinerja dan manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja dan manajemen kinerja dimasa yang akan datang dan masih terdapatnya beberapa indikator yang belum sesuai dan mencapai target yang diharapkan. Berkenaan dengan itu, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja kedepan

menjadi lebih efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, manajemen maupun keuangannya.

Kami juga mengharapkan laporan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang terkait dan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan guna perbaikan perencanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pariaman dimasa yang akan datang.

Pariaman, 23 Maret 2018
WALIKOTA PARIAMAN,

Drs. MUKHLIS RAHMAN, MM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018, dimana Visi Pembangunan Kota Pariaman adalah **“PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF BERBASIS LINGKUNGAN, BUDAYA DAN AGAMA”**.

Visi tersebut diwujudkan melalui beragam misi, kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017 merupakan Laporan Kinerja Tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018.

Untuk mewujudkan misi yang diemban, Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017 telah menetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman 35 Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 111 Indikator Kinerja.

Adapun rata-rata capaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017 meliputi :

Misi 1 : Membangun sumberdaya manusia yang berkompetensi, Berbudaya, Beriman dan Bertaqwa melalui Penguasaan Iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi

- Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan dan kualitas pendidikan yang didukung dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 321%.
- Sasaran 2 : Pengembangan Pendidikan Formal dan Non Formal yang didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 100%.
- Sasaran 3 : Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan yang didukung dengan 3 (tiga) indikator dengan rata-rata capaian sebesar 202%.
- Sasaran 4 : Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa di dukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 95%.

- Sasaran 5 : Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 124%.
- Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Pariaman yang didukung dengan 8 (delapan) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 69%.
- Sasaran 7 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pariaman yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 78%
- Sasaran 8 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 98.9%

Misi 2 : Penguatan Struktur Perekonomian Melalui Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Potensi Daerah

- Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang didukung dengan 9 (sembilan) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 278%;
- Sasaran 2 : Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan daerah yang didukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 178%;
- Sasaran 3 : Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian yang didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 90%;
- Sasaran 4 : Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang didukung dengan 2 (2) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 100%;
- Sasaran 5 : Meningkatnya tingkat kesejahteraan nelayan dan petani ikan yang didukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 110%;

- Sasaran 6 : Meningkatnya pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 87%;
- Sasaran 7 : Meningkatnya jumlah koperasi aktif, mandiri, UMKM dan usaha Ekonomi Kreatif dan Profesional yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 91.6%;
- Sasaran 8 : Tersedianya pasar yang representative dan nyaman yang didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 100%;
- Sasaran 9 : Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 120.30%;
- Sasaran 10 : Meningkatnya jumlah industri kreatif dan komoditi unggulan, didukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 102%;
- Sasaran 11 : Meningkatnya Pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana pendukung yang didukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 80%;
- Sasaran 12 : Meningkatnya promosi wisata secara konsisten, baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional yang didukung dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 112%;
- Sasaran 13 : Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Budaya Daerah yang mendukung Pariwisata yang didukung dengan 2 (d) dua dikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 100%;
- Sasaran 14 : Meningkatnya jumlah penanaman modal yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian rata- rata sebesar 128.2%;

Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 98%;
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 100%;
- Sasaran 3 : Terlaksananya Akuntabilitas dan Birokrasi Pemerintah berbasis Web dan secara Online (E-Government) yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 97%;
- Sasaran 4 : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik yang didukung dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 103%;
- Sasaran 5 : Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 80%;
- Sasaran 6 : Terwujudnya peñatausahaan keuangan dan pengelolaan asset daerah yang akurat dan akuntabel, Indikator kinerja 3 (tiga) dengan rata-rata capaian sebesar 100%;
- Sasaran 7 : Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel yang didukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 99.05%;
- Sasaran 8 : Menurunnya Angka Pengangguran yang didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 479%;
- Sasaran 9 : Mengurangi Tingkat kemiskinan daerah yang di dukung dengan 5 (tiga) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 100%;

Misi 4 : Optimalisasi Hasil Pembangunan dan Sarana Prasarana Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Kesesuaian Tata Ruang dan Mitigasi Bencana

- Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan yang di dukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 100%;
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah di dukung dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 167%;
- Sasaran 3 : Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan yang didukung dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan rata- rata capaian sebesar 173%.
- Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi serta informatika dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan 2 (dua) indikator dengan rata- rata capaian sebesar 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Letak, Luas dan Batas Wilayah	5
1.3 Topografi	7
1.4 Tipologi dan Penggunaan Lahan	7
1.5 Maksud dan Tujuan	8
1.6 Analisis Isu-Isu Startegis	8
1.7 Strategi dan Arah Kebijakan	13
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	25
2.1 Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018	25
a. Visi	25
b. Misi	26
c. Tujuan dan Sasaran	27
2.2 Indikator Kinerja Utama	39
2.3 Perjanjian Kinerja	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	57
3.1 Pengukuran Kinerja	57
3.2 Metode Pengukuran Pencapaian Target inerja	57
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017	59
B. Analisis Capaian Kinerja 2017	68
3.3 Akuntabilitas Keuangan	161
BAB IV PENUTUP	167
PENGHARGAAN-PENGHARGAAN	170

LAMPIRAN:

1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2018.
2. Pernyataan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 7
3. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Pariaman awalnya merupakan Kota Administratif yang berada dalam Wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Pembentukan Kota Administratif Pariaman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 yang diresmikan 29 Oktober 1987 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Soepardjo Roestam dengan melantik Adlis Legan Bc .An. sebagai Walikota Administratif Pariaman.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui teleksnya Nomor T.051/305/Otda Tanggal 8 Mei 2001, memberi peluang untuk peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Walikota Administratif saat itu *Drs. Firdaus Amin* bersama perangkat daerah, tokoh masyarakat dan komponen masyarakat lainnya, melakukan pengkajian-pengkajian, dan mengekspos hasil kajian tersebut di Jakarta. Kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan Tim Independen *CRAIS*. Akhirnya, melalui Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung tanggal 11 Maret 2002 disetujui Pembentukan Kota Otonom Pariaman dengan ditetapkannya UU Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 3 Kecamatan, 55 Desa dan 16 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2009, Kota Pariaman dimekarkan menjadi empat kecamatan, yakni Kecamatan Pariaman Selatan, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Utara. Namun demikian jumlah desa/kelurahan tidak mengalami perubahan, tetap 55 desa dan 16 kelurahan. Kondisi saat ini adalah Kecamatan Pariaman Selatan terdiri dari 16 Desa, Kecamatan Pariaman Tengah terdiri dari 16 Kelurahan dan 6 Desa. Kecamatan Pariaman Timur terdiri dari 16 Desa serta Kecamatan Pariaman Utara terdiri dari 17 Desa.

Adapun nama-nama Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sejak mulai terbentuknya Kota Administratif Pariaman sampai dengan sekarang:

1. **Drs. ADLIS LEGAN** (1987 s/d 1993)
2. **Drs. MARTIAS MAHYUDDIN, M.Sc** (1993 s/d 1998)
3. **Drs. FIRDAUS AMIN** (1998 s/d 2003)
4. **Drs. SULTANI WIRMAN** (Agustus s/d Oktober 2003)
5. **NASRI NASAR, SH dan Ir. MAHYUDDIN** (2003 s/d 2008)
6. **Ir. MAHYUDDIN** (22 Feb 2007 s/d 9 Oktober 2008)
7. **Drs.MUKHLIS RAHMAN, MM dan HELMI DARLIS, SH, S.PN** (2000 s/d 2013)
8. **Drs.MUKHLIS RAHMAN,MM dan DR.GENIUS UMAR,S.Sos.Msi** (2013 s/d 2018)

Pemerintah Kota Pariaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibantu oleh perangkat Daerah, yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

A. Walikota dan Wakil Walikota Pariaman

1. Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
2. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
3. Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan

B. Sekretaris Daerah membawahi 3 Asisten yaitu :

1. Asisten Tata Pemerintahan
 - Bagian Pemerintahan
 - Bagian Hukum dan HAM
 - Bagian Organisasi dan Aparatur
2. Asisten Perekonomian
 - Bagian Ekonomi dan Pembangunan
 - Bagian Keuangan
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat

3. Asisten Administrasi Umum
 - Bagian Umum dan Protokoler
 - Bagian Aset
 - Bagian Kearsipan dan Perpustakaan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

B. SEKRETARIAT DPRD

C. INSPEKTORAT

D. DINAS

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
5. Dinas Sosial
6. Dinas Pertanian dan Pangan
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Dinas Perikanan
17. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

E. BADAN

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Badan Keuangan Daerah
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

G. KANTOR

1. Kantor Kesbangpol & Linmas
2. Kecamatan.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kota Pariaman.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di buat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam

dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja dan capaian kinerja.

1.2. Letak, Luas Dan Batas Wilayah

Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara $00^{\circ} 33' 00''$ – $00^{\circ} 40' 43''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 04' 46''$ – $100^{\circ} 10' 55''$ Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar $73,36 \text{ Km}^2$, dengan panjang garis pantai $12,00 \text{ Km}^2$. Luas daratan daerah ini setara dengan 0,17 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat dengan 6 buah pulau-pulau kecil yaitu : Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 kilometer.

Letak geografis Kota Pariaman di daerah perlintasan antara beberapa kota di Sumatera Barat khususnya dan regional umumnya merupakan faktor strategis bagi kota ini. Jalan raya Padang-Lubuk Basung dan Pasaman Barat merupakan jalan negara yang penting bagi pemerintah, karena itu kondisinya selalu terjaga dengan baik. Kondisi ini menguntungkan bagi kota Pariaman. Disamping dilalui oleh lalu-lintas barang, Kota Pariaman juga memiliki kawasan pesisir yang terbentang dengan potensi perikanan dan pariwisata yang tinggi. Dengan berkembangnya kegiatan perdagangan dan pariwisata, maka posisi Kota Pariaman sebagai pusat perdagangan hasil pertanian dan pariwisata pantai akan menjadi semakin penting.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2016 penduduk Kota Pariaman berjumlah 85.691 jiwa, yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara jumlah penduduk 21.446 jiwa, Kecamatan Pariaman Tengah 30.457 jiwa, Kecamatan Pariaman Selatan jumlah penduduk 18.262 jiwa dan Kecamatan Pariaman Timur jumlah penduduk 15.526 jiwa. Batas administrasi Kota Pariaman adalah :

- Sebelah Utara dengan Kec. V Koto Kampung Dalam (Kab. Padang Pariaman).

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Nan Sabaris (Kab. Padang Pariaman).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan VII Koto (Kab. Padang Pariaman).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Wilayah Kota Pariaman yang diapit oleh Kabupaten Padang Pariaman dan Samudera Indonesia ini mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya, dan juga diperkuat oleh dukungan aksesibilitas terhadap Kabupaten Padang Pariaman yang akan mendorong akselerasi peningkatan status perekonomian masyarakat Kota Pariaman. Untuk lebih jelasnya secara administrasi Kota Pariaman dapat dilihat pada :

gambar 1.1

Peta Administrasi Kota Pariaman



1.3. TOPOGRAFI

Kota Pariaman yang berada di bagian Pantai Barat Pulau Sumatera, memiliki jenis batuan resin dan tufa vulkan. Keadaan topografi wilayah, geomorfologi dan bentuk wilayah secara bersama-sama membentuk pola aliran sungai. Kota Pariaman dilalui oleh tiga buah sungai, yaitu Batang Manggung yang melalui Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah dan Batang Mangau yang melalui Pariaman Selatan.

Ketinggian permukaan wilayah Kota Pariaman sangat bervariasi mulai dari daratan datar, bergelombang, curam dan sangat curam.

Kondisi topografi Kota Pariaman dapat dikelompokkan kepada jenis morfologi dataran dengan ketinggian antara 0-15 meter. Karena terletak di tepi pantai pada umumnya merupakan hamparan dataran rendah yang landai.

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek.

Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 378.7 mm, dengan lama hari hujan 16 hari per bulan. dengan temperatur berkisar antara 25.3° Celcius – 29.2° Celcius dengan rata-rata temperatur 26,8° Celcius, tekanan udara berkisar 996.4° Nbs, dengan kelembaban udara rata-rata 84.4%

1.4. TIPOLOGI & PENGGUNAAN LAHAN

Jenis tanah yang ada di kota Pariaman antara lain tanah orgasol, latosol, dan regosol. Kemampuan tanah meliputi beberapa faktor antara lain tekstur tanah, drainase, kedalaman efektif, lereng dan faktor pembatas lainnya. Keadaan tekstur tanah dibedakan antara tektur tanah halus, sedang dan kasar. Penyebaran tekstur di Pariaman yaitu tekstur halus seluas 2.636 ha (35,93 %) dan tekstur kasar 4.707 ha (64.07 %). Luas kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm dan rincian menurut kelerengan berkisar antara 0 – 8% .

Lahan Kota Pariaman dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pertanian, perdagangan, perumahan maupun

pembangunan berbagai fasilitas pelayanan, pemanfaatan wilayah dan status penggunaan lahan.

Kemampuan tanah berdasarkan drainase sebagian besar wilayah Kota Pariaman termasuk kategori tidak pernah tergenang. Sementara itu dari segi kedalaman efektif tanah hampir keseluruhan wilayahnya adalah lebih dari 90 cm dan termasuk kawasan budidaya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, disamping itu juga menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Kota Pariaman. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik

1.6. Analisis Isu-Isu Strategis Pada Pemerintah Kota Pariaman

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/ kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Adanya identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksud agar pemerintah daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Hasil analisis kondisi wilayah dan kecenderungan perkembangan wilayah di masa mendatang mendorong stakeholder untuk menyiapkan strategis yang terpadu dan komprehensif dalam menjawab kebutuhan pembangunan dari sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan. Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan tersebut diperlukan analisis isu-isu strategis yang ada pada Kota Pariaman :

❖ **Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat**

Kesiapan akhlak, mental dan keagamaan masyarakat perlu diberikan perhatian lebih untuk mengantisipasi dampak negatif dari aktivitas pariwisata. Terjadinya dekadensi moral ditengah masyarakat akan menjadi hambatan utama dalam membangun daerah. Salah satu indikator yang dapat melihat berkurangnya pengamalan nilai-nilai agama adalah meningkatnya angka kriminalitas. Kasus-kasus yang meningkat signifikan adalah penipuan, curanmor, perkosaan/ pencabulan dan kasus penganiayaan berat (anirat). Karakter dari kasus tersebut, berimplikasi langsung dengan sikap moral dan akhlak masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama, akhlak mulia dan adat istiadat kedalam mata pelajaran setiap jenjang pendidikan tingkat pelajar. Kualitas dan kuantitas jam pelajaran keagamaan secara khusus akan ditambah baik mulai dari teori sampai aplikasi. Selain itu, dimintakan

peran serta keluarga dan masyarakat dalam penerapan dan aplikasi nilai agama, akhlak mulia dan adat dalam kehidupan.

❖ **Pendidikan Yang Berkarakter Dan Berwawasan Global**

Pembangunan manusia harus seimbang antara moral dan intelektualitas. Untuk menyeimbangkan pembangunan pendidikan di Kota Pariaman, harus diintegrasikan nilai-nilai moral, akhlak mulia, budi pekerti dan keagamaan kedalam setiap mata pelajaran yang mendukung. Perspektif pendidikan karakter adalah peranan pendidikan dalam membangun karakter peserta didik yang berbudi pekerti. Pendidikan karakter adalah upaya penyiapan kekayaan batin peserta didik yang berdimensi agama, sosial, budaya, yang mampu diwujudkan dalam bentuk budi pekerti, baik dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, maupun kepribadian. Dalam pembangun jangka menengah ini, pendidikan berkarakter dijadikan salah satu isu strategis yang perlu diperhatikan.

❖ **Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Terjangkau**

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Pariaman, kualitas kesehatan tidak dapat dikesampingkan. Angka harapan hidup masyarakat Kota Pariaman tahun 2015 sebesar 70 tahun. Pelayanan kesehatan akan diprioritaskan pada peningkatan kualitas tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

❖ **Kemiskinan**

Penanggulangan kemiskinan tetap dijadikan isu strategis dalam pembangunan Kota Pariaman. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya mengangkat perekonomian penduduk miskin juga peningkatan pendapatan seluruh masyarakat sehingga potensi kemiskinan masa depan dapat dikurangi. Upayanya dilakukan melalui pengutamaan penanganan penduduk miskin dalam pembangunan sosial dan

ekonomi seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan penduduk miskin “*by name by address*” . persentase kemiskinan tahun 2012 sebesar 5,02 % akan di tekan mencapai 3 % pada tahun 2018 melalui program-program strategis pada setiap SOPD.

❖ **Penyediaan Infrastruktur Dasar Yang Bermutu**

Dalam mewujudkan visi Kota menjadi Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif, infrastruktur menjadi modal utama pencapaiannya. Infrastruktur yang berkualitas akan menjadi jaminan kenyamanan beraktivitas masyarakat utamanya pengunjung Kota Pariaman. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, drainase dan pelayan air bersih akan diupayakan pada standar Kota Pariwisata Nasional. Selain itu, pembukaan akses baru ke daerah tetangga juga akan dijadikan issue strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah selain infrastruktur dasar yang merupakan kewajiban utama pemerintah daerah.

❖ **Iklim Investasi yang Kondusif**

Pembangunan suatu daerah tidak akan berjalan baik jika hanya mengandalkan pemerintah saja. Dibutuhkan kebersamaan dari pihak swasta untuk mengembangkan usaha dan perekonomian di Kota Pariaman. Penciptaan iklim usaha yang kondusif menjadi strategis untuk menarik perhatian investor berinvestasi di Kota Pariaman. Investasi yang diharapkan tidak terbatas dalam skala besar, akan tetapi pemberdayaan jiwa interpreneur masyarakat untuk berusaha akan selalu diupayakan. Untuk mewujudkan hal ini, kemudahan perizinan dan fasilitas investor dalam berusaha akan terus diutamakan.

❖ **Pelestarian Seni dan Budaya Daerah**

Upaya pelestarian kesenian dan budaya daerah akan mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan jangka menengah daerah Kota Pariaman. Karena hal ini akan berimplikasi langsung dengan pencapaian target visi kota menjadi kota wisata dan

ekonomi kreatif. Keberadaan budaya asli minangkabau akan tetap dilestarikan dengan memberikan ruang khusus dalam pengembangan budaya lain.

Perlombaan pidato adat, pidato pasambahan, dan randai akan di giatkan untuk merangsang pelestarian adat dan budaya daerah.

❖ **Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan**

Salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan adalah kesiapan generasi muda untuk menerima tongkat estafet pembangunan. Keberadaan pemuda yang kreatif dan inovatif akan mempermudah pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Pembinaan kelompok muda yang diarahkan menjadi lebih produktif dan proaktif dalam pembangunan. Pemerintah perlu mengarahkan semangat dan pikiran inovatif dari generasi muda dalam membangun daerahnya. Diharapkan, dengan adanya generasi muda yang baik, keberlanjutan pembangunan di Kota Pariaman tidak akan terputus antar periodenya.

❖ **Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah**

Isu strategis lainnya juga menentukan keberlanjutan pembangunan di Kota Pariaman adalah penatalaksanaan pemerintah yang baik. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus disikapi dengan memberikan pelayanan yang optimal, pengelolaan pemerintah yang bersih, inovatif dan profesional. Karena itu, Konsep Good Governance and Clean Government harus dijadikan prioritas dalam melaksanakan birokrasi pemerintahan ini.

❖ **Perencanaan Keparawisataan yang Terintegrasi dengan Perencanaan Kota**

Sektor keparawisataan akan tetap dijadikan isue strategis dalam pembangunan jangka menengah daerah. Ditengah persaingan dunia pariwisata dengan daerah lain di Sumatera Barat dan Nasional dibutuhkan konsep dan perencanaan yang matang dalam pembangunabn sektor pariwisata Kota Pariaman. Pariwisata harus

dijadikan prioritas dalam setiap perencanaan pembangunan di Kota Pariaman secara fisik dan non fisik. Keunggulan pariwisata dengan konsep budaya lokal yang identik pada Kota Pariaman harus dimaksimalkan dengan kombinasi objek wisata rekreasi.

❖ **Produk Industri Kecil Dan Menengah Yang Bermutu Dan Budaya Saing**

Dalam membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh, peran industri kecil dan menengah harus diutamakan. Di Kota Pariaman sektor industri yang berkembang didominasi oleh industri kecil dan menengah yang berbasis rumah tangga. Keberadaan industri bordir, Industri Ladu dan Sala Lauak perlu mendapat perhatian lebih mengingat keterpaduannya dengan sektor pariwisata dan dapat menyentuh langsung ekonomi masyarakat Kota Pariaman.

❖ **Pemberdayaan Masyarakat dan Kesetaraan Gender**

Keberadaan masyarakat yang hidup berdampingan dan masih menjaga khasanah budaya gotong royong akan dijadikan kekuatan dalam pembangunan Pariaman. Membangun sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat akan tetap diprioritaskan. Keberadaan LPM, kelompok Masyarakat, Karang Taruna dan tokoh masyarakat akan dimanfaatkan untuk mempermudah pembangunan di tingkat Desa dan Kelurahan. Selain itu, penyeteraan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan akan terus di tingkatkan untuk menjaga konsistensi perempuan dalam pembangunan.

1.7. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kota Pariaman

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Pariaman dilihat dari visi dan misi dan Kota Pariaman, sedangkan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan atau visi juga dapat diartikan gambaran perwujudan masa depan yang diinginkan.

Adapun tujuan ditetapkan visi antara lain untuk memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, menjadi perekat dan memyatukan berbagai gagasan strategik dan menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam organisasi serta menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Visi Pembangunan Kota Pariaman Jangka Menengah Tahun 2013-2018 adalah: “PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF BERBASIS LINGKUNGAN, BUDAYA DAN AGAMA”

Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi atau misi adalah kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan diatas dapat tercapai dengan memperhatikan kondisi objektif daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota Pariaman Sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

Misi 1 : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Berkompetensi, Berbudaya, Beriman Dan Bertaqwa Melalui Penguasaan Iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi

Misi membangun sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi, berbudaya, beriman dan bertaqwa melalui penguasaan iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi ditandai dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat dengan ukuran penilaian dilihat dari indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Misi 2 : Penguatan Struktur Perekonomian Melalui Peningkatan Daya Saing Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Potensi Daerah.

Misi penguatan struktur perekonomian melalui peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi daerah dicapai dengan mengembangkan perekonomian daerah yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal berbasis agribisnis dan agroindustri sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Mendorong Dunia Usaha Dan Masyarakat Lebih Mandiri

Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri dicapai melalui perwujudan sistem hukum dan tata kelola pemerintah yang baik merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata.

Misi 4 : Optimalisasi Hasil Pembangunan Dan Sarana Prasarana Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Kesesuaian Tata Ruang Dan Mitigasi Bencana.

Misi optimalisasi hasil pembangunan dan sarana prasarana daerah dalam menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang dan mitigasi bencana dicapai dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan mencapai masyarakat yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Pariaman maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan di Kota Pariaman serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Misi 1 ini adalah :

- ✓ Meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan wajib belajar 12 tahun yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan baik formal dan non formal.
- ✓ Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
- ✓ Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa
- ✓ Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sasaran Strategi untuk Misi 1

Untuk mencapai sasaran yang dinyatakan pada Misi 1, ditempuh dengan sasaran strategi :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan.
2. Pengembangan pendidikan formal dan non formal.
3. Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan.
4. Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa.
5. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai adat istiadat dan budaya.
6. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Pariaman.
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pariaman .
8. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Arah Kebijakan untuk Misi 1

Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah:

- ❖ meningkatkan kualitas pendidikan dan produk lulusan SMK yang memiliki keahlian dan mampu bersaing dipasar kerja nasional dan internasional;
- ❖ Meningkatkan kualitas lulusan SMA yang dapat diterima oleh Perguruan Tinggi ternama/favorit;
- ❖ Pelaksanaan kegiatan School Net pada setiap jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK);
- ❖ Wajib belajar 12 tahun yang bebas biaya dan berkualitas;
- ❖ Optimalisasi perpustakaan daerah dan sekolah
- ❖ Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- ❖ Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai
- ❖ Peningkatan akses pendidikan melalui penyediaan sarana transportasi gratis yang berkualitas dan memadai
- ❖ Penyiapan tenaga pendidik yang sesuai
- ❖ Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal
- ❖ Fasilitasi kegiatan PKBM dan lembaga pendidikan keterampilan (sanggar belajar)
- ❖ Meningkatkan sarana informasi dan telekomunikasi setiap wilayah
- ❖ Meningkatnya informasi melalui media massa
- ❖ Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di sekolah dan masyarakat
- ❖ Mendalami pemahaman dan pengalaman ajaran agama dan adat istiadat
- ❖ Mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat
- ❖ Meningkatkan peran Lembaga, Pemuka Adat dan Tokoh Agama
- ❖ Peningkatan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat
- ❖ Meningkatkan kualitas akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang bermutu, mudah, merata dan terjangkau
- ❖ Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan

- ❖ Melanjutkan program jaminan kesehatan bagi masyarakat
- ❖ Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kesehatan
- ❖ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan dalam perilaku hidup sehat dan bersih
- ❖ Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih melalui peyanaan sanitasi dasar dan sanitasi umum
- ❖ Meningkatkan kualitas advokasi masyarakat dalam pengembangan hidup sehat terhadap masyarakat
- ❖ Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender, mewujudkan pemenuhan hak anak dan norma keluarga kecil bahagia sejahtera.

Tujuan yang hendak dicapai dalam Misi 2 adalah :

- ✓ Meningkatnya produksi pertanian, perikanan untuk peningkatan taraf hidup petani, nelayan serta untuk mendukung ketahanan pangan
- ✓ Pemberdayaan usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi
- ✓ Pengembangan Pariwisata Daerah
- ✓ Peningkatan Investasi Daerah
- ✓ Perluasan kesempatan bekerja, berusaha, perlindungan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional

Sasaran Strategi untuk Misi 2 adalah :

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan daerah.
3. Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian.
4. Meningkatnya populasi dan produksi peternakan.
5. Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap
6. Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan nelayan dan petani ikan

7. Meningkatnya pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan
8. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir, pulau dan laut.
9. Meningkatnya jumlah koperasi aktif, mandiri, UMKM dan usaha ekonomi kreatif dan profesional.
10. Tersedianya pasar yang representative, bersih, aman dan nyaman.
11. Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku.
12. Meningkatnya jumlah industri kreatif dan komoditi unggulan
13. Fasilitasi Pembentukan Industri Kreatif
14. Meningkatnya pembangunan, Pengembangan, Penataan dan Pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana pendukung.
15. Meningkatnya promosi wisata secara konsisten baik dalam lingkup regional nasional dan internasional.
16. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang mendukung pariwisata.
17. Meningkatnya jumlah penanaman modal

Arah kebijakan untuk Misi 2 adalah :

- ❖ Peningkatan produktifitas produksi dan daya saing pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- ❖ Peningkatan kemampuan petani dan lembaga pendukung
- ❖ Perluasan akses petani dalam pengembangan usaha melalui teknologi informasi serta penyediaan sarana dan prasarana
- ❖ Penyusunan kebijakan teknis pencegahan alih fungsi lahan pertanian
- ❖ Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- ❖ Peningkatan pelayanan umum di bidang kehutanan
- ❖ Penyediaan cadangan pangan yang berkualitas
- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan bahan pangan

- ❖ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap mutu pangan, distribusi dan pengolahan bahan pangan
- ❖ Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil
- ❖ Pengembangan sentra produksi ternak melalui komoditi unggulan
- ❖ Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit ternak
- ❖ Promosi dan pemasaran hasil produksi peternakan
- ❖ Pengembangan kawasan air payau, air tawar dan pembudidayaan ikan serta pengembangan sumber daya perairan umum
- ❖ Peningkatan produksi serta sarana dan prasarana perikanan tangkap
- ❖ Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan sumber daya perikanan
- ❖ Peningkatan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan
- ❖ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta kualitas sumber daya kelautan dan perikanan
- ❖ Pemanfaatan potensi sumber daya pesisir, pulau dan laut berbasis lingkungan
- ❖ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui mata pencarian alternatif
- ❖ Mendorong tumbuh dan kembangnya Kopersi dan UMKM
- ❖ Promosi perdagangan dalam negeri dan luar negeri
- ❖ Peningkatan kemampuan ekonomi dan wirausaha masyarakat melalui lembaga keuangan
- ❖ Pembangunan pasar yang representatif dan nyaman
- ❖ Perlindungak konsumen dan pengamanan perdagangan
- ❖ Memfasilitasi peningkatan SDM melalui pelatihan dan magang
- ❖ Penyusun Rencana Pengembangan Kawasan Industri
- ❖ Memfasilitasi bantuan berupa peralatan, modal dan pemasaran
- ❖ Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- ❖ Memfasilitasi pembentukan kelompok industry kreatif baru
- ❖ Meningkatkan SDM pelaku industry kreatif
- ❖ Penyiapan infrastruktur fisik penunjang kepariwisataan
- ❖ Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan kepariwisataan

- ❖ Penyelenggaraan iven-iven wisata berkala regional, nasional dan internasional
- ❖ Melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah
- ❖ Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni daerah
- ❖ Meningkatkan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investor
- ❖ Meningkatkan pelayanan investasi melalui kemudahan, penyederhanaan, perizinan penanaman modal

Tujuan yang hendak dicapai dalam Misi 3 adalah :

- ✓ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemantapan reformasi birokrasi
- ✓ Mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat
- ✓ Meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan
- ✓ Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif dan partisipatif
- ✓ Perluasan kesempatan bekerja, berusaha, perlindungan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional
- ✓ Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

Sasaran Strategi untuk Misi 3 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah
2. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Daerah
3. Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah berbasis web dan secara online (E-Government)
4. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap SKPD
5. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik
6. Terwujudnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
7. Ditemukannya Konsep dan terobosan yang baru dalam rangka peningkatan pendapatan daerah

8. Terwujudnya penatausahaan dan pengelolaan aset daerah yang akurat dan akuntabel
9. Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel
10. Menurunnya angka pengangguran
11. Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja
12. Meningkatnya jaminan perlindungan tenaga kerja
13. Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Arah Kebijakan untuk Misi 3 adalah :

- ❖ Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang baik dan bersih
- ❖ Pemantapan sistem birokrasi yang berkeadilan dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan,
- ❖ Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani
- ❖ Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
- ❖ Meningkatkan sistem informasi dan data yang jelas, akurat dan mudah di akses tentang pengelolaan pemerintahan,
- ❖ Menyempurnakan Sistem Organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien
- ❖ Menerapkan sistem dan prosedur Reward and Punishment dalam upaya meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai
- ❖ Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya,
- ❖ Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan kebutuhan universal
- ❖ Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sampai tingkat pemerintahan terendah
- ❖ Menyempurnakan data administrasi kependudukan

- ❖ Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penatausahaan dan penggunaan anggaran daerah
- ❖ Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan daerah
- ❖ Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah
- ❖ Meningkatkan kualitas musrenbang daerah
- ❖ Meningkatkan terwujudnya pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat
- ❖ Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisa studi yang baik
- ❖ Membuka lapangan kerja baru dan memperbesar peluang dan kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja lokal
- ❖ Membangun kerjasama dengan pelaku bidang dunia usaha dalam penyaluran tenaga kerja
- ❖ Membangun BLK dan pemberdayaan lembaga pendidikan non formal yang dibutuhkan pasar kerja industri dan jasa
- ❖ Meningkatkan keterampilan kompetensi pencari kerja
- ❖ Optimalisasi penerapan PERDA tentang ketenagakerjaan
- ❖ Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja
- ❖ Meningkatkan efektifitas penggunaan data kemiskinan
- ❖ Meningkatkan efektifitas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Pariaman
- ❖ Meningkatkan kapabilitas/kemampuan aparatur dalam menanggulangi kemiskinan pada semua tingkatan
- ❖ Membangun jejaring kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan,
- ❖ Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan
- ❖ Meningkatkan pemenuhan dasar pelayanan social, rehabilitasi dan pemberdayaan, bantuan social dan jaminan kesejahteraan sosial (PMKS)
- ❖ Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Desa

- ❖ Meningkatkan kelembagaan pemerintahan desa

Tujuan yang hendak dicapai dalam Misi 4 adalah :

- ✓ Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana ,
- ✓ Meningkatkan kapasitas sarana prasarana daerah.

Sasaran Strategi untuk Misi 4 adalah :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan
2. Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah
3. Meningkatnya kapasitas infrastruktur permukiman dan perkotaan berbasis tata ruang untuk menunjang aktivitas masyarakat
4. Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan
5. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi serta informatika dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Arah Kebijakan untuk Misi 4 adalah :

- ❖ Peningkatan pelayanan persampahan skala Kota dan di tingkat masyarakat (3R)
- ❖ Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH)
- ❖ Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah, sekolah, masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan kualitas lingkungan
- ❖ Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
- ❖ Menyediakan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat
- ❖ Menyediakan infrastruktur penunjang peningkatan kesehatan dan sanitasi masyarakat
- ❖ Terlaksananya penyediaan infrastruktur kota yang sesuai dengan perencanaan Tata Ruang
- ❖ Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan menfungsikan terminal sebagai sarana penghubung antar wilayah
- ❖ Meningkatnya keselamatan di jalan raya
- ❖ Penyebarluasan hasil pembangunan melalui sistem informasi berbasis teknologi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

a. Visi

Visi berkaitan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Pariaman dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan **MUKHLIS RAHMAN (Walikota) - GENIUS UMAR (Wakil Walikota)** membuat Visi Kota Pariaman tahun 2013-2018 sebagai berikut:

“ PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF BERBASIS LINGKUNGAN, BUDAYA DAN AGAMA ”.

Penjelasan dari Visi sebagai berikut:

- 1) Kepariwisata adalah Suatu gerakan dengan menyatukan seluruh potensi daerah dan stakeholder dalam penyediaan sarana pariwisata dan prasarana wisata atau fasilitas umum sehingga menarik

wisatawan untuk datang ke destinasi wisata yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 2) Kota Tujuan Wisata merupakan Kota Pariaman yang diarahkan sebagai kota tujuan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik.
- 3) Ekonomi Kreatif merupakan suatu gerakan pengembangan industri kerakyatan atau ekonomi kreatif yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, inovasi, keterampilan serta bakat individu menjadi nilai ekonomi tinggi untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi kreasi daya cipta individu dan potensi daerah.
- 4) Berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama berarti dalam pelaksanaan pembangunan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dengan menjadikan Pariaman Kota Hijau serta melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai adat, budaya dan agama dalam setiap sendi kehidupan.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi atau kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan memperhatikan kondisi objektif daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota Pariaman sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Membangun sumberdaya manusia yang berkompetensi, Berbudaya, Beriman dan Bertaqwa melalui Penguasaan Iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi.
- 2) Penguatan Struktur perekonomian melalui peningkatan daya saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan potensi daerah.
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.

- 4) Optimalisasi hasil pembangunan dan sarana prasarana daerah dalam menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang dan Mitigasi Bencana.

c. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2018. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hubungan hierarki Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI

PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF BERBASIS LINGKUNGAN, BUDAYA DAN AGAMA

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Membangun sumberdaya manusia yang berkompetensi, Berbudaya, Beriman dan Bertaqwa melalui Penguasaan Iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi	1.1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan wajib belajar 12 tahun yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang professional serta peningkatan tata kelola pendidikan baik formal dan non formal	1.1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan dan kualitas pendidikan
		1.1.2 Pengembangan pendidikan formal dan Non-formal
	1.2. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi	1.2.1 Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan.
	1.3. Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	1.3.1 Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa
		1.3.2 Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya.
	1.4. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat	1.4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pariaman

		1.5. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi	1.5.1 Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan.
		1.6. Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	1.6.1 Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa
			1.6.2 Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya.
2	Penguatan Struktur perekonomian melalui peningkatan daya saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan potensi daerah	2.1 Meningkatkan Produksi Pertanian, perikanan untuk peningkatan taraf hidup petani, nelayan serta untuk mendukung ketahanan pangan.	2.1.1 Meningkatnya Produksi dan produktivitas komoditi Tanaman Pangan dan hortikultura.
			2.1.2 Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan daerah
			2.1.3 Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian
			2.1.4 Meningkatnya produksi perkebunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
			2.1.5 Meningkatnya populasi, produksi peternakan
			2.1.6 Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
		2.2 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi	2.2.1 Meningkatnya jumlah koperasi aktif, mandiri, UMKM dan Usaha Ekonomi Kreatif
			2.2.2 Tersedianya pasar yang representatif dan nyaman
		2.3 Pengembangan Pariwisata Daerah	2.3.1 Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Kota Pariaman
			2.3.2 Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan yang berimplikasi pada meningkatnya pengeluaran wisatawan
			2.3.3 Melestarikan budaya yang ada dikota Pariaman
		2.4 Peningkatan Investasi Daerah.	2.4.1 Meningkatnya jumlah penanaman modal

		2.5 Perluasan kesempatan bekerja, berusaha, perlindungan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di tingkat local, nasional dan internasional	2.5.1 Menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan. 2.5.2 Berkembangnya Industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplorasi daya kreasi dan daya cipta individu.
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri	3.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemantapan reformasi birokrasi	3.1.1 Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Daerah 3.1.2 Terlaksananya akuntabilitas dan Birokrasi Pemerintah berbasis Web dan secara Online (E-Government)
		3.2 Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat	3.2.3 Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap SKPD 3.2.4 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik
		3.3 Meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan	3.3.1 Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah 3.3.2 Ditemukannya konsep dan terobosan yang baru dalam rangka peningkatan pendapatan daerah 3.3.3 Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang akurat dan akuntabel
		3.4 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif dan partisipatif	3.4.1 Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif, dan akuntabel
		3.5 Perluasan kesempatan bekerja, berusaha, perlindungan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di tingkat local, nasional dan internasional	3.5.1 Menurunnya angka pengangguran

			3.5.2 Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja.
			3.5.3 Meningkatnya jaminan perlindungan tenaga kerja
		3.6 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dalam upaya peningkatan kesejahteraan	3.6.1 Mengurangi angka kemiskinan daerah
4	Optimalisasi hasil pembangunan dan sarana prasarana daerah dalam menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang dan mitigasi bencana.	4.1 Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana	4.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
			4.1.2 Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah.
		4.2 Meningkatkan kapasitas sarana prasarana daerah	4.2.1 Meningkatnya kapasitas infrastruktur permukiman dan perkotaan berbasis tata ruang untuk menunjang aktivitas masyarakat.
			4.2.2 Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi serta informatika dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tujuan di atas, sasaran–sasaran strategis yang akan dicapai Pemerintah Kota Pariaman selama periode RPJMD disertai indikator kinerja, dimana indikator kinerja ini sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

MISI I :

Membangun sumberdaya manusia yang berkompetensi, Berbudaya, Beriman dan Bertaqwa melalui Penguasaan Iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi

Tujuan 1 :

Meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan 12 tahun yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan baik formal dan non formal.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan dan kualitas pendidikan	Persentase lulusan setingkat SLTA yang diterima di perguruan tinggi dengan beasiswa
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ SDLB/ Paket A
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ MTs/ Paket B
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/ MA/ Paket C
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ SDLB/ Paket A
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ MTs/ Paket B
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA/ MA/ Paket C (<i>Kewenangan Propinsi</i>)
	Persentase Angka putus sekolah setara SD
	Persentase Angka putus sekolah setara SLTP
	Persentase Angka putus sekolah setara SLTA
	Jumlah kunjungan siswa ke perpustakaan daerah dan sekolah
	Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi
	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti pelatihan
	Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan
	Jumlah armada yang berkualitas dan memadai
Sasaran Strategis 2 : Pengembangan Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal

Tujuan 2 :

Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 3: Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan	Persentase pemanfaatan TIK dalam tata pemerintahan
	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina
	Jumlah informasi yang disampaikan melalui media massa

Tujuan 3 :

Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 4: Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	Persentase keikutsertaan siswa terhadap kegiatan keagamaan
	Persentase tingkat pemahaman keagamaan di masyarakat
Sasaran Strategis 5: Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya	Jumlah Lembaga Pemuka adat yang di fasilitasi

Tujuan 4 :

Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 6: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Pariaman	Angka usia harapan hidup (AHH) per tahun
	Jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup per tahun
	Jumlah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
	Persentase balita bergiziburuk per tahun
	Rasio pos yandu per satuan balita per tahun
	Rasio dokter per jumlah penduduk 1 : 2.500 penduduk
	Jumlah penduduk miskin yang terkoper pembiayaan kesehatan (jamkesmas,jamkesda dan JKSS per tahun)
Sasaran Strategis 7: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pariaman	Persentase Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA positif
	Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk
Sasaran Strategis 8: Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	persentase peningkatan kesetaraan gender dan kesejahteraan perempuan
	Meningkatnya perlindungan terhadap anak
	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana

Misi 2 :

Penguatan Struktur Perekonomian Melalui Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Potensi Daerah

Tujuan 1

Meningkatkan Produksi Pertanian, Perikanan untuk peningkatan taraf hidup petani, nelayan serta untuk mendukung ketahanan pangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
	Persentase penambahan produksi hasil padi
	Persentase penambahan produksi hasil ternak
	Persentase penambahan populasi ternak unggulan
	Jumlah rata-rata pendapatan petani binaan
	Jumlah gerakan pencegahan hama dan Organisme Penyakit Tanaman (OPT)
	Jumlah kasus gigitan HPR (Hewan Penular Rabies) yang dapat diatasi
	Jumlah kelompok tani yang menggunakan TTG dan Alsintan
	Jumlah kerjasama pemasaran hasil produksi ternak
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan daerah	Persentase ketersediaan sumber energi dan protein perkapita
	Persentase penguatan cadangan pangan
	Persentase pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PAH)
	Persentase ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan daerah
	Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan
	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
	Persentase penanganan daerah rawan pangan
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian	Jumlah jenis produk olahan hasil pertanian
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Populasi dan Produksi Peternakan	4 Indikator Sasaran yaitu: <i>Persentase penambahan populasi ternak unggulan</i> , <i>Persentase penambahan produksi hasil ternak</i> , <i>Jumlah kasus gigitan HPR (Hewan Penular Rabies)</i> , dan <i>Jumlah kerjasama pemasaran hasil produksi ternak yang dapat diatasi ini sudah terakomodir pada sasaran 1 Misi 2.</i>
Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan budidaya
	Jumlah produksi perikanan tangkap
	Jumlah usaha budidaya yang dapat sertifikat Cara budi daya Ikan Yang Baik (CBIB)

	Luas areal budi daya
	Jumlah UPR
	Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang sertifikat
	Produksi benih ikan unggul
	Jumlah pembudidaya ikan
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya tingkat kesejahteraan nelayan dan petani ikan	Jumlah POKWASMAS yang dibina
	Jumlah pengolah ikan
	Tingkat konsumsi ikan
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah kawasan konservasi sebagai kawasan ekowisata yang dikelola dengan baik
	Jumlah bibit restocking
	Luas hutan mangrove (Kewenangan Propinsi)
	Luas terumbu karang yang dipelihara
	Penanganan kasus ilegal fishing
Sasaran Stretegis 8: Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pesisir, pulau dan laut	Jumlah pulau yang dikelola dengan baik
	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang dibina

Tujuan 2 :

Pemberdayaan Usaha Makro, Kecil, Menengah dan Koperasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya jumlah koperasi aktif, mandiri, UMKM dan usaha Ekonomi Kreatif dan Profesional	Jumlah Koperasi
	Jumlah Wirausaha/UKM
	Jumlah BUMDes yang dibentuk
Sasaran Strategis 10 : Tersedianya pasar yang representative dan nyaman	Jumlah Kawasan Pasar yang dibangun dan ditata
Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku	Jumlah alat ukur yang ditera ulang
	Jumlah penurunan temuan barang yang tidak memenuhi standar
Sasaran Strategis 12` : Meningkatnya jumlah industri kreatif dan komoditi unggulan	Persentase pertumbuhan industri
	Jumlah industri kreatif
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri kreatif
	Jumlah teknologi tepat guna yang diciptakan

Sasaran Strategis 13 : Fasilitasi Pembentukan Kelompok Industri Kreatif	Indikator Kinerja sasaran, yaitu Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri kreatif ini telah terakomodir pada Sasaran 12 Misi 2
---	---

Tujuan 3
Pengembangan Pariwisata Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 14 : Meningkatnya Pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana pendukung	Jumlah kawasan wisata yang dibangun, dikembangkan dan ditata
	Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi
	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
Sasaran Strategis 15 : Meningkatnya promosi wisata secara konsisten, baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional	Jumlah team jaringan kerjasama promosi pariwisata
	Jumlah ivent promosi yang dilaksanakan
	Jumlah pemandu wisata terpadu yang ikut pelatihan
	Jumlah buku statistik wisata terpadu yang tersusun
	Jumlah Bahan Promosi Wisata yang dibuat
Sasaran Strategis 16 : Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang mendukung pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina
	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan, dibina dan dilestarikan
	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya, purbakala, museum dan peninggalan bawah air yang dilestarikan

Tujuan 4
Peningkatan Investasi Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 17 : Meningkatnya jumlah penanaman modal	Jumlah investor yang menanamkan modal
	Jumlah SOP penanaman modal yang diterapkan (dijadikan indikatr OPD)
	Jumlah SOP perizinan yang diterapkan (dijadikan indikatr OPD)
	Jumlah perizinan yang di terbitkan

Misi 3 :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri

Tujuan 1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government) melalui pemantapan reformasi birokrasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah	Persentase tingkat pelayanan administrasi perkantoran (<i>merupakan indikator SKPD</i>)
	Persentase tingkat sarana dan prasarana aparatur (<i>merupakan indikator SKPD</i>)
	Persentase tingkat disiplin aparatur
	Persentase tingkat kapasitas sumber daya aparatur (<i>merupakan indikator SKPD</i>)
	Persentase tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (<i>merupakan indikator SKPD</i>)
	Persentase ketersediaan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintah (<i>indikator ini masuk ke Misi 3 Sasaran 3</i>).
	Persentase informasi yang disampaikan melalui media masa (<i>indikator ini sudah tercantum pada Misi 1 sasaran 3.</i>)
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Tingkat penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah
	Persentase aset yang terdata
Sasaran Strategis 3 : Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintahan berbasis Web dan secara Online(E-Governmen)	Jumlah informasi dan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan
	Persentase peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan

Tujuan 2

Untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang prima kepada masyarakat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 4 : Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap SKPD	Jumlah SKPD yang melaksanakan SPM dan SOP
Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan
	Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik dari jumlah penduduk
	Persentase penduduk yang melakukan perekaman data KTP Elektronik

	Persentase yang memiliki KK
	Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran
	Jumlah dokumen profil kependudukan yang diterbitkan
	Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang dilayani

Tujuan 3

Meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya optimalisasi Pendapatan Daerah	Persentase tingkat realisasi PAD terhadap target PAD
	Persentase tingkat kenaikan PAD
Sasaran Strategis 7 : Ditemukannya Konsep dan Terobosan yang baru dalam rangka peningkatan pendapatan daerah	<i>Indikator sasaran 7 ini, yaitu jumlah kerjasama dengan pihak swasta yang berinvestasi dalam pembangunan daerah telah terakomodir pada sasaran 17 Misi II</i>
Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya penata usahaan keuangan dan pengelolaan asset daerah yang akurat dan akuntabel	Nilai dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Tujuan 4:

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif dan partisipatif

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 9: Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel	Persentase kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang
	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas

Tujuan 5

Perluasan kesempatan bekerja, berusaha, perlindungan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 10 : Menurunnya angka pengangguran	Persentase penurunan jumlah pengangguran
	Jumlah kerjasama dengan pelaku dunia usaha dalam penyaluran tenaga kerja

	Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pendidikan Non Formal
	Jumlah tenaga kerja yang berkualitas
Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja	Indikator dari sasaran ini , yaitu Persentase penurunan jumlah pengangguran dan Jumlah tenaga kerja yang berkualitas sudah terakomodir pada sasaran 10 Misi III.

Tujuan 6:

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dalam upaya peningkatan kesejahteraan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 13: Mengurangi tingkat kemiskinan daerah	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di desa prioritas
	Jumlah Sarjana pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN) yang dibina
	Persentase tingkat masyarakat miskin

Misi 4 :

Optimalisasi Hasil Pembangunan dan Sarana Prasarana Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Kesesuaian Tata Ruang dan Mitigasi Bencana

Tujuan 1

Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan	Persentase sampah Kota Pariaman yang terkelola dengan baik
	Jumlah RTH Publik Kota Pariaman
	Jumlah jenis pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Persentase kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam mengurangi resiko bencana
	Jumlah peserta pelatihan pemantapan Satuan Tugas Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Tujuan 2

Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kapasitas infrastruktur permukiman dan perkotaan berbasis tata ruang untuk menunjang aktivitas masyarakat	Jumlah infrastruktur pendukung aktifitas pasar dan kepariwisataan sebagai penunjang ekonomi masyarakat
	Presentase cakupan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
	Presentase pengurangan luas genangan air di kota Pariaman
	Luas kawasan untuk pemanfaatan ruang kota hijau

Sasaran Strategis 4 : Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan	Jumlah regulasi tentang rencana detail tata ruang kota khususnya pada kawasan strategis
Sasaran strategis 5 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi serta informatika dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang berfungsi secara optimal
	Jumlah penambahan sarana dan prasarana pendukung keselamatan jalan raya
	Jumlah sarana dan prasarana pendukung keselamatan jalan raya yang dipelihara

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Pemerintah Kota Pariaman telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Nomor 579/060/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2018. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pariaman tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SOPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan dan kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah 2. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ SDLB/ Paket A 3. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ SDLB/ Paket A 4. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ MTs/ Paket B 5. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ MTs/ Paket B 6. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ MTs/ Paket B 7. Persentase angka putus sekolah setara SD 8. Persentase angka putus sekolah setara SLTP 9. Persentase Angka Melek Huruf pertahun 10. Jumlah kunjungan siswa ke perpustakaan daerah dan sekolah 11. Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi 12. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti pelatihan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

		13. Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan	
		14. Jumlah armada yang berkualitas dan memadai	Dinas Perhubungan
2	Pengembangan Pendidikan Formal dan Non Formal	1. Persentase pendidikan anak usia dini 2. Jumlah sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
3	Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan	1. Persentase pemanfaatan TIK dalam tata pemerintahan 2. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibina 3. Jumlah informasi yang disampaikan melalui media massa	Dinas Kominfo
4	Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	1. Persentase keikutsertaan siswa dalam kegiatan keagamaan 2. Persentase tingkat pemahaman keagamaan di masyarakat	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Bagian Kesra Setda
5	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya	1. Jumlah Lembaga Pemuka adat yang difasilitasi 2. Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Satpol PP Kesbangpol
6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kota Pariaman	1. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) per tahun 2. Jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup per tahun 3. Jumlah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup per tahun 4. Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan Antenatal Minimal 4 kali (K4) 5. Persentase balita bergizi buruk per tahun 6. Rasio Posyandu per satuan balita per tahun 7. Jumlah penduduk miskin yang tercover pembiayaan kesehatan (JKSS) per tahun 8. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Dinas Kesehatan
7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pariaman	1. Persentase angka keberhalan pengobatan TB paru positif (Success Rate) minimal 85% 2. Persentase IR DBD <49 per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan
8	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat kan penanganan 2. Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB
9	Meningkatnya Produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 2. Persentase penambahan produksi hasil padi 3. Persentase penambahan produksi hasil kelapa per tahun 4. Persentase penambahan produksi hasil ternak	Dinas Pertanian dan Pangan

		5. Persentase penambahan populasi ternak	
		6. Jumlah rata-rata pendapatan petani binaan	
10	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan daerah	1. Persentase ketersediaan sumber energi dan protein perkapita 2. Persentase penguatan cadangan pangan 3. Persentase pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Dinas Pertanian dan Pangan
11	Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian	1. Jumlah jenis produk olahan hasil pertanian	
12	Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap	1. Jumlah produksi perikanan budidaya 2. Jumlah produksi perikanan tangkap	Dinas Perikanan
13	Meningkatnya tingkat kesejahteraan nelayan dan petani ikan	1. Tingkat konsumsi ikan 2. POKWASMAS yang dibina 3. Jumlah pengolah ikan	
14	Meningkatnya pengawasan dan perlindungan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan	1. Jumlah bibit restocking 2. Luas hutan mangrove 3. Luas terumbu karang yang dipelihara	
15	Meningkatnya jumlah koperasi aktif, mandiri, UMKM dan usaha Ekonomi Kreatif dan Profesional	1. Jumlah koperasi 2. Jumlah UMKM 3. Jumlah Bumdes	Disperindagkop & UKM DPM
16	Tersedianya pasar yang representative dan nyaman	1. Jumlah Kawasan Pasar yang dibangun dan ditata	Disperindagkop & UKM
17	Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku	1. temuan barang yang tidak memenuhi standar	
18	Meningkatnya sektor industri, industri kreatif dan komoditi unggulan	1. Persentase pertumbuhan industri 2. Jumlah industri kreatif 3. Jumlah teknologi tepat guna yang diciptakan	DPMD
19	Meningkatnya Pembangunan, pengembangan penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana pendukung	1. Jumlah kawasan wisata yang dibangun dikembangkan dan ditata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
20	Meningkatnya promosi wisata secara konsisten, baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional	1. Jumlah team jaringan kerjasama promosi pariwisata 2. Jumlah ivent promosi yang dilaksanakan 3. Jumlah Bahan Promosi Wisata yang dibuat	
21	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang mendukung pariwisata	1. Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan, dibina dan dilestarikan 2. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	

22	Meningkatnya jumlah penanaman modal	1. Jumlah investor yang menanamkan modal	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
		2. Jumlah perizinan yang di terbitkan	
23	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	1. Persentase tingkat disiplin aparatur	BKPSDM
		2. Persentase ketersediaan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintah daerah	Bappeda
		3. Presentase tingkat pelayanan terhadap anggota DPRD	Setwan
24	Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah	1. Tingkat penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah	Badan Keuangan Daerah
25	Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah berbasis web dan secara online (e-Government)	1. Persentase peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	Bappeda
		2. Jumlah informasi dan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintah daerah terutama dalam perencanaan	
26	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik	1. Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	Dinas DUKCAPIL
		2. Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik	
		3. Persentase yang memiliki KK	
		4. Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	
		5. Jumlah dokumen profil kependudukan yang diterbitkan	
		6. Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang dilayani	
27	Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah	1. Persentase tingkat realisasi PAD terhadap target PAD	Badan Keuangan Daerah
28	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset daerah	1. Persentase Aset yang terdata	Sekretariat Daerah
		2. Nilai dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
		3. Nilai dan Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
29	Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif, dan akuntabel	1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan	Bappeda
		2. Tingkat Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	
		3. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas	
30	Menurunnya Angka Pengangguran	1. Persentase penurunan jumlah pengangguran	Dinas PMPTSP dan Naker
		2. Jumlah tenaga kerja yang berkualitas	
		3. Jumlah Kerjasama dengan pelaku usaha dalam penyaluran tenaga kerja	
31	Mengurangi tingkat kemiskinan	1. Persentase keterpaduan rogram dalam penanggulangan kemiskinan	Bappeda
		2. Persentase menurunnya angka kemiskinan	
		3. Jumlah KK miskin yang diberdayakan di desa prioritas	DPMD

32	meningkatnya kualitas lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan	1. Persentase sampah Kota Pariaman yang terkelola dengan baik	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Persentase pemantauan kualitas lingkungan	
		3. Persentase tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) Publik	
33	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	1. Persentase kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	BPBD Dinas Sosial
		2. Jumlah kasus kebakaran yang tertanggulangi	Dinas Satpol PP & Damkan
34	Meningkatnya kapasitas infrastruktur pemukiman dan perkotaan berbasis tata ruang untuk menunjang aktivitas masyarakat	1. Jumlah infrastruktur pendukung aktifitas masyarakat	Dinas PU dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		2. Persentase cakupan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	
		3. Persentase genangan air yang ditangani	
		4. Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat	
35	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi serta informatika dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	1. Jumlah sarana dan prasarana transportasi darat yang berfungsi secara optimal	Dinas Perubungan
		2. Jumlah penambahan sarana dan prasarana pendukung keselamatan jalan raya	

2.3. Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja merupakan amanat dari Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dana yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Adapun Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017 sebagai berikut :

MISI 1
Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkompetensi , Berbudaya, Beriman dan Bertaqwa Melalui Penguasaan Iptek Serta Memiliki Etos Kerja Yang Tinggi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	10,38 tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	9,650,057,000
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ SDLB/ Paket A	100%		
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ SDLB/ Paket A	95%		
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ MTs/ Paket B	100%	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,453,149,000
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ MTs/ Paket B	90%		
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA/ MA/ Paket C	100%	Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	193,660,000
		Persentase angka putus sekolah setara SD	0,5%		
		Persentase angka putus sekolah setara SLTP	0,20%	Mutu Pendidik dan Tenaga Program	1,867,729,000
		Persentase angka melek huruf pertahun	99,70%		
		Jumlah kunjungan siswa ke perpustakaan	1000 orang		
		Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi	80%		
		Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti pelatihan	2.216 orang		
		Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan	2 Sekolah		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah armada yang berkualitas dan memadai	9 unit		
2	Pengembangan pendidikan formal dan non formal	Jumlah sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal	2 jenis	Program Pendidikan Non Formal	165,655,000
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	893,602,000
3	Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan	Persentase pemanfaatan TIK dalam tata pemerintahan	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	767,436,000
		Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina	5 KIM	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	904,421,000
		Jumlah informasi yang disampaikan melalui media massa	2.000 Informasi	Program kerjasama informasi dengan Mass media	950,584,000
				Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	104,176,000
4	Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	Persentase keikutsertaan siswa terhadap keagamaan	80%	Program pengembangan nilai budaya	15,031,816,000
		Persentase tingkat kualitas pendidikan keagamaan di masyarakat	100%	Program Peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan keagamaan non formal	105,637,500
5	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya	Jumlah Lembaga Pemuka adat yang difasilitasi	12 lembaga	Program Pengelolaan keragaman budaya	339,919,000
		Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	100%	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Tindak Pidana Pelanggaran Perda	189,966,000
				Penyelesaian Pelanggaran Perda secara Non Yustisi	149,990,000
				Pemeliharaan Kantrantibmas dan Penegakan Perda (Operasional Penegakan Perda)	1,020,175,000
				Pembinaan dan Penyuluhan Perda	60,000,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Keamanan Lingkungan dan Ketertiban Umum	
				Pembentukan Sekretariat Bersama PPNS	118,150,000
				Pengendalian Keamanan Lingkungan	1,020,876,000
				Operasional Piket Malam	552,660,000
				Pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal	690,320,000
				Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	146,300,000
		Jumlah kegiatan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	4 Kegiatan	Dijadikan indikator SKPD	
		Jumlah kegiatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	3 Kegiatan		
		Gangguan keamanan lingkungan terdeteksi	100%		
6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup (AHH) per tahun	71 tahun	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	125,395,000
		Jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup per tahun	23 / 1.000 KH	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.	349.675.000
		Jumlah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup per tahun	102/100.000 KH	Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak	56,906,000
		Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan Antenatal Minimal 4 kali (K4)	76%		
		Persentase balita bergizi buruk per tahun	2%	Program perbaikan gizi masyarakat	625,070,000
				Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	98,680,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rasio Posyandu per satuan balita per tahun	2/100 balita	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	601,619,000
		Jumlah penduduk miskin yang tercover pembiayaan kesehatan (JKSS) per tahun	9.215 jiwa	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	4,253,542,744
		Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	93%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.	56,069,000
7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pariaman	Persentase Puskesmas dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru positif (Success Rate) minimal 85%	84%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.	194,729,000
		Persentase Puskesmas dengan IR DBD <49 per 1.000 penduduk	64%		
8	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	320,738,000
				Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	321,185,000
				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	90,365,400
		Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	66%	Program Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi	99,525,000
				Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	25,000,000
				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR, Kegiatan Pendirian Pusat Informasi dan Konseling	82,833,500
				Program Keluarga Berencana	190,987,000
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina	119,875,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Keluarga	

MISI 2 :
Penguatan Struktur Perekonomian Melalui Peningkatan Daya Saing
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Potensi Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,3 %	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	1,577,985,000
		Persentase penambahan produksi hasil padi	2,98%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	505,235,000
		Jumlah gerakan pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) Pertanian/Perkebunan	10 kali		
		Persentase penambahan produksi hasil ternak	3%	Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	111,702,000
		Persentase penambahan populasi ternak	6%		
		Jumlah rata-rata pendapatan petani binaan	Rp 1.333.000,-	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	149,965,000
		Penurunan Jumlah Kasus Rabies	25 kasus	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	78,920,000
		Jumlah kelompok tani yang menggunakan TTG dan Alsintan	80 kelompok	Program pemberdayaan penyuluh Pertanian/ perkebunan	172,100,000
		Jumlah kerjasama pemasaran hasil produksi ternak	70 MoU	-	-
10	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan daerah	Persentase ketersediaan sumber energi dan protein perkapita	85%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	106,500,000
		Persentase penguatan cadangan pangan	80%		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	92%		
		Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	90%		
		Persentase Stabilitas harga dan pasokan pangan	45%		
		Persentase jumlah penanganan daerah rawan pangan	100%		
		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	122,480,000
11	Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian	Jumlah jenis produk olahan hasil pertanian	10 Jenis	Program Peningkatan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	209,176,000
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan	60,275,000
12	Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan budidaya	264 ton	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	279,520,000
		Jumlah produksi perikanan tangkap	6.500 ton	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	528,740,000
		Jumlah usaha budidaya yang dapat sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)	2 orang		
		Luas areal budi daya	95 ha		
		Jumlah Unit Pembenihan Rakyat	15 UPR		
		Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang bersertifikat	4 UPR		
		Produksi benih ikan unggul	15 juta		
		Jumlah pembudidaya ikan	720 RTP		
13	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani ikan	Jumlah POKWASMAS yang dibina	14 kelompok	Program peningkatan kesadaran dan penengakan Hukum dalam pendayagunaan Sumberdaya Laut	120,260,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah unit pengolahan ikan	32 UPI	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	55,500,000
		Tingkat konsumsi ikan	35 kg/kapita/th	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran	151,600,000
14	Meningkatnya pengawasan dan perlindungan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah bibit restocking	50.000 ekor	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	120,260,000
		Luas hutan mangrove	25 ha		
		Luas terumbu karang yang dipelihara	10,95 ha	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem	178,204,500
15	Meningkatnya jumlah koperasi aktif, mandiri dan UMKM dan Usaha Ekonomi Kreatif dan profesional	Jumlah koperasi	86 koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	147,580,000
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	23,360,000
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	325,455,000
		Jumlah UMKM	7.100 unit	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	105,625,000
		Jumlah Koperasi yang aktif	67 Kopersai	Dijadikan indikator OPD	
		Jumlah Koperasi yang RAT	46 Koperasi		
16	Tersedianya Pasar yang Representatif, Bersih, Aman dan Nyaman	Jumlah Kawasan Pasar yang dibangun dan ditata	3 unit	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1,009,271,000
17	Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku	Jumlah alat ukur yang di tera ulang	330 unit	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	140,790,000
		Berkurangnya temuan barang yang tidak memenuhi standar	5 temuan		
18	Meningkatnya Sektor Industri dan Industri Kreatif dan	Persentase pertumbuhan industri	1,70 %	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1,897,630,000
		Jumlah industri kreatif	806 unit		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	komoditi unggulan	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	9.030 orang		
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri kreatif	5.554 orang		
		Jumlah teknologi tepat guna yang diciptakan	15 alat	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	32,510,000
19	Meningkatnya pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana pendukung	Jumlah kawasan wisata yang dibangun, dikembangkan dan ditata	6 unit	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1,258,840,000
		Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi	2 unit		
		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 dokumen		
20	Meningkatnya promosi wisata secara konsisten baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional	Jumlah team jaringan kerjasama promosi pariwisata	6 team	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2,859,385,000
		Jumlah ivent promosi yang dilaksanakan	10 event		
		Jumlah buku statistik wisata terpadu yang tersusun	100 buku		
		Jumlah Bahan Promosi Wisata yang dibuat	10 jenis		
		Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina	50 orang	Program -bangan Kemitraan	307,332,000
21	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan, dibina dan dilestarikan	5 Sanggar	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	96,000,000
		Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2 unit	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1,257,150,000
22	Meningkatnya jumlah penanaman modal	Jumlah investor yang menanamkan modal	1 investor	Pengadaan Dekorasi Pameran Pembangunan	10,000,000
				Promosi Investasi	71,500,000
		Jumlah perizinan yang di terbitkan	2000 izin	Pelaksanaan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan di Bidang Penanaman Modal	46,000,000
				Sosialisasi Perizinan	26,030,000
				Peningkatan Pelayanan Prima Perizinan	350,000,000

MISI 3 :

**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih
Serta Mampu Mendorong Dunia Usaha Dan Masyarakat Lebih
Mandiri**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	214,321,200
		Persentase tingkat kapasi tas sumber daya aparatur	100%		
		Persentase peningkatan hasil tindak lanjut	6%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,823,639,000
		Persentase penyelesaian LHP tepat waktu	80%		
		Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus	85%	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	572,720,000
		Jumlah Auditor sesuai kebutuhan APIP	3 orang		
		Presentase tingkat pelayanan terhadap anggota DPRD	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	579,800,000
		Persentase ketersediaan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintah daerah	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Media massa	1,736,412,000
				Program Pengembangan Data/Informasi/ Statitik Daerah	51,000,000
				Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	950,584,000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	104,176,000				
24	Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah	Tingkat penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,489,497,000
25	Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah berbasis Web dan seca-ra Online (E-Government)	Persentase peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	90%	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	260,000,000
		Jumlah informasi dan data yang jelas, akurat, mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan terutama dalam perencanaan pembangunan	1 data		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
26	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	100%	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	129,871,000	
		Persentase yang memiliki KK	96%			
		Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang dilayani	7 dokumen			
		Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik	85%	Operasional dan Mobilisasi E-KTP		97,172,000
		Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	75%	Peningkatan Pelayanan Kepemilikan akta pencatatan sipil		70,240,000
		Jumlah dokumen profil kependudukan yang diterbitkan	1 Dokumen	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan		67,660,000
27	Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah	Persentase tingkat realisasi Pajak Daerah terhadap target PAD	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,549,421,550	
		Persentase tingkat kenaikan PAD	5%			
28	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang akurat dan akuntabel	Persentase aset yang terdata	100%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,937,115,000	
		Nilai dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	CC	Program Ketatalaksanaan	78,900,000	
		Nilai dan peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	112,982,000	
29	Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif, dan akuntabel	Persentase tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	70%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2,091,815,000	
		Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	71 Desa/Kelurahan			
		Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas	4 Dokumen dan 2 Perwako	Program Perencanaan Sosial dan Budaya		163,355,317
				Program Perencanaan Tataruang		580,800,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	Menurunnya angka pengangguran	Persentase penurunan jumlah pengangguran	1,5%	Program Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	556,521,000
		Jumlah Kerjasama dengan pelaku dunia usaha dalam penyaluran tenaga kerja	30 perusahaan		
		Jumlah tenaga kerja yang berkualitas	500 orang		
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta dan lembaga pendidikan non formal	25 Lembaga	<i>Dijadikan Indikator OPD</i>	
31	Mengurangi tingkat kemiskinan	Persentase keterpaduan program dalam penanggulangan kemiskinan	75%	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	163,355,317
		Persentase menurunnya angka kemiskinan	0,02%	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	143,700.000
		Jumlah KK Miskin yang terlayani	1.500 KK	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS	1,281,652,841
		Jumlah KK Miskin yang diberdayakan di Desa Prioritas	50 KK	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	94,988,720
		Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang terlayani	280 orang	Program Pembinaan Anak Terlantar	48,645,000
				Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	58,092,500

MISI 4 :

Optimalisasi Hasil Pembangunan Dan Sarana Prasarana Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Kesesuaian Tata Ruang Dan Mitigasi Bencana

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Untuk Menciptakan Pembangunan yang Berkelanjutan	Persentase sampah Kota Pariaman yang terkelola dengan baik	58%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	780,810,500
		Jumlah RTH Publik Kota Pariaman	14 kawasan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,451,385,900
		Jumlah jenis pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan	3 jenis	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	129,750,000
33	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	100%	Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	4,045,991,000
		Jumlah Kasus kebakaran yang tertanggulangi	100%	Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	921,390,000
34	Meningkatnya kapasitas infrastruktur pendukung aktifitas pasar dan kepariwisataan sebagai penunjang ekonomi masyarakat	Jumlah infrastruktur pendukung aktifitas pasar dan kepariwisataan sebagai penunjang ekonomi masyarakat	15 Jenis	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	28,082,512,320
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	13,387,305,604
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	415,890,000
				Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3,673,375,000
		Persentase cakupan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	20%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1,566,100,000
		Persentase pengurangan luas genangan air di Kota Pariaman	25%	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	4,017,986,900
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	13,936,471,373

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Program Pengendalian Banjir	496,340,000
		Jumlah regulasi tentang rancangan detail tata ruang kota khususnya pada kawasan - kawasan strategis	1 Perda dan 1 Dokumen	Program Perencanaan Tata Ruang	398,325,000
				Program Pemanfaatan Ruang	5,537,200,000
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1,058,050,000
				Program Pengembangan Kota Hijau	2,534,200,000
				Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan	18,595,962,000
35	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi serta informatika dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang berfungsi secara optimal	3 jenis	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	55,690,000
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut	455,303,000
				Program Peningkatan Pelayanan Parkir	721,270,000
		Jumlah penambahan sarana dan prasarana pendukung keselamatan jalan raya	5 jenis	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	503,075,441
				Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	544,740,000
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung keselamatan jalan raya yang dipelihara	4 jenis	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	252,000,000
				Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	55,915,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Pariaman selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pariaman, melaksanakan kewajiban mempertanggung jawabkan kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.

3.2. Metode Pengukuran Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran capaian kinerja sasaran, dilakukan dengan menggunakan metode membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi ditambah dengan perbandingan kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Pariaman serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (Form. PK)

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, atau semakin rendah realisasi semakin tinggi capaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan

kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada table dibawah ini :

No	Klasifikasi Penilaian	Prediket
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

A. Capaian kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

MISI 1 : MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETENSI, BERBUDAYA, BERIMAN DAN BERTAQWA MELALUI PENGUASAAN IPTEK SERTA MEMILIKI ETOS KERJA YANG TINGGI

Sasaran 1					
Meningkatnya Aksesibilitas Dan Pemerataan Kualitas Pendidikan					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Rata-rata lama sekolah	10.38	tahun	10.09	tahun	97.21%
Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ SDLB/ Paket A	100	%	106.56	%	93.44%
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ SDLB/ Paket A	95	%	86.68	%	91.24%
Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ MTs/ Paket B	100	%	131	%	69%
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ MTs/ Paket B	90	%	95.07	%	105.63%
Persentase angka putus sekolah setara SD	0.5	%	0.18	%	164%
Persentase angka putus sekolah setara SLTP	0.2	%	0.14%	%	199%
Persentase Angka Melek Huruf pertahun	99.70	%	99.72	%	100.02%
Jumlah kunjungan siswa keperpus takaan daerah dan sekolah	1000	orang	116.103	orang	11.610%
Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi	80	%	89	%	111.25%
Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti pelatihan	2.216	orang	1.421	orang	64.12%
Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan	2	Sekolah	61	Sekolah	3050.0%
Jumlah armada yang berkualitas dan memadai	9	unit	9	unit	100%

Sasaran 2						
Pengembangan Pendidikan Formal dan Non Formal						
INDIKATOR		TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal		2	jenis	2	jenis	100%
Sasaran 3						
Pengembangan Penggunaan Teknologi dalam Kehidupan Masyarakat Dan Tata Pemerintahan						
INDIKATOR		TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase pemanfaatan TIK dalam tata pemerintahan		100	%	90	%	90%
Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina		5	KIM	5	KIM	100%
Jumlah informasi yang disampaikan melalui media massa / elektronik		2000	informasi	8314	informasi	416%
Sasaran 4						
Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa						
INDIKATOR		TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase tingkat keikutsertaan siswa terhadap kegiatan keagamaan di sekolah		80	%	80	%	100%
Persentase tingkat pemahaman keagamaan dimasyarakat		100	%	90	%	90%
Sasaran 5						
Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya						
INDIKATOR		TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah Lembaga Pemuka adat yang di fasilitasi		12	lembaga	12	lembaga	100%
Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu		100	%	100	%	100%
Jumlah Kegiatan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		<i>dijadikan indikator OPD</i>				
Jumlah kegiatan Penyakit Masyarakat						
Gangguan keamanan lingkungan terditeksi						
Sasaran 6						
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat						
INDIKATOR		TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Angka usia harapan hidup (AHH) per tahun		71	tahun	70	tahun	98.59%
Jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup per tahun		23	/1.000K H	18	/1.000K H	78.26%
Jumlah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup		102	/100.000 KH	1	/100.000 KH	0.98%
Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan Antenatal Minimal 4 kali (K4)		76	%	78.1	%	102.76%

Persentase balita bergizi buruk per tahun	2	%	1.7	%	85%
Rasio pos yandu per satuan balita per tahun	2	/100balita	1	/100balita	50%
Jumlah penduduk miskin yang tercover pembiayaan kesehatan (jamkesmas,jamkesda dan JKSS per tahun)	9215	orang	9215	orang	100%
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	93	%	90.9	%	97.7%
Sasaran 7					
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru positif (Sukses	84	%	93.30	%	111%
Persentase dengan IR DBD <49 per 1.000 penduduk	64	%	29	%	45%
Sasaran 8					
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100	%	100	%	100%
Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	66	%	64.60	%	98%
MISI 2 : Penguatan Struktur Perekonomian Melalui Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Potensi Daerah					
Sasaran 1					
Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi tanaman pangan, hortikultura,perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28.3	%	28.1	%	99%
Persentase penambahan produksi hasil padi	2.98	%	4.76	%	160%
Persentase penambahan produksi hasil ternak	3	%	2.42	%	81%
Persentase penambahan populasi ternak	6	%	2.04	%	34%
Jumlah rata-rata pendapatan petani binaan	1,333,000 Rp		1,300,000 Rp		97.5%
Jumlah gerakan pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) Pertanian/Perkebunan	10	kali	7	kali	70%
Penurunan Jumlah Kasus Rabies	25	kasus	180	kasus	720%
Jumlah kelompok tani yang menggunakan TTG dan Alsintan	80	kelompok	186	kelompok	232.5%

INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah kerjasama pemasaran hasil produksi ternak	70	MoU	0	MoU	0%
Sasaran 2					
Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase ketersediaan sumber energi dan protein perkapita	85	%	154.82	%	182%
Persentase penguatan cadangan pangan	80	%	63	%	79%
Persentase pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	92	%	87.9	%	95.5%
Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	<i>dijadikan indikator SKPD</i>				
Persentase Stabilitas harga dan pasokan pangan					
Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan					
Persentase jumlah penanganan daerah rawan pangan					
Sasaran 3					
Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah jenis produk olahan hasil pertanian	10	Jenis	9	Jenis	90%
Sasaran 4					
Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tagkap					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah produksi perikanan budidaya	264	ton	274.99	ton	104.16%
Jumlah produksi perikanan tangkap	6500	ton	6251	ton	96.17%
Jumlah usaha budidaya yang dapat sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)	<i>dijadikan indikator SKPD</i>				
Luas areal budi daya					
Jumlah Unit Pembenihan Rakyat					
Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang bersertifikat					
Produksi benih ikan unggul					
Jumlah pembudidaya ikan					
Sasaran 5					
Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani ikan					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah POKWASMAS yang dibina	14	kelompok	18	kelompok	128.57%
Jumlah unit pengolahan ikan	20	UPI	20	UPI	100%
Tingkat konsumsi ikan	35	kg/kapita/th	35.5	kg/kapita/th	101%

Sasaran 6					
Meningkatnya pengawasan dan perlindungan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah bibit restocking	50,000	ekor	56,000	ekor	112%
Luas terumbu karang yang dipelihara	10.95	ha	10.95	ha	100%
Sasaran 7					
Meningkatnya jumlah koperasi aktif, mandiri dan UMKM dan Usaha Ekonomi Kreatif dan profesional					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah koperasi	86	koperasi	72	koperasi	83.72%
Jumlah UMKM	7100	unit	7065	unit	99.51%
Sasaran 8					
Tersedianya Pasar yang Representatif dan Nyaman					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah Kawasan Pasar yang dibangun dan ditata	3	unit	3	unit	100%
Sasaran 9					
Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah alat ukur yang di tera ulang	330	unit	332	unit	100.6%
Berkurangnya temuan barang yang tidak memenuhi standar	5	temuan	3	temuan	140%
Sasaran 10					
Meningkatnya Sektor Industri dan Industri Kreatif dan komoditi unggulan					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase pertumbuhan industri	1.7	%	1.73	%	101.76%
Jumlah industri kreatif	806	unit	809	unit	100.37%
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	<i>dijadikan indikator OPD</i>				
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri kreatif					
Jumlah teknologi tepat guna yang diciptakan	15	alat	17	alat	113.33%
Sasaran 11					
Meningkatnya pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana pendukung					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah kawasan wisata yang dibangun, dikembangkan dan ditata	6	unit	4	unit	67%
Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi	2	unit	2	unit	100%
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7	dokumen	4	dokumen	57%

Sasaran 12					
Meningkatnya promosi wisata secara konsisten baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah team jaringan kerjasama promosi pariwisata	6	team	6	team	1
Jumlah ivent promosi yang dilaksanakan	10	event	10	event	1
Jumlah buku statistik wisata terpadu yang tersusun	100	buku	100	buku	1
Jumlah Bahan Promosi Wisata yang dibuat	10	jenis	10	jenis	1
Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina	50	orang	50	orang	100%
Sasaran 13					
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan, dibina dan dilestarikan	5	Sanggar	5	Sanggar	100%
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	unit	2	unit	100%
Sasaran 14					
Meningkatnya jumlah penanaman modal					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah investor yang menanamkan modal	1	investor	2	investor	200%
Jumlah perizinan yang di terbitkan	2000	izin	1127	izin	56%
MISI 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Mendorong Dunia Usaha Dan Masyarakat Lebih Mandiri					
Sasaran 1					
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase tingkat disiplin aparatur	100	%	95.7	%	96%
Persentase ketersediaan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintah daerah	100	%	100	%	100%

Persentase tingkat kapasitas sumber daya aparatur	dijadikan indikator SKPD				
Persentase peningkatan hasil tindak lanjut					
Persentase penyelesaian LHP tepat waktu					
Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus					
Jumlah Auditor sesuai kebutuhan APIP					
Persentase tingkat pelayanan terhadap anggota DPRD					
Sasaran 2					
Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Tingkat penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP		WTP		100%
Sasaran 3					
Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah berbasis Web dan secara Online (E-Government)					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah informasi dan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan	1	data	1	data	100%
Persentase peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	90	%	95	%	106%
Sasaran 4					
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	100	%	100	%	100%
Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik	85	%	96	%	113%
Persentase yang memiliki KK	96	%	96	%	100%
Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	75	%	81.43	%	109%
Jumlah dokumen profil kependudukan yang diterbitkan	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang dilayani	7	Dokumen	7	Dokumen	100%
Sasaran 5					
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase tingkat realisasi Pajak Daerah terhadap PAD	100	%	87.54	%	87.5%
Persentase tingkat kenaikan PAD	5	%	3.58	%	72%
Sasaran 6					
Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang akurat dan akuntabel					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase asset yang terdata	100%		100%		100%
Nilai dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	CC		CC		100%
Nilai dan peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi		Tinggi		100%

Sasaran 7					
Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif, dan akuntabel					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	70	%	68	%	97%
Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	71	Desa/ Kelurahan	71	Desa/ Kelurahan	100%
Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas	4 2	Dokumen Perwako	4	Dokumen	100%
Sasaran 8					
Menurunnya angka pengangguran					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase penurunan jumlah pengangguran	1.5	%	14	%	933%
Jumlah tenaga kerja yang berkualitas	500	orang	125	orang	25%
Sasaran 9					
Mengurangi Tingkat kemiskinan					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase keterpaduan program dalam penanggulangan kemiskinan	75	%	75	%	100%
Persentase menurunnya angka kemiskinan	0.02	%	0.019	%	105%
Jumlah KK Miskin yang terlayani	1500	KK	1500	KK	100.0%
Jumlah KK Miskin yang diberdayakan di Desa Prioritas	50	KK	50	KK	100%
Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang terlayani	280	orang	280	orang	100%
MISI 4 : Optimalisasi Hasil Pembangunan Dan Sarana Prasarana Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Kesesuaian Tata Ruang Dan Mitigasi Bencana					
Sasaran 1					
Meningkatnya kualitas lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase sampah Kota Pariaman yang dikelola dengan baik	58	%	58	%	100%
Jumlah RTH Publik Kota Pariaman	14	kawasan	14	kawasan	100%
Jumlah jenis pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan	3	jenis	3	jenis	100%
Sasaran 2					
Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Persentase kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	100	%	100	%	100%
Jumlah Kasus kebakaran yang tertanggulangi	100	kejadian	234	kejadian	234%

Sasaran 3					
Meningkatnya kapasitas infrastruktur pemukiman dan perkotaan berbasis tata ruang untuk menunjang aktivitas masyarakat					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah infrastruktur pendukung aktifitas pasar dan keparwisataan sebagai penunjang ekonomi masyarakat	15	Jenis	15	Jenis	100%
Persentase cakupan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	20	%	20	%	100%
Persentase pengurangan luas genangan air di Kota Pariaman	25	%	25	%	100%
Jumlah regulasi tentang rancangan detail tata ruang kota khususnya pada kawasan - kawasan strategis	1	Perda	1	Perda	100%
	1	Dokumen	3	jenis	300%
Sasaran 4					
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi serta informatika dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat					
INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
Jumlah sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang berfungsi secara optimal	3	jenis	3	jenis	100%
Jumlah penambahan sarana dan prasarana pendukung keselamatan jalan raya	5	jenis	5	jenis	100%
Jumlah sarana dan prasarana pendukung keselamatan jalan raya yang dipelihara	4	jenis	5	jenis	125%

A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017

MISI I. MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKOMPETENSI, BERBUDAYA, BERIMAN DAN BERTAKWA MELALUI PENGUASAAN IPTEK SERTA MEMILIKI ETOS KERJA YANG TINGGI

Sasaran 1

Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Rata-rata lama sekolah	10.38 tahun	10.09 tahun	97.21%	86.70%	100%
2	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ SDLB/ Paket A	100 %	106.56 %	93%	94.26%	100%
3	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ SDLB/ Paket A	95 %	86.68 %	91.24%	93.70%	100%
4	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ MTs/ Paket B	100 %	131 %	69%	67.59%	100%
5	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ MTs/ Paket B	90 %	95.07 %	105.63%	80%	100%
6	Persentase angka putus sekolah setara SD	0.5 %	0.18 %	164%	188.0%	100%
7	Persentase angka putus sekolah setara SLTP	0.2 %	0.14 %	130%	170.0%	100%
8	Persentase angka melek huruf pertahun	99.7 %	99.72 %	100.02%	100.10%	100%
9	Jumlah kunjungan siswa ke perpustakaan daerah dan sekolah	1000 orang	116.1103 orang	11.611%	450.1%	100%
10	Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi	80 %	89.14 %	111.43%	112.5%	100%
11	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti pelatihan	2216 orang	1421 orang	64.12%	36%	100%
12	Jumlah sekolah yang mendapat kan sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan	2 Sekolah	61 Sekolah	3050%	4100%	100%
13	Jumlah armada yang berkualitas dan memadai	10 unit	9 unit	90%	90%	90%
<i>Rata-rata capaian</i>				321%	436%	99%

Berdasarkan tabel sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan tahun 2017 terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja sasaran, dengan rata-rata capaian kinerja 321%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang rata-rata capaian sebesar 444%, pada tahun 2017 adanya penurunan capaian yang cukup tinggi, yaitu sebesar 122%, sedangkan dari tahun 2015 dengan rata-rata capaian 107% pada tahun 2016 naik sebesar 337%.

Sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan tahun 2017 adanya pengurangan jumlah indikator kinerja dari

16 998 indikator menjadi 13 indikator. Hal ini disebabkan jenjang SLTA berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi.



1. Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan **oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas** untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Untuk indikator kinerja rata-rata lama sekolah mempunyai target 10,38 tahun, sedangkan realisasinya 10,09 tahun sehingga capaian kinerja tahun 2017 adalah 97,21%. Walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan akan tetapi rata-rata lama sekolah di kota Pariaman sudah lebih baik dari target nasional, yaitu 9 tahun. Hal ini berarti kepedulian masyarakat, dan pemerintah kota Pariaman terhadap pendidikan sangat tinggi.
2. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan

bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A target 100% realisasi 106,56% dengan capaian 93%. APK SD/MI/SDLB/Paket A yang di atas 100% berarti masih ada anak yang bersekolah di SD di luar usia 7–12 tahun, bisa jadi anak tersebut cepat masuk SD (di bawah usia 7 tahun) atau masih ada yang belum menamatkan SD padahal usianya sudah lebih 12 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2016 capaian 94.26%, sedangkan tahun 2015 capaian 100%. Terjadinya penurunan (APK) SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 93% pada tahun 2017 dari tahun sebelumnya karena dipengaruhi oleh kepindahan SMA/SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2016 dan 2015 terjadi peningkatan yang signifikan disebabkan oleh adanya keinginan warga kabupaten Padang Pariaman yang berdomisili disekitar kota Pariaman menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah di kota Pariaman. Walaupun ada tren penurunan APK, namun komitmen pemerintah Kota Pariaman terhadap pendidikan sangatlah tinggi. Hal ini tampak dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan secara keseluruhan kesadaran dan kepedulian masyarakat kota Pariaman terhadap pendidikan masih sangat baik.

3. APM digunakan Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A mempunyai target 95%, sedangkan realisasinya 86,68% sehingga capaian kinerja pada tahun 2017 adalah 91,24%. Capaian kinerja tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015 – 2016.

Terjadinya penurunan APM SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2017 (91,24%) dari tahun 2016 (93,70%), dipengaruhi oleh penurunan APK tahun 2017 (93%).

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B target 100%, sedangkan realisasinya 131% dengan capaian 69%. APK SMP/MTs/Paket B yang diatas 100% berarti masih ada anak yang bersekolah di SMP di luar usia 13 – 15 tahun, bisa jadi anak tersebut cepat masuk SMP (dibawah usia 13 tahun) atau masih ada yang belum menamatkan SMP padahal usianya sudah lebih 15 tahun.

Hal ini berarti tingkat kepedulian, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan di kota Pariaman sangat bagus. Dan layanan pendidikan tidak hanya sebatas untuk anak-anak kota Pariaman saja, akan tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh anak-anak luar kota Pariaman. Hal demikian juga sesuai dengan visi & misi kota Pariaman, yaitu sebagai daerah tujuan pendidikan.

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B target 90% realisasi 95.07% dengan capaian 105.63% untuk tahun 2016 capaian 80% sedangkan tahun 2015 capaiannya 100%, jadi jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016, maka pada tahun 2017 terjadi peningkatan capaian sebesar 26%. Adanya peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B melebihi target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan APK SMP/MTs./Paket B tahun 2017. Capaian 105, 63% ini adalah capaian yang sangat bagus, jauh melebihi target yang ditentukan.
6. Persentase angka putus sekolah setara SD mempunyai target 0,5% realisasinya 0,18% dengan capaian sebesar 164%, jika dibandingkan tahun 2016 capaian 188% dan tahun 2015 capaian 100%. Angka putus sekolah SD tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini berarti baik, karena anak-anak usia SD di kota Pariaman hampir semuanya sudah bersekolah dan tidak ada yang tidak bersekolah
7. Persentase angka putus sekolah setara SMP tahun 2017 target 0,2%, realisasi 0,14% capaian kinerja 130% jika dibandingkan dengan tahun 2016 capaian 170% dan tahun 2015 capaian 100%. Dengan capaian kinerja yang melebihi dari target dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Pariaman berhasil menurunkan jumlah siswa yang putus sekolah/ berhenti sekolah. menurunkan jumlah siswa yang putus sekolah/ berhenti sekolah.

Anak-anak usia SMP di kota Pariaman hampir semuanya sudah bersekolah dan sangat sedikit sekali yang putus sekolah. Artinya perhatian dari masyarakat, pihak sekolah dan pemerintah kota Pariaman terhadap pendidikan sangat tinggi.

8. Persentase Angka Melek Huruf mempunyai target 99,70%, sedangkan realisasinya 99,72% sehingga capaian kinerja tahun 2017 adalah 100,02%. Dengan capaian kinerja yang melebihi dari target dapat dikatakan sudah semakin sedikit warga Kota Pariaman yang belum bisa baca tulis dan diprediksi orang itu tergolong warga yang sudah tua. Artinya kesadaran warga kota Pariaman terhadap pendidikan sangat tinggi. Hal ini tergambar dari sangat sedikitnya warga kota yang tidak bisa baca tulis.
9. Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Siswa ke Perpustakaan daerah dan sekolah dengan target 1000 orang per tahun, sedangkan realisasinya 116.103 orang dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 116.10%, dengan rincian kunjungan siswa ke perpustakaan sekolah berjumlah 111.331 orang, sedangkan ke perpustakaan daerah dan pustaka keliling 4.772 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 realisasi kunjungan ke perpustakaan 4.501 orang adanya kenaikan yang cukup tinggi, adanya pengaruh dalam pemberian pelayanan perpustakaan diantaranya pelayanan pustaka keliling yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dengan 3 (tiga) lokasi per hari. Inilah kondisi yang diharapkan oleh pemerintah kota Pariaman terhadap siswa dan warga sekolah. Adanya kesadaran yang tinggi untuk terus membaca, tidak hanya di perpustakaan akan tetapi juga di luar perpustakaan. Sadar membaca akan membuka jendela dunia dan memperkaya wawasan siswa.
10. Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Kompetensi mempunyai target 80% sedangkan realisasinya 89,14% sehingga capaian kinerja tahun 2017 adalah 111,43%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 yaitu 113% maka capaian pada tahun 2017 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya guru yang pensiun pada tahun 2017 dan tidak adanya penerimaan guru PNS pada tahun 2017. Artinya tenaga

pendidik dan kependidikan di kota Pariaman sudah memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tuntutan pelayanan pendidikan. Akan tetapi kompetensi yang dimiliki harus *diup-date*.

11. Untuk indikator kinerja jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti pelatihan mempunyai target 2.216 orang, sedangkan realisasinya 1.421 orang sehingga capaian kinerja tahun 2017 adalah 64.12%. Capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 35,83%, maka capaian kinerja tahun 2017 mengalami peningkatan. Memang ada peningkatan jumlah pendidik dan tenaga pendidik untuk mengikuti pelatihan pada tahun 2017 sebesar 64,12% dibandingkan tahun 2016 sebesar 35,83%. Akan tetapi angka ini masih kurang dari target yang ditentukan. Hal ini bisa jadi karena kurangnya pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pada intinya kemampuan pendidik dan tenaga pendidik harus *diup-date* agar lebih baik lagi.
12. Indikator jumlah sekolah yang mendapatkan sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan mempunyai target 2 sekolah, sedangkan realisasinya 61 sekolah sehingga capaian kinerja 2017 adalah 3050%. jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 4100% mengalami penurunan yang sangat cukup tinggi. Memang ada peningkatan yang sangat luar biasa dalam membenahi sarana pendukung pendidikan. Target hanya 2 sekolah sementara realisasinya 61 sekolah. Akan tetapi kita masih lalai dalam membenahi prasarana pendidikan, seperti mengadakan pelatihan bagi guru, memberikan bimtek tentang kurikulum, media pembelajaran dan lain sebagainya. Masih tinggi kecendrungan untuk membangun fisik/sarana daripada membangun prasarana.
13. Bus Sekolah merupakan sarana pelayanan angkutan transportasi untuk para siswa-siswi terutama bagi mereka yang tinggal di pinggiran kota untuk menuju ke sekolah masing-masing Saat bus sekolah yang beroperasi sebanyak 9 unit, melayani 4 rute setiap hari sekolah, dikelola oleh Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pariaman.

Adapun layanan operasional bus sekolah adalah sebagai berikut :

- a) SMPN 8 Pariaman dan SMAN 6 Pariaman
- b) SMAN 5 Pariaman dan SMPN 6 Pariaman
- c) SMKN 1 Pariaman dan SMPN 5 Pariaman
- d) SMAN 3 Pariaman dan SMP9 Pariaman

Sedangkan jam operasional pelayanan angkutan bus sekolah adalah sebagai berikut :

- a) Pagi : 06.00 Wib – 08.00 Wib
- b) Siang : 12.00 Wib – 15.00 Wib

Sasaran 2 Pengembangan Pendidikan Formal dan Non Formal

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Jumlah sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal	2 jenis	2 jenis	100%	100%	99%
Rata-rata capaian kinerja				100%	100%	99%

Untuk sasaran strategis pengembangan pendidikan formal dan non formal ada 1 indikator kinerja dengan target 2 jenis, sedangkan realisasinya 2 jenis sehingga capaian kinerja 2017 adalah 100%, Capaian ini juga sama dengan tahun 2016, sedangkan 2015 capaian 99% .

Sasaran 3 Pengembangan Penggunaan Teknologi Dalam Kehidupan Masyarakat Dan Tata Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Persentase pemanfaatan TIK dalam tata pemerintahan	100 %	90 %	90%	150%	100%
2	Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina	5 KIM	5 KIM	100%	125%	100%
3	Jumlah informasi yang disampaikan melalui media massa (media elektronik)	2000 informasi	8314 informasi	416%	32%	170%
Rata-rata Capaian				202%	173%	123%

Dari tabel sasaran Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan pada tahun 2017 terdapat 3 (dua) indikator kinerja dengan capaian rata-rata 202%, dibandingkan dengan tahun 2016 capaian rata-rata 173%, sedangkan tahun 2015 capaian rata-

rata 123% Jika dilihat dari capaian mulai dari tahun 2015 ke 2016 adanya kenaikan capaian sebanyak 49.67%, sedangkan 2016 ke tahun 2017 naik 29%.

1. Persentase pemanfaatan TIK dalam tata pemerintahan

Sampai saat ini aktifitas pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman masih banyak menggunakan cara manual, seperti dalam pengumpulan dan pengiriman surat ataupun bahan pekerjaan lainnya. Dengan menggunakan cara manual, akan mempersulit dan memperlambat dalam pencarian data bila data tersebut sedang dibutuhkan.

Sekarang ini sudah sangat banyak perusahaan atau instansi yang memanfaatkan media internet. Dengan menggunakan web atau aplikasi banyak hal yang dapat dilakukan oleh setiap pegawai dari sebuah instansi, karena dengan adanya web aplikasi segala kepentingan pekerjaan dapat dilakukan secara cepat dan dimana saja. Penggunaan database pada aplikasi ini adalah sebagai tempat penyimpanan data agar data lebih terorganisasi dengan baik dan dapat lebih mudah untuk di cari ataupun diambil sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan untuk saat ini pengiriman laporan kegiatan dari setiap daerah masih dilakukan secara manual dan tidak tersimpan secara terstruktur sehingga kemungkinan kehilangan data akan lebih sering terjadi.

Namun, hal ini tidak dapat terlaksana dengan semestinya karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti: komputer dan jaringan internet yang memadai serta kurangnya staf yang memiliki potensi untuk melaksanakan aplikasi ini. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan di awal tahun 2017.

Saat ini kapasitas bandwidth internet yang dimiliki Kota Pariaman 90 Mbps, namun kapasitas ini masih kurang karena bertambahnya peralatan elektronik yang mempergunakan internet. juga berdampak terhadap kinerja instansi Pemerintah Kota Pariaman lainnya. Di Kota Pariaman sendiri telah menerapkan beberapa aplikasi secara online yang dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas. Jika kita hitung, pemakaian beberapa aplikasi oleh setiap dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman telah mendekati batas maksimal kapasitas bandwidth yang tersedia. Sehingga tak jarang terjadi down pada sistem ataupun server karena banyaknya orang yang sedang mengakses.

Aplikasi yang telah diterapkan di Pemerintah Kota Pariaman diantaranya LPSE, PPID, SIMDA, SIMBANGKOT, SICANTIK, UPIAK, LAPOR, dan P-CARE.

Untuk mengatasi hal tersebut beberapa upaya yang dilakukan, yaitu:

- Membatasi penggunaan internet pada tiap OPD dan memblokir beberapa situs yang tidak penting, seperti youtube.
- Penggunaan genset portable untuk handle daya listrik ketika terjadi pemadaman listrik

2. Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina

Pemerintah Kota Pariaman juga menyampaikan informasi terkait kebijakan dan arah pembangunan melalui kelompok - kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibentuk dan dibina. Pada Tahun 2017 telah dilakukan pembinaan terhadap 5 KIM. Adapun 5 KIM yang dibentuk dan dibina tersebut adalah:

- KIM Desa Sungai Pasak Pariaman Timur;
- KIM Desa Kampung Baru Pariaman Tengah;
- KIM Desa Nareh Hilia Pariaman Utara;
- KIM Desa Marabau Pariaman Selatan;
- KIM Banang Ameh Pariaman Utara.

3. Jumlah informasi yang disampaikan melalui media massa

Dari Indikator yang ditetapkan, jumlah informasi tentang Kota Pariaman yang akan disampaikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik untuk tahun 2017 ditargetkan sebanyak 2.000 informasi. Sedangkan realisasi sebanyak 8.314 informasi. Informasi yang disampaikan dapat berupa berita kegiatan Pemerintah Kota Pariaman, Pariwisata, Kebijakan serta Pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Informasi disebarluaskan baik melalui media cetak harian, mingguan ataupun media online berupa postingan berita tiap hari atau tiap bulannya. Tidak hanya berupa berita, informasi yang disampaikan juga dikemas dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat yang disebarluaskan melalui Radio Studio Produksi Pariaman.

Sasaran 4

Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya, Beriman Dan Bertaqwa

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Persentase keikutsertaan siswa terhadap kegiatan keagamaan	80 %	80 %	100%	113%	100%
2	Persentase tingkat pemahaman keagamaan dimasyarakat	100 %	90 %	90%	92%	100%
Rata-rata Capaian				95%	103%	100%

Dari tabel sasaran Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya, Beriman Dan Bertaqwa tahun 2017 terdapat 2 indikator dengan rata-rata capaian 95%, jika dibandingkan dengan tahun 2016 rata-rata capaian 103%, adanya penurunan sebesar 8% pada tahun 2017, dan 2015 yang rata-rata capaian 100% adanya kenaikan capaian sebesar 2% di tahun 2016.

1. Persentase keikutsertaan siswa terhadap kegiatan keagamaan telah mencapai target yang ditetapkan salah satunya didukung dengan kegiatan memperingati hari-hari besar Islam disekolah, kegiatan magrib mengaji, dan sumbuq mubaraqah, jika dibandingkan dengan tahun 2016 adanya penurunan realisasi sebesar 10%, *karena kewenangan untuk tingkat SLTA berada di Propinsi* .



Ket.Gambar Pelajar mengikuti acara keagamaan

2. Sedangkan persentase tingkat kualitas pendidikan keagamaan dimasyarakat yang didukung dengan kegiatan Lomba didikan subuh, wirid bulanan PNS, magrib mengaji, subuh mubaraqah dan adanya koordinasi antar lembaga pendidikan keagamaan serta terlaksananya pembinaan peningkatan kualitas tenaga pengajar pada lembaga pendidikan keagamaan.

Peningkatan kualitas Pendidikan keagamaan, diantaranya dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang mendaftar dan berangkat Haji yang setiap tahunnya selalu meningkat, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

TAHUN	PENDAFTARAN	BERANGKAT
2015	208 orang	54
2016	273 orang	110
2017	271 orang	116

Sumber data: Kemenag Kota Pariaman



Ket.Gambar Pelepasan Haji 2017



Ket.Gambar Pembukaan MTQ



Ket.Gambar Atraksi Gandang Tasa pada Pembukaan MTQ

Sasaran 5
Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan
Nilai-nilai Adat Istiadat dan Budaya

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Jumlah Lembaga Pemuka adat yang di fasilitasi	12 lembaga	12 lembaga	100%	100%	100%
2	Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	100 %	148.95 %	148.95%	117.6%	117.6%
Rata-rata Capaian				124%	109%	109%

Pada tabel sasaran Peningkatan pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Adat Istiadat Dan Budaya tahun 2017 terdapat 2 indikator dengan rata-rata capaian 124%, tahun 2016 dan 2015 capaian 109%..

1. Jumlah lembaga pemuka adat dan tokoh agama yang difasilitasi dengan target 12 dengan realisasi 12 lembaga dengan capaian 100%.

Dalam rangka menunjang terlaksananya program pemerintah propinsi dan Pemerintah Kota Pariaman terhadap tatanan adat hidup bermasyarakat dan bernagari, serta untuk meningkatkan penguatan kelembagaan LKAAM dan Bundo Kandung serta 10 Kerapatan Adat Nagari di Kota Pariaman dilakukan melalui bantuan biaya/kegiatan operasional kelembagaan adat.



Ket. Gambar Rapat LKAAM

Disamping itu untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya di Kota Pariaman, perlu meningkatkan lagi peranan ninik mamak, tokoh masyarakat, cerdik pandai, ditengah masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kota Pariaman, juga memfasilitasi acara Batagak Gala dengan kegiatan Pariaman Batagak Gala .

Pariaman Batagak Gala adalah kegiatan malewakan Panghulu Suku atau kaum se Kota Pariaman, yang di ikuti dengan pergelaran kesenian anak nagari yang dikemas dalam bentuk sebuah event wisata. Dalam malewakan Panghulu ini segala tata cara adat dan budaya wajib dilakukan. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) sangat besar karena setiap penghulu yang akan dilewakan harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari KAN melalui adat salingka nagari yang berlaku.



Ket. Gambar Pariaman Batagak Gala



Ket. Gambar Pariaman Batagak Gala

2. Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu dengan capaian **148,95% = 90,5% + 20,0% + 20,0% + 18,5%**

Pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menganalisa beberapa kegiatan yang berpengaruh secara langsung terhadap gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu, yaitu :

- 1) Jumlah kasus wasmat

Output jumlah kasus wasmat ini didapat dari kegiatan Pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan Tindak Pidana Ringan pelanggaran Perda. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran Perda secara Yustisi, yaitu penyelesaian yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Jadi penyelesaian kasus pelanggaran Perda dengan keputusan Hakim. Capaian kinerja dari

kegiatan ini adalah 0 kasus dari yang ditargetkan sebanyak 30 kasus. Hal ini dikarenakan kegiatan ini bersifat situasional sehingga tidak semua kasus pelanggaran yang diselesaikan dengan yustisi.

2) Jumlah Kasus Non Yustisi

Output jumlah kasus non yustisi ini didapat dari kegiatan penyelesaian pelanggaran perda secara non yustisi, kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran Perda secara Non Yustisi, yaitu berupa pembinaan dan mediasi terhadap personil pelanggar Perda yang diselesaikan dengan keputusan Kepala Satpol. PP saja. Kegiatan ini lebih diutamakan pelaksanaannya daripada yustisi. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 493 kasus dari yang ditargetkan sebanyak 218 kasus. Hal ini dikarenakan meningkatnya kasus pelanggaran Perda yang harus diselesaikan secara Non Yustisi.

$$\left\{ \left(\frac{(\text{Jumlah Kasus Wasmat} + \text{Jumlah Kasus Non Yustisi})}{(\text{Target Penyelesaian Kasus/BA})} \times 100\% \right) \times \frac{2}{5} \right\}$$

$$\left(\frac{0}{30} + \frac{493}{218} \right) \times 100\% \times \frac{2}{5} = 90,5\%$$

3) Jumlah Perda yang ditegakkan.

Output jumlah Perda yang ditegakkan ini didapat dari kegiatan Operasional Penegakan Perda, kegiatan ini dilaksanakan berupa operasional lapangan dalam bentuk razia, penertiban dan eksekusi terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda dan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Pariaman. Kegiatan razia dilakukan untuk penegakan Perda yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan maksiat seperti razia pelajar yang berkeliaran diwaktu jam sekolah, razia warnet, razia muda-mudi yang berbuat asusila di tempat umum, razia IMB dan kegiatan lain yang menyangkut Pekat dan maksiat. Kegiatan penertiban dilakukan untuk penegakan Perda K3 seperti penertiban PKL, IMB, Orgen Tunggal (didalam Perda Kota Pariaman Orgen Tunggal yang main di malam hari hanya diperbolehkan sampai pukul 00.00 WIB, pakaian biduanitanya harus sopan dan sesuai dengan norma yang berlaku di daerah Kota Pariaman), dan kegiatan lain yang

berhubungan dengan K3. Kegiatan pembinaan dilakukan terhadap pelanggar Perda yang terjaring dalam kegiatan operasional Satpol. PP. Kegiatan eksekusi dilakukan terhadap masalah yang telah diproses oleh PPNS. Yang termasuk Pencapaian dari kinerja kegiatan ini adalah 11 Perda dari yang ditargetkan sebanyak 11 Perda.

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Perda yang ditegakkan}}{\text{Target Perda yang ditegakkan}} \times 100\% \right) \times \frac{1}{5} \right\}$$

$$\left\{ \left(\frac{11}{11} \times 100\% \right) \times \frac{1}{5} \right\} = 20\%$$

4) Jumlah Perda yang dimonitoring sekber

Output Perda yang dimonitoring sekretariat bersama ini didapat dari kegiatan Pembentukan Sekretariat bersama PPNS, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membentuk sekretariat bersama PPNS di tingkat Kota Pariaman dengan tujuan agar terjalin kerjasama dan silaturahmi yang bagus antara sesama anggota PPNS se Kota Pariaman. Pencapaian dari kinerja ini adalah 135 Perda dari yang ditargetkan sebanyak 135 Perda

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Perda yang dimonitoring sekber}}{\text{Target Perda yang dimonitoring}} \times 100\% \right) \times \frac{1}{5} \right\}$$

$$\left\{ \left(\frac{135}{135} \times 100\% \right) \times \frac{1}{5} \right\} = 20\%$$

5) Jumlah masyarakat yang dibina

Output jumlah masyarakat yang dibina didapat dari hasil kegiatan pembinaan dan penyuluhan Perda, keamanan lingkungan dan ketertiban umum. Kegiatan ini berupa penyuluhan tentang Perda yang ada di Kota Pariaman terhadap masyarakat se Kota Pariaman agar masyarakat Kota Pariaman mengetahui Perda dan Perwako yang ada di daerah mereka sehingga bisa menekan laju kasus pelanggaran Perda di lingkungan Pemko Pariaman. Capaian dari kinerja ini adalah 786 orang dari yang ditargetkan 850 orang.

$$\left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Desa atau Kelurahan yang dibina}}{\text{Target Desa atau Kelurahan yang dibina}} \times 100\% \right) \times \frac{1}{5} \right\}$$

$$\left\{ \left(\frac{786}{850} \times 100\% \right) \times \frac{1}{5} \right\} = 18,5\%$$

Sasaran 6
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Pariaman

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun		
						2017	2016	2015
1	Angka usia harapan hidup (AHH) per tahun	71	tahun	70	tahun	98.59%	93.33%	93.33%
2	Jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup per tahun	23	/1.000K H	18	/1.000K H	78.26%	91%	57%
3	Jumlah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	102	/100.000 KH	1	/100.000 KH	0.98%	0	4.90%
4	Persentase Ibu hamil yang mendapat pelayananAntenatal minimal 4 kali (K4)	76	%	95.5	%	125.66%	94.20%	93.70%
5	Persentase balita bergizi buruk per tahun	2	%	0.04	%	2%	0.55%	1.5%
6	Rasio pos yandu per satuan balita per tahun	2	/100balita	1	/100balita	50%	50%	50%
7	Jumlah penduduk miskin yang terkoper pembiayaan kesehatan (jamkesmas, jamkesda dan JKSS per tahun)	9215	orang	9215	orang	100%	50%	100%
8	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	93	%	91	%	97.8%	103.85%	99.70%
Rata-rata Capaian						69%	49%	51%

Dari Tabel pada sasaran 6 di atas terdapat 8 indikator kinerja, rata-rata capaian Indikator Kinerja sasaran 69%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 hanya 49% adanya kenaikan capaian sebesar 20%, sedangkan dengan tahun 2015 rata-rata capaian 51% adanya penurunan ditahun 2016 sebesar 2%.

1. Indikator Angka Usia Harapan Hidup (UHH) pertahun

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) pertahun untuk target Kota Pariaman Tahun 2017 usia 71 Tahun namun realisasi yang dicapai untuk Angka Usia Harapan Hidup Kota Pariaman 70 tahun dengan realisasi capaian 98.59%

Permasalahan yang dihadapi adalah masih belum optimalnya penerapan pola hidup sehat di masyarakat.

2. Jumlah Kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup pertahun

Untuk Angka Kematian Bayi dan Balita Kota Pariaman tahun 2017 yaitu 11/1000 Kelahiran Hidup (KH) dengan 18 kasus kematian, sementara target renstra untuk Kota Pariaman tahun 2017 21/1000. tahun 2016 15,3/1.000 kh dan pada tahun 2015 presentase kematian bayi 12,9/1.000 kh, dengan melihat trend kematian 3 tahun terakhir ini menggambarkan adanya penurunan kasus kematian yang ada di Kota Pariaman. Kalau di lihat target yang sudah di tentukan oleh renstra kasus kematian bayi yang ada di kota pariaman sudah cukup baik, ini menggambarkan bagusnya kualitas pelayanan yang ada di Kota Pariaman.

3. Jumlah Kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup pertahun

Dilihat dari trend angka kematian ibu 3 tahun terakhir terjadi penurunan yang cukup baik, tahun 2017 kematian ibu 1 kasus, tahun 2016 tidak ada kematian sementara pada tahun 2015 ada 5 orang kasus kematian ibu, dilihat dari jumlah kelahiran hidup dan Jumlah penduduk yang ada di Kota Pariaman, Kota Pariaman seharusnya tak ada lagi kasus kematian ibu, ini melihat masih perlu di tingkatkan kinerja Bidan di desa dan Penggelola program dalam menjaring ibu maternal lebih efektif lagi.



Ket. Gambar Kampanye Ibu Hamil

4. Persentase Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Antenatal Minimal 4 kali (K4)

Tahun 2017 ibu hamil mendapat pelayanan Ante natal care (K4) di Kota Pariaman 95,5% sementara target Renstra 2017 76%, dibandingkan dengan 3 tahun terakhir presentase kunjungan ibu hamil (4) terus meningkat dari tahun ke tahun , ini menggambarkan bagusnya kualitas pelayanan kesehatan di Kota Pariaman.

5. Persentase Balita Gizi Buruk per tahun

Kasus gizi buruk Kota Pariaman tahun 2017 ada 4 kasus, sementara tahun 2016 ada 11 kasus, tahun 2015 ada 12 kasus dilihat 3 tahun terakhir kasus gizi buruk terjadi penurunan yang sangat signifikan, semua kasus gizi buruk mendapat perawatan 100%. ini menunjukkan keberhasilan program gizi pada masyarakat.

Kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan kasus gizi buruk antara lain:

- a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin bagi Balita kurus bagi seluruh balita kurus yang ada di kota pariaman sesuai dengan indikator BB/TB. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2017 s/d Oktober 2017 (9 bulan)
- b. Pembentukan kelompok Asi Eksklusif di masing – masing kecamatan se – Kota Pariaman.
- c. Praktek perilaku dan Pemulihan Gizi melalui demonstrasi di Posyandu, sebanyak 15 Posyandu yang ada di Kota Pariaman, dengan sasaran ibu – ibu balita dengan berbagai kelompok umur.
- d. Pemberian Tablet tambah darah pada Ibu hamil dan remaja Putri se – Kota Pariaman

Keadaan gizi merupakan salah satu penyebab dasar kematian bayi dan anak. Gizi buruk sering kali disertai penyakit seperti TB, ISPA, diare dan lain-lain. Risiko kematian anak gizi buruk 17 kali lipat dibandingkan dengan anak normal. Oleh karena itu setiap anak gizi buruk harus dirawat sesuai standar. Pemerintah telah mengembangkan prosedur perawatan gizi buruk, dengan dua pendekatan. Kasus gizi buruk yang disertai dengan salah satu atau lebih tanda komplikasi medis seperti anoreksia, anemia berat, dehidrasi, demam sangat tinggi dan penurunan kesadaran perlu penanganan secara rawat inap, baik di rumah sakit, puskesmas maupun Therapeutic Feeding Centre (TFC).

Sedangkan bagi anak gizi buruk tanpa komplikasi dapat dirawat jalan. Perawatan anak di rumah dilakukan melalui pembinaan petugas kesehatan dan kader.

6. Rasio Posyandu per satuan balita pertahun

Idealnya 1 (satu) posyandu melayani 50 orang balita sedangkan jumlah posyandu di Kota Pariaman dari tahun 2015 – 2017 adalah 137 posyandu. Sedangkan jumlah sasaran balita pada tahun 2017 adalah 8.086 orang. Kalau di rasiokan maka 1 posyandu melayani 59 orang balita.

Permasalahan

Angka ini sedikit melebihi target yang ditetapkan. Tapi sampai saat ini semua balita bisa dilayani di posyandu. Masing-masing Desa/Kelurahan di Kota Pariaman sudah punya posyandu minimal 1 (satu) buah bagi sasaran balitanya sedikit. Dan ada 6 buah posyandu bagi Desa/Kelurahan dengan sasaran balitanya banyak.

Solusi

Untuk mencapai target diatas, maka perlu dibentuk lagi posyandu baru bagi Desa/Kelurahan yang balitanya banyak. Dimana untuk penambahan posyandu itu perlu penambahan kader, honor kader dan sarana prasarana posyandu. Jadi jumlah posyandu yang dibutuhkan di Kota Pariaman adalah 162 posyandu untuk melayani 8.086 balita. Masih dibutuhkan lagi 25 posyandu balita.

7. Jumlah penduduk miskin yang tercover pembiayaan kesehatan (JKSS) per tahun Target 9215 Jiwa penduduk miskin yang tercover dengan program kemitraan asuransi masyarakat adapun Tujuan Umum Kegiatan adalah

a) Meningkatkan **kesadaran, kemauan dan kemampuan** hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jamkes Sumbar Sakato Kota Pariaman. Permasalahan yang dihadapi adalah

- Data penduduk peserta Jamkes Sumbar Sakato belum di Verifikasi dan Validasi oleh Dinas terkait (Dinsosnaker)

- Dalam pemanfaatan tenaga pelaksana JKSS hanya dilakukan oleh staf Yankes saja, akibatnya kegiatan dasar pada seksi yankes menjadi lebih berat bahkan sampai terabaikan.
- Pemantauan pada masyarakat pengguna prog. JKSS sangat minim
- Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan program JKSS
- Kurangnya sosialisasi prog. JKSS
- Tim koordinasi masih belum optimal
- Besar klaim RSUD Pariaman yang belum bisa dibayarkan (Desember 2015 dan klaim tahun 2017)

b) Solusi yang ditempuh

- Perkuat Koordinasi lintas program dan lintas sektor
- Dinsosnaker melakukan pendataan masyarakat PBI APBD
- Membentuk satker khusus JKSS
- Dalam pengelolaan verifikasi dilakukan dengan teknologi IT

Secara fisik untuk realisasi masyarakat miskin yang menggunakan pelayanan kesehatan 100%

8. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap (IDL)

Tahun 2017, ditetapkan target program imunisasi untuk anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap (IDL) adalah 93% dan dapat direalisasikan pada sebesar 90.9% dengan pencapaian tingkat kinerja lebih kurang 97.7%. Untuk tahun 2016 pencapaian program imunisasi untuk anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap (IDL) 99.7% dibandingkan tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 3.6% disini dapat diketahui masih kurangnya partisipasi masyarakat terutama orang tua untuk memberikan imunisasi pada bayi sehingga disini diperlukan kerja sama lintas program dan lintas sektor dalam peningkatan program imunisasi ini. Namun dilihat dari pencapaian tahun 2014 pencapaian program imunisasi untuk anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap (IDL) hanya

82%. Jadi pencapaian pada tahun 2017 cukup baik dibandingkan pada tahun 2014.

Sasaran 7 **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Pariaman**

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun		
						2017	2016	2015
1	Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru positif (Succes Rate) minimal 85%	84	%	93.30	%	111%	57.50%	57.50%
2	Persentase puskesmas dengan IR DBD <49 per 1.000 penduduk	64	%	29	%	45.31%	-	-
Rata-rata Capaian						78%	29%	29%

Berdasarkan tabel sasaran 7 tahun 2017 ada 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 78%. Sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 karena indikator sasaran ini berbeda.

1. Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru positif (Succes Rate) minimal 85%

Tahun 2017 target perkiraan insiden penemuan kasus baru TB Paru adalah 565/100.000 penduduk. Sehingga didapatkan target perkiraan kasus TB Paru untuk Kota Pariaman tahun 2017 sebanyak 490, pencapaian penemuan kasus TB tahun 2017 sebanyak 224 kasus (259/100.000 Penduduk), angka kesembuhan sebesar 85,3 % (65 Kasus), dan angka keberhasilan pengobatan sebesar 93,3 % (154 Kasus) dengan capaian kinerja 111%, BTA positif sebanyak 112 kasus

Permasalahan yang dihadapi :

- Masih tingginya penjkasus TB terutama TB anak di Kota Pariaman
- Upaya penjaringan kasus TB anak ke lapangan masih belum maksimal
- Masih perlunya peningkatkan upaya petugas puskesmas dalam penemuan kasus Baru TB Paru di lapangan
- Adanya tugas rangkap yang harus diselesaikan oleh pengelola program TB Puskesmas.

- Masih perlunya upaya peningkatan Kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam penanganan kasus TB di Kota Pariaman.

Alternatif Pemecahan masalah :

- Sosialisasi pada tokoh-tokoh masyarakat, kader dan masyarakat tentang TB di Kota Pariaman.
- Meningkatkan upaya penjangkaran kasus TB Anak di lapangan
- Reviuw program TB bagi petugas kesehatan
- Monitoring dan evaluasi pencapaian program TB bagi pengelola program TB Puskesmas
- Peningkatan wawasan masyarakat tentang TB melalui media informasi seperti leaflet, brosur dan radio, dll.

Meningkatkan kerjasama lintas sector dan lintas program terkait dalam upaya penanganan kasus TB dewasa dan TB anak.

2. Persentase Puskesmas dengan IR DBD < 49 per 1.000 penduduk

Tahun 2017, ditetapkan target angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk sebesar 49 kasus. Persentase Puskesmas dengan IR DBD < 49 per 1.000 penduduk sebesar 29 % dimana target tahun 2017 sebesar 64%. Dilihat dari capaian kinerja masih 45.31% yang kasus DBD kurang dari 49 kasus, yaitu 2 Puskesmas, untuk 5 Puskesmas yang lain kasus DBD cukup meningkat dimana pada tahun 2017 ini kasus DBD mengalami penurunan dari tahun 2016 dengan angka Incident rate sebesar 94,7/100.000 penduduk (82 kasus).

Namun angka tersebut masih jauh melebihi dari target renstra yang ada yaitu <49/100.000 penduduk (43 kasus) oleh karena kota Pariaman merupakan daerah endemis. Dari 82 kasus dilakukan pengasapan/fogging dan PSN. Untuk melakukan penyemprotan (pengasapan/fogging) didasari oleh hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) di lapangan dimana salah satu syarat untuk

Permasalahan yang dihadapi :

- Masih sangat tingginya insiden rate (IR) kasus DBD di Kota Pariaman
- Masih belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya kasus DBD

- Sangat perlu ditingkatkan koordinasi dengan lintas sector dan lintas program terkait tentang upaya pencegahan dan penanggulangan kasus DBD di Kota Pariaman

Alternatif Pemecahan masalah :

- Sosialisasi dan penyuluhan pada tokoh-tokoh masyarakat, kader dan masyarakat tentang DBD di Kota Pariaman.
- Monitoring dan evaluasi kejadian kasus DBD di wilayah kerja Puskesmas
- Peningkatan wawasan masyarakat tentang DBD melalui media informasi seperti leaflet, brosur dan radio, dll.
- Meningkatkan kerjasama lintas sector dan lintas program terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan DBD dengan menggerakkan masyarakat untuk aktif melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di desa/kelurahan.

Sasaran 8

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun		
						2017	2016	2015
1	persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan	100	%	100	%	100%	100%	78%
2	Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	66	%	64.60	%	97.88%	94%	79%
Rata-rata Capaian						98.9%	97%	79%

Dari tabel sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di atas terdapat 2 indikator dengan rata-rata capaian tahun 2017 sebesar 98.9%, Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dengan rata-rata capaian 97% adanya kenaikan sebesar 2% dan tahun 2015 yang rata-rata capaian sebesar 79% adanya peningkatan sebesar 18%.

1. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu.

Realisasi persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu adalah 100 %.

Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu yang ditargetkan sebanyak 40 kasus dan terealisasi sebanyak 40 kasus. Tujuan utama dari indikator ini adalah meningkatnya kualitas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan adanya pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat.

Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu yang ditargetkan 100% dan terealisasi 100%. Hal ini tercapai karena dari 40 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada terlayani seluruhnya. perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 100%.

Adapun kasus yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu ada sebanyak 40 kasus tersebut terdiri dari:

1. Kasus terhadap Perempuan

- a) Kekerasan Fisik : 8 Kasus
- b) Kekerasan Seksual : 1 Kasus
- c) Kekerasan Psikis/ Mental : 2 Kasus
- d) Penelantaran : -

2. Kasus terhadap Anak

- a) Anak Berhadapan Dengan Hukum : 8 Kasus
- b) Kekerasan Fisik : -
- c) Kekerasan Seksual : 20 Kasus
- d) Kekerasan Psikis/ Mental : -
- e) Penelantaran : 1 Kasus

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dengan ketentuan:

- Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
- Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Perbuatan yang mungkin dilakukan misalnya mencuri, menganiaya, membunuh, menipu, menggunakan narkoba, dan lain sebagainya. Jika seorang anak berhadapan dengan hukum, yang harus dilindungi adalah hak-haknya sebagai manusia (UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002), dengan demikian bukan perbuatannya yang dilindungi, tetapi lebih pada pembelaan hak asasi manusianya.

- Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum antara lain:

Setiap anak yang melakukan tindak pidana sejak ditangkap/ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum (penyediaan petugas pendampingan khusus anak

sejak dini) selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum, dan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

- Hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak dan manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- Hak untuk dapat mengikuti pendidikan sekolah selama berstatus sebagai klien masyarakat (sedang menjalani pidana bersyarat).
- Hak untuk dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan social anak selama masa penahanan dan menjalani hukuman.
- Berhak mendapat pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya selama berada dalam lembaga pemasyarakatan.
- Hak untuk berkorespondensi dan menerima kunjungan atau dengan kata lain hak pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga (jika anak dalam tahanan).
- Hak Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- Hak Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- Hak Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- Hak Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Rumus perhitungannya:

1 Cakupan Korban Kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	=	-----	x
		Jmlh pengaduan/laporan yg ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	

		Jmlh pengaduan/ laporan yg masuk ke unit pelayanan terpadu 40	

		40	x 100% = 100 %

Realisasi persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu adalah 100 %.

2. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif.

Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif (PA) adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Pada tahun 2017, target indikator Persentase PUS menjadi Peserta KB Aktif sebesar 66 %. Pada tahun 2017 ini realisasinya sebesar 64.40 %.

Rumus perhitungannya:

Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif	$= \frac{\text{PUS yang menjadi Peserta KB Aktif}}{\text{PUS}} \times 100\%$ $= \frac{7.374}{11.449} \times 100\% = 64.40 \%$
---	---

Maka, Persentase capaian kinerja pada target ini adalah:

$$\frac{64.40 \%}{70 \%} \times 100 = 94.09 \%$$

MISI 2 : Penguatan Struktur Perekonomian Melalui Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Potensi Daerah

Sasaran 1

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28.3 %	28.1 %	99%	72%	100%
2	Persentase penambahan produksi hasil padi	2.98 %	34.74 %	1165.77%	-0.60%	-
3	Persentase penambahan produksi hasil ternak	3 %	2.42 %	81%	204%	106%
4	Persentase penambahan populasi ternak	6 %	2.04 %	34%	235%	-320%
5	Jumlah rata-rata pendapatan petani binaan	1,333,000 Rp	1,300,000 Rp	97.5%	100%	100%
6	Jumlah gerakan pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) Pertanian/ Perkebunan	10 kali	7 kali	70%	150%	100%
7	Penurunan Jumlah Kasus Rabies	25 kasus	180 kasus	720%	260%	1067%
8	Jumlah kelompok tani yang menggunakan TTG dan Alsintan	80 kelompok	186 kelompok	232.5%	138.6%	138.50%
9	Jumlah kerjasama pemasaran hasil produksi ternak	70 MoU	- MoU	0%	0%	0%
Rata-rata Capaian				278%	129%	144%

Dari tabel sasaran Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, tahun 2017 terdapat 9 indikator kinerja dengan rata-rata capaian 278%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang capaiannya 129% adanya kenaikan capaian sebesar 149%, sedangkan tahun 2015 ke 2016 terjadi penurunan capaian sebesar 15%

Dari 9 indikator kinerja tersebut yang tidak mencapai target adalah jumlah kerjasama pemasaran hasil produksi ternak dengan capaian 0%, karena tidak ada kegiatan yang mendukung terlaksananya MoU tersebut.

1. Indikator Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan target 28.3% terealisasi 28.1% dengan capaian kinerja 99%. Capaian ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan PDRB pada tahun 2016 yang hanya sebesar 20.3 % dengan capaian 72%.
2. Indikator persentase penambahan produksi hasil padi target 2.98% realisasi 34.74% dengan capaian 1165.77% produksi tahun 2017 sebanyak 41.834 ton, sedangkan. Produksi padi tahun 2016 sebesar 31.047 ton naik sebanyak 1.552 ton atau 4.76%. Tahun 2015 produksi padi 32.093 ton adanya penurunan produksi padi 1.046 ton atau turun 3 % ke tahun 2016.

Dalam perhitungan data produksi tanaman padi ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu luas panen dan produktivitas.

Luas panen pada tahun 2017 meningkat sangat tinggi, yakni sebesar 21.33% dimana pada tahun 2016 luas panen hanya 5851 ha menjadi 7.099 Ha pada tahun 2017, dan produktivitas mengalami peningkatan dari 5,56 ton/ Ha tahun 2016 menjadi 5,89 ton/ Ha di tahun 2017. Data produktivitas ini diambil berdasarkan sampel ubinan yang dikeluarkan oleh BPS Kota Pariaman, dan umumnya sampel ubinan jatuh pada lokasi-lokasi marginal yang memiliki produktivitas yang rendah. Pada lokasi-lokasi tersebut, petani juga masih enggan melakukan pergiliran varietas. Adanya serangan hama di beberapa lokasi namun tidak menyeluruh.

Upaya yang telah dilakukan agar produksi dapat mencapai target peningkatan dengan cara :

- 1) melakukan kerjasama pengambilan ubinan swakarsa (memperbanyak sampel ubinan sehingga dapat mewakili pertanaman padi sawah);
- 2) Fasilitasi bantuan subsidi benih unggul kepada kelompok tani yang tersebar di Kota Pariaman, dan
- 3) Bantuan benih seluas 1000 Ha melalui dana APBN. Dan mampu menggenjot data produksi kota pariaman tahun 2017.

3. Indikator persentase penambahan produksi hasil ternak
Penambahan produksi daging ternak tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,63 - 7,6% dengan rata2 mengalami peningkatan 2.42%. Jika dibanding tahun 2016 peningkatan produksi daging hasil ternak mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari target. Tingginya kenaikan produksi hasil ternak tahun 2016 disebabkan pengaruh pertambahan hasil produksi ayam buras. Sedangkan pada ternak lain, produksi hasil ternak sangat rendah jika dibandingkan produksi hasil ternak tahun 2017 seperti sapi, kerbau, kambing dan ayam ras. Sedangkan pada tahun 2015, persentase penambahan produksi hasil ternak sangat rendah.
4. Pada indikator persentase penambahan populasi hasil ternak.
Populasi hasil ternak, secara total terjadi peningkatan populasi berkisar antara 1.5%-2.4% Berdasarkan data tahun 2017, produksi sapi sebanyak 2.673 ekor, kerbau 655 ekor, kambing 1.118 ekor, ayam buras 54902 ekor dan ayam ras 1.690.500 ekor. Total produksi ternak sebesar 1.749.848 ekor dengan rata-rata peningkatan 2.42%.
Berdasarkan data tahun 2015, produksi sapi sebanyak 2.804 ekor, kerbau 589 ekor, kambing 1.888 ekor, ayam buras 58.310 ekor dan ayam ras 1.152.800 ekor. Total produksi ternak sebesar 1.216.391 ekor. Mengalami peningkatan sebesar 4,7 % melebihi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2016 yaitu 2 % dengan capaian sebesar 235 %. Total produksi ternak tahun 2016 adalah 1.738.504 ekor dengan rincian sebagai berikut: sapi 2.633 ekor, kerbau 549 ekor, kambing 1.890 ekor, ayam buras 52.932 ekor dan ayam ras 1. 656.500 ekor.
5. Jumlah rata-rata pendapatan petani binaan yang ditargetkan sebesar Rp. 1.333.000,- hanya terealisasi sebesar Rp. 1.300.000,- dengan capaian 97.5%.
6. indikator jumlah gerakan pengendalian OPT pertanian/perkebunan tidak memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 10 kali. Sedangkan realisasi hanya 7 kali dengan capaian 70% dengan rincian 5 kali buru tupai di Empat Kecamatan, 2 kali buru tikus yang dilaksanakan di kecamatan Pariaman Selatan dan Pariaman

Timur, jika dibandingkan dengan tahun 2016 adanya penurunan capaian yang sangat signifikan dari 150% menjadi 70%.

7. Indikator penurunan jumlah kasus gigitan HPR (Hewan Penular Rabies) dengan target 25 kasus, namun kasus selama 2017 sebanyak 180 kasus gigitan dengan realisasi capaian 720%. Berdasarkan laporan dari UPT Puskesmas, dari 180 kasus gigitan, 2 positif rabies, 62 hilang yang dianggap positif. Tindakan yang telah dilakukan adalah pemberian VAR (Vaksin Anti rabies) terhadap masyarakat yang terkena gigitan kemudian melakukan vaksinasi terhadap 2003 ekor HPR dengan rincian 204 ekor anjing, 1767 ekor kucing, 29 ekor monyet dan 3 ekor musang. Ini artinya tingginya kesadaran masyarakat yang terkena gigitan HPR (Hewan Pembawa Rabies) untuk melaporkannya ke UPT Puskesmas sebagai yang bertindak dan bertanggung jawab dalam melayani kesehatan hewan maupun kesehatan masyarakat veteriner di Kota Pariaman. Artinya sosialisasi tentang bahaya rabies berhasil disampaikan kepada masyarakat Kota Pariaman. Jika dibandingkan jumlah kasus gigitan HPR di tahun 2016 terjadi 130 kasus gigitan HPR dengan capaian kinerja 260 %. Adanya kenaikan ini karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi kasus gigitan sehingga jumlah laporan kasus cenderung tinggi.
8. Pada indikator penggunaan TTG dan Alsintan tahun 2017 dengan target 80 kelompok, realisasi sebanyak 186 kelompok dengan capaian 232.5%, yang terdiri dari 4 kelompok tani telah menggunakan TTG (teknologi tepat guna) yakni penggunaan perangkat walang sangit yang diproduksi oleh salah seorang petani yang berprestasi tingkat nasional yang bekerja sama dengan bidang TPH dan Perkebunan. Sedangkan untuk penggunaan alsintan (alat mesin pertanian) 182 kelompok tani telah menggunakan alsintan baik dalam pengolahan lahan, panen

maupun pasca panen. Alsintan ini diperoleh melalui kepemilikan sendiri dan bantuan alsintan dari kementerian pertanian RI.

9. Untuk indikator jumlah kerjasama pemasaran hasil produksi ternak dari target yang ditetapkan 69 MoU, tidak ada kegiatan yang mendukung pelaksanaan dari MoU tersebut sehingga capaian menjadi 0 %.

Sasaran 2 **Meningkatnya Ketahanan dan keamanan Pangan Daerah**

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun		
						2017	2016	2015
1	Persentase ketersediaan sumber energi dan protein perkapita	85	%	154.82	%	182%	185%	136.55%
2	Persentase penguatan cadangan pangan	80	%	63	%	79%	66.67%	53.30%
3	Persentase pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	92	%	87.9	%	95.5%	97.67%	95.00%
Rata-rata Capaian						178%	126%	142%

Dari tabel sasaran Meningkatkan Ketahanan dan keamanan Pangan Daerah di atas semula 7 Indikator dijadikan 3 indikator Kinerja Sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 178%, jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 adanya kenaikan capaian dari tahun 2016 ke tahun 2017 naik 52%, sedangkan tahun 2015 ke tahun 2016 naik sebesar 31%.

1. Pada indikator persentase ketersediaan sumber energi dan protein perkapita dengan target 85 % realisasi 154.82% dengan capaian 182%. Hal ini karena produksi Kota Pariaman jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota pariaman mengalami surplus sehingga ketersediaan melebihi 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang capaian 185 % adanya sedikit penurunan capaian dari indikator ini.
2. Indikator persentase penguatan cadangan pangan target 80% dengan realisasi 63%, rendahnya capaian dikarenakan masih kurangnya lumbung pangan dalam mendukung penguatan cadangan pangan di kota pariaman. Untuk target 80% tersebut, lumbung pangan seharusnya

ada sebanyak 16 lumbung namun keadaanya lumbung pangan yang ada saat ini baru 9 lumbung pangan.

3. Persentase pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) target 92% realisasi 87.9% dengan capaian 95.5%

dimanaskor PPH ini menggambarkan kan tingkat kualitas konsumsi pangan masyarakat, kesadaran akan konsumsi pangan sesuai dengan anjuran konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dikonsumsi (B2SA) antara karbohidrat, protein dan buah sudah semakin membaik.

Sasaran 3 **Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Jumlah jenis produk olahan hasil pertanian	10 Jenis	9 Jenis	90%	100%	128.6%
Rata-rata Capaian				90%	100%	128.6%

Dari tabel sasaran 3 Meningkatkan kelompok usaha pengolahan hasil pertanian tahun 2017 target 10 jenis sedangkan realisasi 9 jenis dengan capaian 90%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 adanya penurunan capaian sebesar 10% dari capaian 100%. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan-pembinaan kepada kelompok usaha pengolahan hasil pertanian.

Sasaran 4 **Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Jumlah produksi perikanan budidaya	264 ton	274.99 ton	104.16%	111%	96.39%
2	Jumlah produksi perikanan tangkap	6500 ton	6251 ton	96.17%	94%	75.14%
Rata-rata Capaian				100%	103%	21%

Dari tabel diatas sasaran Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap ada 2 Indikator Kinerja Sasaran dengan rata-rata capaian 100%. Capaian 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015, karena 6 indikator dijadikan indikator OPD.

1. Produksi Perikanan Budidaya

Dari target 264 ton produksi perikanan budidaya yang ditetapkan ditahun 2017 ini produksi perikanan budidaya mencapai 274,99 ton, dengan capaian kinerja 104,16%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dari target 230 ton terealisasi 254,9 ton adanya kenaikan produksi sebesar 20.09 ton. Kesuksesan ini terjadi karena :

- a. Dukungan berbagai stackholder
- b. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan sukses.
- c. Adanya paket bantuan kepada masyarakat baik yang dianggarkan melalui
 - APBD Kota Pariaman pada berupa bantuan benih ikan gurami, ikan nila dan ikan lele beserta pakan ikannya.
 - APBD Propinsi Sumatera Barat berupa bantuan bibit ikan Mas, Ikan Gurami dan Kerapu, beserta pakan ikannya yang dibagikan kepada 7 (tujuh) Pokdakan yang ada di Kota Pariaman.
 - APBN berupa bantuan mesin pembuat pakan ikan beserta bahan bakunya dari KKP RI melalui kegiatan Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri).
 - adanya kegiatan percontohan yang membuat masyarakat ingin melakukannya yaitu budidaya ikan sistem Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan laut. Awalnya kegiatan percontohan ini merupakan kegiatan dari KKP RI pada tahun 2016 berupa 1 (satu) paket bantuan yang terdiri dari 1 (satu) unit KJA, bibit ikan kerapu beserta pakan dan perahu. Selanjutnya kegiatan ini dilanjutkan oleh Pokdakan Angso duo Fish yang mendapatkan paket bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat yang dianggarkan melalui APBD Propinsi Sumatera Barat tahun 2017.

2. Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap target 2017 sebanyak 6.500 Kg dengan realisasi 6.251 Kg, turun sebesar 249 Kg, sehingga capaian kinerja tahun 2017 adalah 96,17%. Tidak tercapainya target ini, terjadi karena beberapa hal diantaranya :

- Banyaknya kapal nelayan yang beralih fungsi menjadi kapal wisata.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung seperti terjadinya badai di perairan Kota Pairaman, sehingga beberapa kali ada himbauan dari pemerintah agar para nelayan tidak pergi melaut hal ini berdampak pada hasil tangkapan para nelayan.

Namun jika dibandingkan dengan tahun 2016 produksi perikanan tangkap mencapai 6.118 ton, naik sebesar 133 ton.

Sasaran 5 **Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Nelayan dan Petani Ikan**

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun		
						2017	2016	2015
1	Jumlah POKMASWAS yang dibina	14	kelompok	18	kelompok	129%	100%	100%
2	Jumlah pengolah ikan	20	upi	20	upi	100%	100%	100%
3	Tingkat konsumsi ikan	35	kg/kapita/th	35.5	kg/kapita/th	101%	97%	50%
Rata-rata capaian						110%	99%	83%

Dari sasaran Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Nelayan dan Petani Ikan ada 3 indikator kinerja, dengan rata-rata capaian 110%, jika dibandingkan capaian tahun 2017 dengan capaian tahun 2016 dan 2015 terjadi kenaikan rata-rata capaian dimana tahun 2016 sebesar 99% tahun 2017 naik 11%, sedangkan Tahun 2015 capaian 83% tahun 2016 naik 16%.

1. Indikator Kelompok Masyarakat Pengawas (POKSMASWAS) yang dibina dengan target 14 kelompok telah terealisasi sebanyak 18 POKMASWAS dengan capaian 128.57%. jika dibandingkan dengan tahun 2016 hanya ada 14 POKMASWAS di tahun 2017 adanya penambahan 4 kelompok sehingga menjadi 18 POKMASWAS. Hal ini terjadi karena keinginan dari masyarakat untuk membantu melakukan pengawasan perikanan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumber daya perikanan dan mematuhi peraturan dibidang perikanan.

Pengawasan dilakukan sebagai upaya dan langkah guna mencegah tindakan illegal dan perusakan, sehingga sumber daya kelautan dapat lestari. Kelestarian sumber daya kelautan berarti juga lestarnya potensi sumber daya perikanan sehingga sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk masa sekarang dan akan datang. Pengawasan dilakukan sebagai upaya dan langkah untuk mencegah tindakan illegal dan perusakan, sehingga sumber daya kelautan dapat lestari.

Nama-Nama POKMASWAS :

- 1) Cimparuh Indah di Desa Cimparuh;
- 2) Rasyid Baroneng di Kelurahan Karan Aur;
- 3) Muaro Saiyo Jaya di Desa Pauh Barat;
- 4) Arwana di Kelurahan Ujung Batung;
- 5) Bungo Salapan di Kelurahan Kampung Perak;
- 6) Adam Sorin di Kelurahan Jalan Baru;
- 7) Rancak Basamo Lestari di Desa Padang Birik-Birik;
- 8) Ampalu Sepakat di Desa Ampalu;
- 9) Ulu Sikijang di Desa Balai Nareh ;
- 10) Ika Perca di Desa Cubadak Aie;
- 11) Nan Tongga di Desa Padusunan;
- 12) Singgalang Jaya di Desa Cubadak Air;
- 13) Harapan Jaya di Desa Sungai Sirah;
- 14) Santok Jaya Abadi di Desa Air Santok;
- 15) Seipa Lestari di Desa Sungai Pasak;
- 16) Bt. Aie Sungai Kapau di Desa Sikapak Timur;
- 17) Tabing Indah di Desa Marunggi .

Obyek Pengawasan menurut Pasal 66 (3) UU No. 45 th 2009 adalah :

- a. Kegiatan penangkapan ikan;
- b. Pembudidayaan ikan, pembenihan;
- c. Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
- d. Mutu hasil perikanan;
- e. Distribusi keluar masuk obat ikan;
- f. Konservasi;
- g. Pencemaran akibat perbuatan manusia;

- h. Plasma nutfah;
- i. Penelitian dan pengembangan perikanan; dan
- j. Ikan hasil rekayasa genetika..

2. Jumlah Unit Pengolahan Ikan

Indikator Jumlah unit pengolahan ikan dengan target 20 UPI, realisasi 20 UPI dengan capaian 100%. Dibandingkan tahun 2016 terdapat 32 Unit pengolahan ikan telah terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja untuk Unit Produksi Ikan (UPI) tahun ini mencapai 100%. Hal ini terjadi karena adanya pembinaan dari ASN dan Penyuluh dari Dinas Perikanan Kota Pariaman dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat. Dan pelaku usaha tersebut juga diikutsertakan dalam pameran untuk memamerkan produk mereka seperti Pariaman Ekspo dan event serupa lainnya. Produk pengolahan ikan yang dihasilkan diantaranya naget, bakso kerupuk, stik, sala ikan, ikan kering, dan lain-lain.

3. Indikator Tingkat Kosumsi Ikan

Target dari tingkat konsumsi ikan 35 kg/kapita/tahun realisasi 35.5 kg/kapita/tahun dengan capaian 101,43%. Dibandingkan dengan tahun 2016 Tingkat Konsumsi Ikan yang ditargetkan sebesar 36 kg/kapita/tahun terealisasi sebesar 34kg/kapita/tahun dengan capaian sebesar 99,3%.

Meningkatnya Tingkat Kosumsi Ikan terjadi karena suksesnya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan yang berhubungan dengan konsumsi ikan, diantaranya :

- Kegiatan sosialisasi ke PAUD berupa memberikan makanan tambahan berbahan dasar ikan seperti naugget ikan, bakso dan pempek yang berbahan dasar ikan.
- Mengikutsertakan Rumah Makan dalam lomba rumah makan yang menyajikan menu berbagai macam ikan dan olahannya. Pada perlombaan ini RM Pondok Lasuang diikuti sertakan dalam perlombaan tingkat Propinsi Sumatera Barat. Dan berhasil meraih Juara Harapan III.

Sasaran 6
Meningkatnya Pengawasan Dan Perlindungan
terhadap Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Jumlah bibit restocking	50.000 ekor	56.000 ekor	112%	100%	100%
2	Luas terumbu karang yang dipelihara	10.95 ha	10.95 ha	100%	100%	0%
Rata-rata capaian				106%	67%	33%

sasaran Meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan terdapat 3 indikator dengan rata-rata capaian 71% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang capainnya 100% penurunan sebesar 29%. Hal ini disebabkan kegiatan penanaman mangrove tidak dilaksanakan karena kegiatan ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Propinsi, sedangkan Pemerintah Kota Pariaman hanya pendamping dari kegiatan Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat

1. Jumlah bibit restocking yang disebar target 2017 sebanyak 50.000 ekor, telah terealisasi sebanyak 56.000 ekor dengan capaian 112% . Restocking ikan adalah salah satu upaya penambahan stock ikan tangkapan untuk ditebarkan di perairan umum, pada perairan yang dianggap telah mengalami penurunan stock akibat tingkat pemanfaatan yang berlebihan. Tujuan restocking selain menambah stock ikan agar dapat dipanen sebagai ikan konsumsi, juga bertujuan mengembalikan fungsi dan peran perairan umum sebagai ekosistem akuatik yang seimbang. Keberadaan ikan pada suatu perairan akan memberikan manfaat baik bagi ekosistem pada perairan tersebut maupun bagi manusia sebagai bahan pangan.

56.000 ekor bibit restocking tersebut disebar di lubuk larangan yang tersebar di 4 kecamatan yaitu lubuk larangan Karan aur, Ujung Batung, Cimparuh, Cubadak Air, Sikapak Timur, Cubadak air, Sikapak Timur dan Kampung Perak. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 penyebaran bibit ke lubuk larangan sebanyak 60.000 ekor.

2. Terumbu karang yang tepelihara

Dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 10,95 Ha dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja 100%. Hal ini mengingat terumbu karang, secara langsung maupun tidak langsung, menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Manfaat terumbu karang antara lain sebagai :

- 1) sumber makanan bagi ikan yang hidup di sekitar terumbu karang dan juga burung - burung laut;
- 2) pelindung bagi hewan-hewan yang tinggal didalamnya seperti sponge, ikan- ikan kecil, ubur-ubur, bintang laut, udang, kuda laut, dan lain-lain. Selain itu, terumbu karang juga dapat melindungi manfaat pantai dari abrasi dan erosi akibat gelombang laut.
- 3) habitat asli biota laut, Terumbu karang merupakan habitat dan tempat tinggal yang baik bagi 25% dari biota yang ada di laut. Karena didalamnya terdapat sumber makanan dan memberikan perlindungan bagi biota yang hidup didalamnya.
- 4) Penghalang gelombang besar yang datang ke daerah pantai.
- 5) objek wisata;
- 6) sumber obat-obatan; dan
- 7) bahan baku industri dan perhiasan ataupun asesoris yang bernilai tinggi.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Pariaman melakukan monitoring, pengawasan dan perawatan terhadap terumbu karang yang ada di Perairan Kota Pariaman, dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti diantaranya bantuan CSR dari Pertamina yang membuat taman terumbu karang yang bekerjasama dengan TDC (Tabuik Diving Club) Kota Pariaman.

Sasaran 7 Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif, Mandiri, UMKM dan Usaha Ekonomi Kreatif Dan Profesional

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Jumlah koperasi	86 koperasi	72 Koperasi	83.72%	96%	92%
2	Jumlah wirausaha/UMKM	7100 unit	7065 unit	99.51%	170.92%	98%
Rata-rata Capaian				91.6%	133%	95%

Dari tabel di atas rata-rata capaian kinerja untuk sasaran strategis Meningkatkan jumlah koperasi aktif, mandiri, UMKM dan usaha Ekonomi Kreatif dan professional terdapat 2 indikator dengan rata-rata capaian 91.6%. Capaian dari sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena tahun 2016 ada 3 indikator .

1. Indikator Jumlah Koperasi

Target yang ditetapkan untuk jumlah Koperasi tahun 2017 sebanyak 86 Koperasi dan terealisasi sebanyak 72 koperasi dengan capaian kinerja 83,72 %. Tidak tercapainya target jumlah koperasi ini disebabkan oleh Penataan dan Pembubaran Koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI sebanyak 12 Koperasi. Sesuai dengan PP No. 114/KEP/M.KUKM.2/ X11/2016 bahwa Kementerian Koperasi dan UKM RI berwenang membubarkan koperasi yang tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM RI Nomor : 244/Dep.I/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal SK Pembubaran Koperasi tidak aktif dalam rangka pendataan dan penataan Koperasi serta Surat Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Barat nomor : 516/79/PKBL/II-2017 tanggal 2 Februari perihal pembubaran koperasi dan Rapat Pembubaran Koperasi pada tanggal 6 Maret 2017 dihadiri oleh Pengurus Koperasi serta Kades/Lurah tempat koperasi tersebut berdomisili. Dalam rapat telah disepakati bahwa pengurus koperasi akan menyampaikan sanggahan atas keberatan pembubaran koperasi dan sekaligus melaksanakan RAT. Dari 23 koperasi yang diusulkan untuk dibubarkan tersebut, 8 koperasi tidak bisa dibubarkan karena memiliki fasilitas pemerintah dan 6 koperasi menolak untuk dibubarkan. Jadi jumlah koperasi yang diusulkan sebanyak 9, dan seiring dengan pembubaran koperasi tersebut ada penambahan koperasi yang diusulkan sebanyak 4 koperasi lagi dengan total sebanyak 13 Koperasi. Dari 13 Koperasi yang diajukan tersebut, 1 koperasi masih ditangguhkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Jadi Total koperasi yang dibubarkan sebanyak 12 Koperasi sesuai dengan PP No 65 Tahun 2017 tentang Pembubaran Koperasi.

Disamping pembubaran Koperasi tersebut ada koperasi yang sedang dalam proses pembuatan akta koperasi dan penerbitan Badan Hukum Koperasi yaitu :

- a. KPRI SMPN 7 Pariaman
- b. Koperasi UP2K Desa Air Santok
- c. Koperasi Kemenag Kota Pariaman
- d. Koperasi Simpan Pinjam LKM-A- Tigo Sapilin

Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2017 sebanyak 61 koperasi. Pada Tahun 2017 ini ada 3 koperasi yang diaktifkan yaitu :

1. Koperasi Tuah Sakato
2. Koperasi Jambak Sakato
3. Koppotren Tapuz

Berbagai kegiatan sudah dilaksanakan seperti pembinaan yang dilakukan melalui pendekatan dan rapat-rapat yang dilaksanakan di tingkat SOPD. Pada umumnya terjadi permasalahan di tingkat pengurus dan anggota serta kurangnya kepedulian masyarakat terkait untuk mengaktifkan koperasi masyarakat yang cenderung menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam kehidupan berkoperasi, kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat memberikan gambaran bahwa suatu koperasi telah berjalan dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, pelaksanaan RAT juga memberikan gambaran bahwa pengurus koperasi terpilih telah menjalankan amanat seluruh anggota dengan baik, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa kemajuan koperasi yang telah dijalankan bersifat terbuka seluruh anggota.

Jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT tahun 2017 sebanyak 39 koperasi sementara target yang harus dicapai sebanyak 46 koperasi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015, capaian kinerja tahun 2017 ini lebih rendah. Jumlah koperasi yang RAT tahun 2016 sebanyak 43 koperasi dan tahun 2015 sebanyak 45 koperasi. Penurunan ini disebabkan oleh pada Tahun 2017 ini pembinaan

kelembaga koperasi lebih difokuskan pada Pembubaran dan Pembentukan Koperasi.

2. Jumlah Wira Usaha/UMKM

Setelah dilakukan Updating Data UMKM tahun 2017, jumlah UMKM Kota Pariaman sebanyak 7065 unit terdiri dari 6.546 unit Usaha Mikro, 491 unit Usaha Kecil dan 28 unit Usaha Menengah. Dari target yang ditetapkan sebanyak 7.100 unit dapat direalisasikan capaian kinerja 99,50 %. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya jumlah UMKM 6.848 unit mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Perindagkop dan UKM untuk menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah :

1. memfasilitasi Pelatihan teknis pada masyarakat, sebagai upaya untuk menumbuhkan wira usaha baru.
2. memfasilitasi permodalan Usaha UMKM dengan BUMN/BUMD
3. mengikutsertakan Pelaku UMKM dalam pameran/event tertentu dalam rangka promosi produk UMKM.
4. menjalin Kerjasama dalam bentuk Kemitraan dengan BUMN/BUMD serta mengadakan MOU dalam rangka pengembangan UMKM Kota Pariaman.

Untuk mencapai Sasaran : Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif, Mandiri dan UMKM yang berkualitas dan Profesional dilaksanakan kegiatan : Pembinaan Kelembagaan dan Penilaian Koperasi Berprestasi, Bimuluh dan Proses serta Tata Cara Pembentukan Koperasi, Penilaian Kesehatan KSP/USP dan Pengawasan Usaha Simpan Pinjam, Updating Data Base, Koordinasi Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Koperasi, Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah, Pembinaan dan Pengawasan UMKM, Klinik Konsultasi Bisnis dan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Sasaran 8 Tersedianya Pasar Yang Representatif

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Jumlah kawasan pasar yang dibangun dan di tata	3 Unit	3 Unit	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian				100%	100%	100%

Dari table sasaran Tersedianya Pasar yang Representatif yang hanya 1 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 100 % hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, capaian ini juga sama dengan tahun 2016 dan tahun 2015 . Kawasan pasar yang dibangun dan ditata yaitu :

1. Pasar Pariaman

Kegiatan yang dilakukan berupa penataan Pasar dan memfasilitasi rencana Pembangunan Pasar Pariaman.

2. Pasar Kurai Taji

Kegiatan yang dilakukan memfasilitasi Pendistribusian Kios Pasar Kurai Taji dan Regulasinya serta menyusun Perencanaan Pembangunan Los Lambuang Bawah Pasar Kurai Taji.

3. Pasar Jati

Memfasilitasi Pedagang/Pengrajin yang ingin berjualan di Pasar jati dan melakukan evaluasi pedagang yang tidak aktif.

Dalam penataan pasar ini kendala yang dihadapi antara lain :

1. Kesulitan dalam merelokasi pedagang karena perilaku dan kebiasaan pedagang yang tidak mau dipindahkan atau ditertibkan.
2. Pedagang pasar sebagian besar belum mematuhi aturan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan pasar bersih, aman, nyaman dan higienis, seperti menjaga kebersihan tempat berjualan sendiri .
3. Munculnya Kesalahan persepsi dari sebagian pedagang terhadap rancangan Perda Pengelolaan Pasar yang menganggap dengan ranperda ini dapat mengambil hak dari pedagang dan tidak berpihak kepada pedagang.

Solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut :

1. melakukan pendekatan persuasive dengan pedagang sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

2. membuat Peraturan/regulasi dengan Menyusun Ranperda Pengelolaan Pasar
3. memberikan penjelasan-penjelasan serta melakukan hearing dengan DPRD dan beberapa pedagang bahwa dengan Ranperda ini mengakomodir kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan pasar rakyat dengan pengelolaan yang baik serta melindungi pasar rakyat dari hantaman peningkatan Pasar Modern dengan menata dan mengatur pertumbuhan Pasar Modern

Kegiatan yang menunjang Sasaran ini : Fasilitasi Pengembangan Pasar, Pelaksanaan Bazar/Pasar Murah Sembako, Pariaman Expo dan Pameran Pembangunan Kota Pariaman, Promosi Produk Daerah, Penyusunan Ranperda Tentang Kawasan Pasar dan Tera Ulang, Perencanaan Pembangunan Los Lambuang Bawah Pasar Kurai Taji serta Misi dagang.

Sasaran 9
Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap
peraturan yang berlaku

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Jumlah alat ukur yang di tera ulang	330 Unit	332 Unit	100.61%	103.67%	126%
2	Jumlah penurunan temuan barang yang tidak memenuhi standar	5 temuan	3 temuan	140%	114.29%	138%
Rata-rata Capaian				120.30%	108.98%	131.75%

Dari tabel Sasaran Meningkatkan kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku terdapat 2 indikator yang capaian kinerja tahun 2017 di atas 100% dengan rata-rata capaian 120.30%, dan jika dibandingkan dengan Tahun 2016 rata-rata capaian sebesar 108,98% sedangkan tahun 2015 rata-rata capaian sebesar 131.75 %.

1. Jumlah alat ukur yang ditera ulang tahun 2017 ditetapkan target sebanyak 330 unit dan dapat direalisasikan sebanyak 332 unit dengan pencapaian lebih kurang 100,61 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 alat ukur yang ditera berjumlah 311 dengan capaian 103.67%, adanya peningkatan jumlah alat yang ditera .

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan metrologi yang semula menjadi kewenangan propinsi, dengan keluarnya Undang-Undang tersebut menjadi kewenangan Kab/Kota.

Tera ulang dilakukan di tiga Kecamatan di Kota Pariaman, yaitu Pariaman Tengah dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 8 Desember 2017, Pariaman Utara tanggal 5 Desember 2017 dan Pariaman Selatan tanggal 4 Desember 2017.

Pada pelaksanaan Tera Ulang ini, jumlah alat ukur (timbangan) yang ditera sebanyak 332 unit sementara total UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya) yang di Tera sebanyak 1.006 unit. Untuk Kegiatan selanjutnya adalah Pengawasan Penggunaan UTTP.

Permasalahan yang dihadapi :

- waktu Pelaksanaan Kurang karena UPT Metrologi ini belum terbentuk, anggaran dipindahkan ke Dinas pada Perubahan Anggaran Tahun 2017 sehingga kegiatan terlaksana di akhir tahun yang membuat pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.
- kekurangan SDM
Kurangnya SDM Kemetrologian yang ada di Dinas Perindagkop dan UKM sehingga pelaksanaan pengawasan belum mencakup terhadap pengguna UTTP secara keseluruhan. Sementara di Kota Pariaman, sesuai dengan Permendag no. 78 tahun 2016, kesiapan untuk pembentukan UPT Metrologi baru pada penyiapan SDM yang mengikuti Diklat Penera. Untuk kesiapan SDM ini masih ada tahapan yang harus dilalui yaitu sertifikat untuk mendapatkan pegawai berhak
- kurangnya sarana dan Prasarana

Alternatif Pemecahan Masalah :

- segera membentuk lembaga kemetrologian (UPT Metrologi) dan merencanakan pelaksanaan kegiatan lebih awal agar bisa lebih maksimal.
- mengikuti Diklat lanjutan bagi tenaga kemetrologian.
- melengkapi sarana dan prasarana untuk kemetrologian berupa Gedung, Peralatan dan Kendaraan dengan Dana DAK Kemetrologian

2. Indikator Jumlah Penurunan Temuan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar target 5, realisasi 3 temuan dengan capaian 140%, sedangkan

tahun 2016 ada 6 temuan adanya penurunan jumlah temuan. Hal ini cukup bagus karena adanya penurunan temuan barang yang tidak memenuhi standar.

Pengawasan dilakukan untuk Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), Barang Berbahaya dan Barang Bersubsidi. Target yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebanyak 5 temuan. Dalam Pengawasan tahun 2017 ini ditemukan 3 temuan yaitu :

1. Pada Pengawasan BDKT, ditemukan kesalahan penulisan satuan ukuran pada label produk makanan. Hasil temuan ini sudah ditindaklanjuti dengan memberikan peringatan pada produsen.
2. Barang Bersubsidi seperti Pupuk dan Gas 3 Kg yang penjualannya diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini sudah ditindaklanjuti dengan memberikan teguran secara lisan dan tulisan kepada pedagang yang bersangkutan.
3. Ditemukan Pedagang di Pasar yang menjual susu yang tidak memiliki izin edar. Temuan ini sudah ditindaklanjuti dengan penarikan produk susu di pasaran dan kepada pedagang diberikan pengarahan dan pembinaan.

Disamping pengawasan komoditi di atas, Pemerintah Kota Pariaman juga melakukan razia khusus yang dilaksanakan secara terpadu yang melibatkan lintas sektoral.

Pengawasan secara serentak dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dampak positif dengan mulai meningkatkan kesadaran di kalangan para pelaku usaha. Untuk tidak memproduksi mengimpor maupun memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini dilakukan agar konsumen terlindungi dari barang-barang yang tidak memenuhi persyaratan. Pemerintah akan terus melakukan peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa secara berkesinambungan dengan melakukan koordinasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Agar pengawasan dilakukan lebih efektif dan efisien sehingga mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dalam rangka perlindungan konsumen.



Ket. Gambar Pemeriksaan Makanan

Selain Pengawasan Barang, juga dilaksanakan pemantauan harga bahan pokok setiap hari. Laporan perkembangan harga bahan pokok harian di kirim ke Dinas Perindag Provinsi Sumbar, Kepolisian Resor Kota Pariaman, dan TNI Pariaman. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Kota Pariaman. Laporan pemantauan harga bahan pokok juga dilakukan secara on line dan dikirm ke Kementerian Perdagangan RI dimana sistem ini bisa diakses melalui internet, sehingga bisa dilihat perkembangan harga bahan pokok setiap Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Sistem pemantauan harga bahan pokok on line ini dapat menjadi acuan bagi seluruh stake holder baik bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan, bagi pedagang dalam menyusun strategi perdagangan dan bagi masyarakat umum dalam upaya mengetahui perkembangan harga di pasar.

Kegiatan yang menunjang Sasaran ini : Peringatan Hari Konsumen Nasional Tingkat Kota Pariaman, Pemantauan Harga Bahan Pokok, Pengawasan di Bidang Perdagangan, Operasional Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrolgian, serta Operasional Metrologi Kota Pariaman.

Sasaran 10
Meningkatnya jumlah industri kreatif dan komoditi unggulan

NO	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun		
						2017	2016	2015
1	Persentase pertumbuhan industri	1.7	%	1.73	%	101.8%	105.3%	97%
2	Jumlah industri kreatif	806	Unit	732	Unit	90.8%	132.6%	129%
3	Jumlah teknologi tepat guna yang diciptakan	15	alat	17	alat	113.3%	106.7%	138%
Rata-rata Capaian						102%	114.9%	121%

Untuk sasaran diatas dapat dilihat ada 3 indikator, dimana tahun 2017 rata-rata capaian 102.%. jika dibandingkan dengan tahun 2016 rata-rata capaian 114.9% dan tahun 2015 rata-rata capaian 121%.

1. Persentase Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan Industri Tahun 2017 mencapai 1,73 %. Jumlah Industri tahun 2017 sebanyak 1.702 unit mengalami penumbuhan sebanyak 29 unit, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 1.673 unit. Industri yang tumbuh adalah Industri Kerajinan yaitu bordir, rajutan dan sulaman. Dari target yang ditetapkan sebanyak 1,7 % dapat dicapai dengan capaian 101,76%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2016, pertumbuhan industri hanya 1,58 %. Tercapainya target Penumbuhan Industri Kota Pariaman ini disebabkan oleh adanya kerjasama Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman dengan Balai Diklat Industri Padang dalam mengadakan Pelatihan Diklat Bordir 3in1 yang diikuti oleh 100 orang peserta dari Kota Pariaman dan Pelatihan Diklat 3in1 Pembuatan Hiasan Busana dengan mesin bordir high speed angkatan II sebanyak 70 orang. Dari Diklat tersebut ada penumbuhan Industri baru yang menambah jumlah industri Kota Pariaman.

Peningkatan jumlah Industri juga diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri. Tahun 2017, jumlah tenaga kerja sektor industri sebanyak 9.034 orang. Dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah tenaga kerja sektor industri sebanyak 8.956 orang dan tahun 2015 sebanyak 8.926 orang.

2. Jumlah Industri Kreatif

Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, inovasi, ketrampilan serta bakat individu. Industri Kota Pariaman yang termasuk dalam Industri Kreatif antara lain : Industri Sulaman, Bordir, rajutan dan Cendramata yang menjadi industri unggulan Kota Pariaman.

Jumlah Industri Kreatif Tahun 2017 ini sebanyak 809 unit terdiri dari Sulaman sebanyak 180 unit, Bordir 541 unit, Rajutan sebanyak 73 unit, Cendramata/Souvenir sebanyak 15 unit, dengan capaian kinerja 100,7 %.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah industri kreatif tahun 2017 ini meningkat sebanyak 77 unit. Peningkatan jumlah Industri kreatif ini disebabkan adanya Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif dalam rangka mendukung pariwisata sesuai dengan Visi Kota Pariaman yaitu “ Pariaman sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama”.

Peningkatan Jumlah Industri Kreatif juga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri Kreatif. Pada Tahun 2017 ini Tenaga Kerja sektor Industri Kreatif berjumlah 5.558 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 5.554 orang dengan capaian kinerja 100,07 % . Jika dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah tenaga kerja disektor industri kreatif sebanyak 5.480 orang dan tahun 2015 sebanyak 5.453 orang.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman :

1. Melakukan Pelatihan dan Pembinaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Para Pengrajin.
2. Mendatangkan tenaga ahli dan disainer di bidang kerajinan serta mengirim para pengrajin dalam Pelatihan Teknis Kerajinan.
3. Memberikan Bahan Percontohan dan buku-buku untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi Pengrajin dalam menghasilkan produk.
4. Melakukan Kerja sama dengan Balai Diklat Industri Padang Kementerian Perindustrian RI dalam mencetak tenaga terampil dan kompetensi di bidang kerajinan bordir dan fashion (Pelatihan Bordir

3 in 1) yang diikuti oleh 170 orang pengrajin pemula se Kota Pariaman.

5. Mengadakan pagelaran fashion yang menampilkan fashion show hasil rancangan desainer untuk meningkatkan perkembangan dunia fashion Kota Pariaman dan industri pengrajin pendukungnya (sulaman, Bordir dan rajutan) menuju trendsetter busana di Indonesia, serta terjalinnya kerjasama antara desainer dengan pengrajin Kota Pariaman.

Kegiatan yang menunjang Sasaran ini adalah : Pembinaan dan Pengembangan Klaster Industri Kota Pariaman, Fasilitas Pengembangan OVOP (One Village One Product), Pariaman Fashion Parade, Pembinaan Industri Kerajinan Kota Pariaman, Fasilitas Pengembangan Industri Kreatif Kota Pariaman, Promosi Produk Industri Kerajinan Kota Pariaman, Bimbingan dan Penerapan Gugus Kendali Mutu IKM Kota Pariaman, Lomba Disain Rancang Busana Aplikasi Kerajinan Khas Kota Pariaman dan Pelatihan Kemasan bagi IKM Pangan Kota Pariaman.

3. Jumlah Teknologi Tepat Guna yang diciptakan

Target untuk 2017 adalah sebanyak 15 alat, sedangkan realisasi sebanyak 17 alat dengan capaian 113.33%. sedangkan tahun 2016 realisasinya adalah 16 alat sehingga capaian kinerjanya adalah 106,6%, adanya kenaikan capaian sebanyak 1 alat.

Kenaikan capaian ini disebabkan besarnya partisipasi dari masyarakat baik dari kategori umum maupun dari kategori pelajar. Dari kategori umum ada 5 (lima) alat yaitu alat pemesan makanan otomatis, penangkap ikan, mesin penggembur tanah, perangkat walang sengit, dan penangkap nyamuk.

Sedangkan dari kategori pelajar ada 12 (dua belas) alat, yaitu pemisah kuning telur, pembelah kelapa muda, pembuka cangkang telur, pencetak ladu arai pinang, pembengkok besi portable, pembuka emping melinjo, pengusir hama burung praktis, pembunuh tikus, pembangkit listrik gratis, move on debu, portal kereta cerdas, dan mesin pengayak pasir.

Sasaran 11
Meningkatnya Pembangunan, Pengembangan, Penataan dan
Pembenahan Objek Wisata serta Prasarana Pendukung

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Jumlah kawasan wisata yang dibangun, dikembangkan dan ditata	6 kawasan	5 kawasan	83%	100%	100%
2	Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%	0%	133%
3	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 dokumen	4 dokumen	57%	100%	0%
	Rata-rata capaian			80%	67%	78%

Sasaran Meningkatkan pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek wisata serta prasarana terdiri dari 3 Indikator kinerja, satu indikator dengan capaian dibawah 60%, sedangkan 2 indikator capaian dengan capaian 83% dan 100% dengan rata-rata capaian kinerja 80%. Jika dibandingkan antara rata-rata capaian 2017 sebesar 80% naik sebesar 13% dari tahun 2016 yang rata-rata capaian 67%, sedangkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 turun 11% dari capaian 78%.

1. Jumlah kawasan wisata yang dibangun, dikembangkan, dan ditata;

Kota Pariaman sebagai salah satu Kota tujuan wisata di Sumatera Barat terus berbenah menata dan mengembangkan kawasan wisata. Hal ini dapat dilihat dengan pesatnya pembangunan di kawasan Kota Pariaman, yaitu :

- 1) Peningkatan/revitalisasi kawasan pariwisata plaza pusat jajanan kuliner berlokasi di Pantai Gandoriah;
- 2) Pemasangan lampu taman Rumah Tabuik Pasar dan Pantai Lohong sampai Pantai Cermin;
- 3) Pembangunan kamar bilas dan septi tank pulau Angso Duo ;
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Tabuik Pasa;
- 5) Pemeliharaan bangunan komplek Rumah Tabuik Pasa dan Subarang.

2. Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi

Untuk indikator Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi pada tahun 2017 ada 2 unit yaitu Komplek Rumah Tabuik Pasa dan Komplek Rumah Tabuik Subarang, sedangkan tahun 2016 capaian 0% . sarana dan prasarana Rumah Tabuik Pasa dan Rumah Tabuik Subarang yang

direhab adalah perbaikan atap, perbaikan lantai, perbaikan pagar teras serta pengecatan.

3. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun;

Dari 7 target yang ditetapkan pada tahun 2017, terealisasi sebanyak 4 dokumen, sedangkan tahun 2016 hanya 1 dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Pariaman (RIPPDA).

Dokumen Perencanaan yang disusun tahun 2017 yaitu:

- 1) dokumen perencanaan Peningkatan/revitalisasi kawasan pariwisata plaza pusat jajanan kuliner;
- 2) dokumen perencanaan dokumen perencanaan dokumen perencanaan Pemasangan lampu taman;
- 3) dokumen perencanaan Pembangunan kamar bilas dan septitank pulau angso duo;
- 4) dokumen perencanaan Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Tabuik

Sasaran 12
Meningkatnya Promosi Wisata Secara Konsisten Baik
Dalam Lingkup Regional, Nasional Dan Internasional

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Jumlah team jaringan kerjasama promosi pariwisata	6 team	6 Team	100%	0%	100%
2	Jumlah ivent promosi yang dilaksanakan	10 ivent	16 Iven	160%	100%	125%
3	Jumlah buku statistik wisata terpadu yang tersusun	100 buku	100 buku	100%	100%	100%
4	Jumlah Bahan Promosi Wisata yang dibuat	10 jenis	10 jenis	100%	100%	150%
5	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina	50 orang	50 orang	100%	100%	100%
Rata-rata capaian				112%	80.0%	115.0%

Dari sasaran di atas, terdapat 5 indikator kinerja dimana rata-rata capaian kinerja tahun 2017 sebesar 112% dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 80% naik sebesar 32%. sedangkan dari tahun 2015 dengan rata-rata capaian 115%, tahun 2016 capaian turun sebesar 35%.

1. Jumlah Tim Koordinasi pelaku industri pariwisata

Pada indikator ini direncanakan melakukan pengembangan jaringan kinerja sama promosi pariwisata dengan 6 (enam) pelaku industri pariwisata seperti ASITA, PHRI, POK. DARWIS, HPI dan pemerhati pariwisata.

2. Jumlah Iven Promosi yang dilaksanakan

Pada indikator ini Jumlah Iven promosi yang yang dilaksanakan sebanyak 10 iven dengan capaian 100%, sedangkan Tahun 2016 Iven yang dilaksanakan 5 Iven.

Adapun 10 iven yang dilaksanakan:

- 1) Lomba Desain Rancang Busana Aplikasi Kerajinan Khas Kota Pariaman tanggal 12 Maret 2017 di Pantai Gandorih.
- 2) Festival Marching Band Tingkat Sekolah Menengah se Sumatera Barat tanggal 28 April 2017 di Karan Aur
- 3) Pariaman Fashion Parade tanggal 5-6 Mei 2017 di Pantai Gandorih;
- 4) Festival Pesona Gandorih telah dilaksanakan tanggal 20-23 Mei 2017;
- 5) Gebyar Paud tanggal 30 Mei 2017
- 6) Pesta pantai tanggal 25 Juni s/d 2 Juli 2017;
- 7) Gebyar HUT Kota Pariaman tanggal 2 Juli 2017
- 8) Turnamen Sepak Bola antar Club se Kota Pariaman di Kurai Taji tanggal 3 s/d 10 Juli 2017.
- 9) Pariaman Expo tanggal 13 s/d 19 Agustus 2017
- 10) Maraton 10K Tingkat Sumbar tanggal 3 September 2017
- 11) Turnamen Bola Volly Tingkat Sumbar tanggal 7 s/d 9 September 2017 di Gor Rawang
- 12) Pesta Budaya Tabuik dijadwalkan tanggal 21 September s/d 1 Oktober 2017



13)Kejuaraan Volly Pantai Nasional Terbuka tanggal 27 s/d 30 September 2017 di Pantai Pariaman

14)Pariaman Internasional Triathlon tanggal 2 s/d 3 Desember 2017 di Pantai Cermin;





15) Pelaksanaan Tuor D Singkarak tgl 10 Agustus 2016;

16) Tablik Akbar dan Musik Qasidah dilaksanakan 31 Desember 2017.

3. Jumlah buku statistik wisata terpadu yang disusun
Pada indikator ini meliputi Kegiatan Pengembangan Statistik Kepariwisataaan Kota Pariaman realisasi 100% .
4. Jumlah bahan promosi wisata yang dibuat
Pada indikator ini meliputi kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri meliputi persediaan Bahan-bahan Promosi Pariwisata dan budaya dalam dan luar kota sampai bulan Desember 2017 bahan promosi pariwisata yang tersedia 10 Jenis terdiri dari Spanduk, Leaflet, Booklet, Baliho, Brosur, Kelender, Stiker, Poster, Peta, dan Tas Jinjing.
5. Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina
Pada indikator ini dilaksanakan kegiatan pelatihan SDM Jasa Usaha Pariwisata telah dilaksanakan pesertanya terdiri dari 10 orang Pengusaha Rumah Makan, dan 30 orang pedagang kaki lima, 10 orang pengusaha kapal

Sasaran 13

Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang mendukung pariwisata

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan, dibina dan dilestarikan	5 sanggar	5 sanggar	100%	100%	100%
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2 unit	2 unit	100%	100%	100%
	Rata-rata capain			100%	100%	100%

Sasaran Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang mendukung pariwisata terdapat 2 Indikator dengan rata-rata capaian 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 capaian juga 100% . Adapun 2 indikator tersebut adalah:

- 1 Jumlah Kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan, dibina, dilestarikan target 5 sanggar dan terealisasi sesuai target 5 sanggar.

Sanggar yang dibina:

- 1) Mustika Minang Duo
- 2) Darak Badarak
- 3) Piaman Saiyo
- 4) Lohong
- 5) Sentak Sairiang
- 6) SMK 1
- 7) SMK 4

Sedangkan kesenian yang dibina berupa Randai Kreasi.

- 2 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, ada 2 buah sarana penyelenggaraan seni dan budaya dengan capaian 100%, yaitu:

1. Medan nan bapaneh di Rumah Tabuik Pasa
2. Pentas di Pantai Gandoriah

Dengan meningkatnya pembangunan, penataan objek wisata, serta gencarnya promosi dan banyaknya iven yang diadakan dan dilaksanakan di Kota Pariaman memberikan dampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman dari tahun ke tahun . Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**JUMLAH WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE KOTA PARIAMAN
DARI TAHUN 2013 -2017**

TAHUN	KUNJUNGAN WISATA NUSANTARA (ORANG)	KUNJUNGAN WISATA MANCANEGERA (ORANG)
2013	750.200	120
2014	791.624	34
2015	1.233.668	73
2016	2.675.699	687
2017	3.099.310	690

Sumber data:Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

**Sasaran 14
Meningkatnya jumlah penanaman modal**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Jumlah investor yang menanamkan modal	1 investor	2 investor	200%	100%	200%
2	Jumlah perizinan yang diterbitkan	2000 lembar izin	1127 lembar izin	56.4%	61.2%	62.95%
Rata-rata capaian				128.2%	80.60%	131%

Dari tabel sasaran Meningkatkan jumlah penanaman modal terdapat 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian 128.2%, jika dibandingkan dengan 2016 dengan rata-rata capaian 80.60% terjadi kenaikan capaian sebesar 48%, sedangkan tahun 2015 ke 2016 adanya penurunan capaian sebesar 51%.

- 1 Indikator kinerja Jumlah Investor yang menanamkan modal dengan target 1 Investor dan target tersebut tidak terealisasi, dengan capaian 200%.
Perusahaan yang berinvestasi di Kota Pariaman adalah PT.LANEFA KARYA PERSADA yang bergerak di Bidang Pembangunan Perumahan terletak di Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur dan PT. Bukit Menara Perkasa yang bergerak di Bidang Pembangunan Perumahan terletak di Desa Koto Marapak kecamatan Pariaman Timur.
- 2 Indikator kinerja Jumlah perizinan yang diterbitkan yang ditargetkan sebanyak 2000 lembar izin hanya terealisasi sebanyak 1.127 lembar izin atau 56.4%

MISI 3 : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA MAMPU MENDORONG DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT LEBIH MANDIRI

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun		
						2017	2016	2015
1	Persentase tingkat disiplin aparatur	100	%	95.7	%	96%	99%	99%
2	Prosentase ketersediaan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan	100	%	100	%	100%		
Rata-rata capaian						98%	50%	50%

Dari tabel di atas Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah terdapat 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian 98%, sasaran ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016, karena tahun 2016 hanya 1 indikator .

1. Indikator Persentase tingkat disiplin Aparatur

Jumlah ASN Per Januari 2017 sebanyak 2.519 orang, sedangkan ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sebanyak 109 (seratus sembilan) dengan jenis hukuman teguran lisan berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010, adanya penurunan tingkat disiplin dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016 jumlah ASN yang mendapatkan hukuman disiplin sebanyak 36 (tiga puluh enam) atau 1.10% dari jumlah ASN 3.268 orang. Sedangkan tahun tahun 2015 hanya sekitar 30 orang yang tidak disiplin 3.268 orang.

Hal ini disebabkan banyak faktor yang mempegaruhi, diantaranya;

- 1) kurangnya perhatian dan ketegasan pimpinan terhadap bawahan yang melanggar disiplin;
- 2) kurangnya kesadaran dan tanggungjawab ASN dalam melaksanakan tugas;
- 3) pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan disiplin perlu terus disampaikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka penegakan integritas bagi seluruh Aparatur Sipil di Daerah. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan terutama penegakan disiplin dan integritas setiap

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Pemberlakuan UU Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menuju Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugasnya bersikap jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.

2. Persentase ketersediaan data yang jelas akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintah daerah.

Seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia terhadap data, mengharuskan setiap pribadi untuk dapat menyimpan atau mengarsipkan data yang ia miliki, begitu pula halnya dengan instansi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Tak hanya itu, dalam konteks pengembangan ekonomi suatu daerah, ketersediaan data dan informasi menjadi sangat penting dalam upaya menggali sumber-sumber ekonomi produktif yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, data dan informasi menjadi sangat penting untuk menarik para pemodal (investor) menanamkan modalnya di suatu daerah. Daya tarik investasi di suatu daerah sangat bergantung dari kekuatan data dan informasi daerah tersebut. Kepala daerah dan jajarannya harus mampu menyuguhkan data dan informasi yang di dalamnya merupakan kemasan "jualan" potensi daerah.

Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah berkewajiban mengelola data dan informasi dengan sebaik mungkin. Data dan informasi sangat dibutuhkan oleh setiap lembaga untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan yang begitu cepat dan kompleks. Data dikumpulkan dalam bentuk cetakan ataupun bentuk penyimpanan lainnya. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Pariaman telah mulai melakukan hal ini, yakni penyimpanan data secara manual dan elektronik, namun baru sebagian kecil dari OPD yang melakukan itupun tidak optimal.

Sasaran 2
Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Tingkat penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%	100%	75%
Rata-rata Capaian				100%	100%	75%

Dari tabel Sasaran Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah diatas hanya ada 1 indikator dimana target dari Pemerintah Kota Pariaman untuk mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah teralisasi 100%, capaian ini juga sama dengan tahun 2016 dengan rata-rata capaian 100% dengan meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan tahun 2015 hanya mendapatkan Wajar dengan Pengecualian (WDP)

Hal ini dapat dilihat dari hasil Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI pada Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2017 jumlah temuan sebanyak 292 temuan dengan nilai keuangan berjumlah Rp. 47.401.548.491,95,- jumlah rekomendasi untuk pengembalian ke Kas Negara/Daerah 712 rekomendasi dengan nilai keuangan Rp. 14.826.342.796,75,-.

Penyelesaian sesuai rekomendasi BPK sebanyak 464 rekomendasi dengan nilai Rp. 7.819.587.692,72,- sedangkan tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi 197, dengan nilai Rp. 6.844.187.054,03,- yang belum ditindaklanjuti 51 rekomendasi dengan nilai Rp. 162.568.050,00,-

Untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut Pemerintah Kota Pariaman melalui Inspektorat melaksanakan kegiatan monev yakni dengan melaksanakan gelar pengawasan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Sasaran 3

Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah berbasis web dan secara online (E-government)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Persentase peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	90 %	85 %	94%	111%	100%
2	Jumlah informasi dan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan	1 data	1 data	100%	100%	100%
	Rata-rata capaian			97%	106%	100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa untuk indikator kinerja jumlah informasi dan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan pada sasaran Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah berbasis web dan secara online (E-government) rata-rata capaian 97%, jika dibandingkan dengan tahun 2016 rata-rata capaian 106%, sedangkan tahun 2015 capaian 100%.

Dari table diatas dapat dijelaskan capaian kinerja dari masing-masing indikator:

1. Persentase peningkatan kualitas tatakelola dan pelayanan pemerintah” dengan target 90%, realisasi 85% menghasilkan capaian sebesar 94%, dari hasil capaian diatas disimpulkan bahwa belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan. Hal ini di karenakan belum maksimalnya komitmen dan upaya yang kuat dari semua unsur terkait, kesadaran, tanggap teknologi, keikhlasan, dan rasa (*sence*) akan pentingnya penatakelolaan pemerintah berbasis web dalam pelaksanaannya

Pencapaian sasaran dan indicator dari yang di tergetkan belum terpenuhi dapat dilihat masih banyak terjadi ketidakdisiplinan dari ASN dalam melaksanakan semua aturan yang seharusnya dilaksanakan seperti Kehadiran pada apel pagi, sarapan diluar, dan magrib mengaji yang belum semuanya diikuti oleh ASN. Adapun solusi yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan kualitas tatakelola dan pelayanan pemerintah adalah dengan memberlakukan finger print terpusat untuk disiplin kehadiran ASN, melakukan monitoring atau sidak oleh tingkat

pimpinan, menempatkan pegawai secara profesional, dan lain-lain sebagainya.

2. Jumlah informasi dan data yang jelas, akurat, mudah diakses tentang pengelolaan pemerintah terutama dalam perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dengan pencapaian 100%. Ini dapat dibuktikan dengan telah selesainya aplikasi e-planning yang merupakan Tindak Lanjut MOU antara Walikota dengan KPK. Dimana salah satunya isi perjanjiannya adalah bagaimana seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat menyusun perencanaan berbasis aplikasi yang online. Dengan demikian data dan informasi terutama tentang perencanaan pembangunan, tersaji valid dan reliable.

Sasaran 4
Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Yang Baik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	100 %	100 %	100%	100%	100%
2	Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik	85 %	93 %	109%	92%	82%
3	Persentase yang memiliki KK	96 %	96 %	100%	102%	99%
4	Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	75 %	81.4 %	109%	91.9%	45%
5	Jumlah dokumen profil kependudukan yang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%
6	Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang dilayani	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	100%	100%
Rata-rata capaian				103%	98%	88%

Dari sasaran diatas, terdapat 6 (empat) indikator kinerja dengan rata-rata capaian 103%, jika dibandingkan dengan tahun 2015 sampai tahun 2016 capaian dari sasaran ini cenderung mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2015 ke 2016 naik 10%, sedangkan dari tahun 2016 ke tahun 2017 naik 6 %.

1. Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan

Untuk indikator kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Kependudukan ditargetkan 100% dan terealisasi dengan capaian kinerja 100%. Pemerintah Kota Pariaman terus meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan kepada masyarakat dengan menerapkan Sistem Pelayanan Langsung Ke Desa dan Kelurahan dan selesai dalam satu hari dimana masyarakat sangat puas dengan sistem yang dilaksanakan ini .

2. Penduduk yang Memiliki KTP Elektronik dari Jumlah Penduduk

Untuk indikator Penduduk yang memiliki KTP Elektronik dari jumlah Penduduk ditargetkan 85% dan untuk periode Desember 2017 Penduduk yang telah memiliki KTP Elektronik sebanyak 59.091 orang dari jumlah wajib KTP sebanyak 63.806 orang dengan persentase 93%.

3. Kepemilikan KK

Untuk indikator kepemilikan KK di Kota Pariaman ditargetkan 96%. Jumlah KK di Kota Pariaman Periode Desember 2017 sebanyak 23.345 KK dan yang sudah memiliki KK sebanyak 22.424 KK dengan persentase 96 %.

4. Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran

Untuk indikator kepemilikan Akte Kelahiran ditargetkan 75%. Dari jumlah penduduk Kota Pariaman Periode Desember 2017 sebanyak 88.984 orang dan yang memiliki Akte Kelahiran sebanyak 24.521 orang dengan persentase sebanyak 81.43 % dan yang belum memiliki akte kelahiran sebanyak 5.593 (18.57%). Agar seluruh masyarakat kota memiliki akte kelahiran, perlu terus disosialisasikan ke Sekolah dan ke Desa/Kelurahan, serta melakukan pelayanan langsung ke Desa/ Kelurahan.

5. Dokumen Profil Kependudukan yang diterbitkan

Profil kependudukan yang diterbitkan tiap tahunnya terus dilaksanakan dan di evaluasi sehingga profil yang diterbitkan bisa lebih baik dan indikator yang dibutuhkan bisa dilengkapi dengan baik sehingga tersaji informasi yang lengkap dan akurat tentang penduduk Kota Pariaman.

6. Dokumen Administrasi Kependudukan yang dilayani

Dokumen Administrasi Kependudukan yang dilayani di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak tujuh dokumen diantaranya

pembuatan KK, KTP-E, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akta Perkawinan, Surat Pindah dan Surat Kedatangan. Semua pelayanan ini terus ditingkatkan dan dilaksanakan pelayanan satu hari siap serta pelayanan langsung ke Desa/Kelurahan untuk semua dokumen tersebut Gratis (Tidak Ada Pungutan Biaya) kecuali Denda sesuai perda No. 4 tahun 2010.

Sasaran 5 Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Persentase tingkat realisasi PAD terhadap target PAD	100%	89.22%	89.22%	88%	109%
2	Persentase tingkat kenaikan PAD	5%	3.58%	72%	0.00%	13.88%
Rata-rata capaian				80%	44%	61%

Dari sasaran terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah tahun 2017 ada 2 indikator dengan rata-rata capaian 80%, jika dibandingkan dengan tahun 2016 rata-rata capaian 44% adanya kenaikan capaian sebesar 37%, sedangkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 turun sebesar 18% .

Sasaran terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah menggunakan dua indikator yaitu indikator Persentase tingkat realisasi PAD terhadap Target PAD dan persentase tingkat kenaikan PAD.

1. Untuk persentase realisasi PAD terhadap target PAD didukung oleh lima (4) kegiatan yaitu:
 - 1) Verifikasi BPHTB dan PBB;
 - 2) Pelayanan PBB Perkotaan & Pedesaan;
 - 3) Pengawasan pajak dan retribusi daerah; dan
 - 4) Sosialisasi ketentuan cukai.

Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp. 34.601.974.884,47 sedangkan realisasi Rp. 30.874.454.262,42,- (89.22%) dimana capaian dari target PAD tidak tercapai. dibandingkan dengan tahun 2016 capaian indikator ini mengalami kenaikan sekitar 1.68% dimana pencapaian target PAD pada tahun 2016 adalah 87.54%. Naiknya pencapaian indikator ini disebabkan:

- target PAD dari Pendapatan Pajak daerah yang ditetapkan Rp. 7.818.416.831,47,- sedangkan realisasi Rp. 8.296.534.833,- adanya kenaikan penerimaan Rp.479.004413,53,-
2. Pencapaian indikator sasaran persentase tingkat kenaikan PAD didukung oleh 4 jenis kegiatan program peningkatan pengelolaan keuangan daerah yaitu kegiatan updating data PBB, Intensifikasi PBB, Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah dan pendataan potensi PAD. Tahun 2017 dari target 5% yang ditetapkan terealisasi sebesar 3,58%. Walaupuntidak mencapai target yang dtetapkan. Dari segi pencapaian realisasi 3.58% dibandingkan dengan tahun 2016 tingkat capaian pada sasaran ini 0 %, dari 5 % tingkat kenaikan PAD yang ditargetkan tidak tecapai sama sekali bahkan mengalami penurunan sebesar Rp. 745.308.181,6 atau sekitar 2, 4 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015.

Sasaran 6
Terwujudnya penatausahaan keuangan dan
pengelolaan aset daerah yang akurat dan akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Presentase Aset yang terdata	100 %	100 %	100%		
2	Nilai dan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC	CC	100%	75%	75%
3	Nilai dan Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi	Tinggi	100%		75%
Rata-rata capaian				100%	0%	75%

Dari tabel sasaran Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang akurat dan akuntabel dengan 3 indikator dengan rata-rata capaian 100%.

1. Persentase Aset yang terdata yang ditargetkan 100% terealisasi 100%, dengan nilai aset Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2017 Rp. 1.403.867.164.678,63.

Adapun Aset Pemerintah Kota Pariaman terdiri dari:

- 1) tanah ;

- 2) Peralatan dan mesin berupa alat-alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat laboratorium, serta alat persenjataan dan keamanan.
 - 3) Gedung dan bangunan, berupa bangunan gedung dan monumen;
 - 4) Jalan, irigasi dan jaringan, terdiri dari jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi, dan jaringan.
 - 5) Aset tetap lainnya , berupa buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, hewan dan ternak serta tanaman, dan aset renovasi.
 - 6) Aset lainnya, aset kondisi rusak berat/hilang/lainnya, aset yang dimanfaatkan pihak lain serta aset yang tidak berwujud.
2. sesuai dengan target nilai CC telah terealisasi 100%, nilai ini sama dengan tahun 2016. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pariaman C, adanya sedikit peningkatan capaian di tahun 2016 dan 2017, namun masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Pariaman.
 3. Nilai dan Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan target nilai tinggi dengan realisasi juga tinggi dengan capaian 100%, begitu juga dengan tahun 2016 dan 2015 juga tinggi.

Sasaran 7

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan Produk Perencanaan yang Aspiratif, Aplikatif dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun		
						2016	2016	2015
1	Persentase kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	70	%	68	%	97.14%	85.71%	85%
2	Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam pembangunan	71	Desa/ Kelurahan	71	Desa/ Kelurahan	100%		
3	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas	4 2	dokumen Perwako	4 2	dokumen Perwako	100%	100%	100%
	Rata-rata capaian					99.05%	92.86%	92.50%

Dari tabel sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan Produk Perencanaan yang Aspiratif, Aplikatif dan Akuntabel tahun 2017 terdapat 3 indikator dengan rata-rata capaian 99.05%, hal ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 karena hanya 2 indikator dengan rata-rata capaian 92,86%, dan tahun 2015 rata-ata capaian 92.50%.

1. Indikator Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang pada sasaran Meningkatkan kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif, dan akuntabel target 70%, realisasi 68% dan dengan capaian 97% .

Belum terpenuhinya target yang ditetapkan dikarenakan : Masih adanya pro dan kontra dari masyarakat terkait dengan pembangunan yang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari berbagai forum diskusi yang dilaksanakan baik pertemuan melalui musrenbang maupun pada forum resmi lainnya. Dimana dalam setiap pertemuan masih ada sebagian masyarakat yang memberikan pernyataan tentang ketidakpuasan mereka dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah yang kadangkala ada beberapa pembangunan itu yang tidak tepat sasaran. Memang diakui formula yang tepat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pembangunan masih sulit namun kedepan hal ini bisa diwujudkan dengan telah adanya aplikasi si UPIAK (media tempat pengaduan bagi masyarakat).

Solusinya adalah melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran, serta masyarakat juga meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik sehingga peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan fasilitasi pembangunan dapat terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan bersama.

2. Indikator tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari keikutsertakan masyarakat dari 71 desa/kelurahan dalam mengikuti Musrenbang Mulai dari Musrenbang Dusun/RT atau Rembuk

Warga, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Musrenbang Kota. Indikator ini kurang tercapai. ini dapat diukur dari Jumlah masyarakat yang hadir mulai dari Musrenbang Dusun/RT atau Rembuk Warga. Untuk Rembuk Warga Dusun/RT ditargetkan jumlah masyarakat yang hadir sebanyak 30 orang per setiap rembuk dusun/RT. Total Dusun dan RT adalah sebanyak 260 dusun/RT. Berarti jumlah masyarakat yang ditargetkan hadir adalah 7800 orang. Namun dalam prakteknya ternyata masyarakat yang hadir selama musrenbang Dusun/RT hanya sebanyak 6200 orang.

3. Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan 2 Perwako, dan 4 Dokumen dan realisasi 2 Perwako, dan 4 Dokumen, dengan pencapaian kinerja 100 %. Maksud dari dokumen berkualitas adalah bagaimana dokumen itu dapat disusun tepat waktu dan berdasarkan dari perencanaan yang sudah ada serta mengakomodir kebutuhan masyarakat. Misal, Perwako RKPD yang harus ditetapkan paling lambat minggu ke-4 Mei tiap tahunnya. Serta Perwako untuk RKPD Perubahan Tahun berjalan. Dan untuk hal ini selalu dilaksanakan dengan tepat waktu. Dengan demikian peraturan Walikota (Perwako) dan dokumen yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi OPD di Kota Pariaman dalam Merencanakan, Membangun dan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Sasaran 8 Menurunnya Angka Pengangguran

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Persentase penurunan jumlah pengangguran	1.5 %	14 %	933%	172%	246%
2	Jumlah Tenaga Kerja yang berkualitas	500 orang	125 orang	25%	125%	125.90%
	Rata-rata capaian			479%	149%	186%

1. Target Persentase Penurunan jumlah Pengangguran pada tahun 2017 adalah sebanyak 1,5%, terealisasi 14% dengan capaian kinerja 934%. Realisasi ini didapat dari data jumlah pencari kerja 2017 sebanyak 1.000 Orang, pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 140 Orang atau sebesar 14%. Sehingga sisa pencari kerja per 31 Desember 2017 sebanyak 860 Orang .

tahun 2016 sebanyak 1.5% dilihat dari realisasi 2.58% dengan realisasi capain 172%, jika dibandingkan dengan tahun 2015 target 3% dengan realisasi 7,4% dengan realisasi sebesar 246%.

2. Jumlah tenaga kerja yang berkualitas Pada sasaran strategis jumlah tenaga kerja yang berkualitas pada tahun 2017 adalah sebanyak 500 orang yang mana target dan realisasi 125 orang dengan realisasi capaian hanya 25%. Rendahnya realisasi karena target yang ditetapkan sebanyak 500 orang tersebut sebenarnya untuk jangka waktu 5 tahun, dimana capaian tersebut berakhir di tahun 2017. Total tenaga kerja yang berkualitas mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berjumlah 635 orang, hal ini telah melampaui target yang telah ditetapkan .

Sasaran 9 Mengurangi Tingkat Kemiskinan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Persentase keterpaduan program dalam penanggulangan kemiskinan	75 %	65 %	87%		
2	Persentase menurunnya angka kemiskinan	0.02 %	0.019 %	105%		
3	Jumlah keluarga miskin yang terlayani	1500 KK	1500 KK	100%	100%	
4	Jumlah keluarga miskin yang diberdayakan di desa prioritas	50 KK	53 KK	106%	100%	100%
5	Jumlah Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang terlayani	280 orang	280 orang	100%		
	Rata-rata Capaian			100%	40%	20%

Dari tabel sasaran Mengurangi Tingkat Kemiskinan terdapat 5 indikator dengan rata-rata capaian 100%, capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016 karena indikator berbeda.

1. Dari sisi Persentase keterpaduan program dalam penanggulangan kemiskinan dengan target yang ditetapkan 75%, dan realisasi 65%, dengan capaian kinerja 87%. Indikator Keterpaduan program dalam penanggulangan kemiskinan ini dapat diukur dari sejauh mana Program baik dari Pusat, Propinsi Maupun dari Pemerintah Daerah sendiri bisa

dilaksanakan oleh OPD terkait. Pemerintah Kota Pariaman sudah menjalankannya dengan baik. Ini bisa dilihat sudah sangat banyak program kemiskinan ini di laksanakan oleh OPD seperti di Dinas PU & TR, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perindagkop dan UKM dan banyak lagi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa dengan menggunakan APBDes. Namun memang dalam prakteknya program ini belum optimal .

Adapaun permasalahan-permasalahan dalam hal penggulangan kemiskinan ini adalah:

- 1) Adanya ego sektoral dalam pemakaian data kemiskinan. Maksudnya Data kemiskinan secara nasional yang diakui adalah data dari Susenas. Tapi banyak OPd yang secara kegiatan terlibat langsung dalam penanggulangan kemiskinan ini menggunakan data OPD itu sendiri. Padahal data yang digunakan oleh OPD itu banyak yang tidak memenuhi dari kriteria kemiskinan.
- 2) Dari Karakter masyarakat itu sendiri yang cenderung bila ketika ada bantuan dari Pemko Langsung mengaku miskin. Sehingga banyak bantuan ini tidak tepat sasaran.
- 3) Permasalahan kemiskinan disebabkan belum terintegrasinya lembaga-lembaga pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ditingkat desa/kelurahan (BKM, KUBE, UPK, UEP, LKMA, Desa Mandiri Pangan, Pamsimas), Keterlibatan badan 'amil zakat dalam memberikan bantuan permodalan bagi masyarakat miskin di Kota Pariaman, ditambah lagi karakteristik rumah tangga miskin yang tidak mau merubah budaya miskin selalu ingin dibantu.

Untuk itu di butuhkan berbagai Upaya dalam pengannngulangan kemiskinan berupa Mendorong keterlibatan aktif masyarakat miskin dalam pelaksanaan kegiatan sehingga adanya peran aktif masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan Kota Pariaman. Dan mendorong lembaga amil zakat untuk mengoptimalkan Penggunaan Basis Data Terpadu (PBDT) sebagai basis data penyaluran zakat sehingga tercapai sinkronisasi data miskin. Berupaya merubah pola

kebiasaan masyarakat miskin sendiri bias membantu beban pengeluaran dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

2. Dari sisi Persentase menurunnya angka kemiskinan dapat terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan capaian 105%, ini dapat terlihat dari target penurunan angka kemiskinan sebesar 0,02% ternyata realisasi mencapai dengan penurunan sebesar 0,19 %. Kondisi kemiskinan Kota Pariaman cenderung mengalami perbaikan dilihat pada periode 2010-2016 tren penurunan kemiskinan terjadi dari 5,90% menjadi 5,23%.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Pariaman yaitu sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki program perlindungan sosial yaitu : dengan menjamin penduduk miskin dari resiko sosial ekonomi.
 - 2) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar yaitu : Pendidikan, Kesehatan, Air Bersih, Sanitasi, Pangan dan Gizi
 - 3) Pemberdayaan Kelompok masyarakat miskin yaitu : Memberdayakan masyarakat miskin untuk meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan
 - 4) Menciptakan Pembangunan yang inklusif yaitu : Mengikutsertakan dan memberi manfaat pada seluruh masyarakat.
3. Jumlah KK miskin yang terlayani berjumlah (1.500 KK):
Sebanyak 1.206 KK miskin Kota Pariaman yang mendapat bantuan Program keluarga harapan Kementarian Sosial RI berupa bantuan biaya fasilitas pendidikan dan kesehatan, kemudian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE FM) sebanyak 20 Kelompok (10 orang/Kelompok) berjumlah total 200 Orang, dan penerima bantuan beras sejahtera (rastra) sebanyak 2.983 KK.
 4. Untuk Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terlayani (280 Orang):
Dalam melayani penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Kota Pariaman, Dinas Sosial dalam melakukan pelayanan membutuhkan

lembaga, panti atau pribadi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada PMKS Kota Pariaman, untuk tahun 2017 telah dilakukan pelayanan terhadap PMKS berupa : bantuan biaya hidup bagi penyandang disabilitas sebanyak 11 Orang yaitu berupa bantuan biaya hidup dari Kementerian Sosial RI, kemudian rujukan eks gangguan jiwa ke Panti Bina Laras Bengkulu sebanyak 2 Orang, Bantuan Kursi Roda Bagi Penyandang Disabilitas melalui APBD Kota Pariaman sebanyak 15 Orang, serta rujukan ke Panti Jompo bagi 2 Orang Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2017.

5. Dari indikator Jumlah Keluarga Miskin yang diberdayakan di desa prioritas sebanyak 53 KK. Pemberdayaan Keluarga Miskin di desa prioritas sebanyak 53 KK ini dimulai dari tahun 2015 sampai 2017, hal ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

MISI IV : OPTIMALISASI HASIL PEMBANGUNAN DAN SARANA PRASARANA DAERAH DALAM MENUNJANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN, KESESUAIAN TATA RUANG DAN MITIGASI BENCANA

Sasaran 1

Meningkatnya kualitas lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Persentase sampah Kota Pariaman yang terkelola dengan baik	58%	58.0%	100%	100%	105%
2	Jumlah RTH Publik Kota Pariaman	14 kawasan	14 kawasan	100%	100%	100%
3	Jumlah jenis pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan	3 jenis	3 jenis	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian				100%	100%	102%

Dari tabel sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di atas, terdapat 3 indikator kinerja dengan rata-rata-capaian 100%, capaian 2016 juga 100%, sedangkan dibandingkan tahun 2015 rata-rata capaiannya sebesar 102%.

1. Persentase sampah Kota Pariaman yang terkelola dengan baik

Perhitungan penanganan sampah dihitung berdasarkan volume sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Tungkal Selatan per hari dalam satuan meter kubik di bagi volume produksi sampah per hari dalam meter kubik ditampilkan dalam jumlah persen. Nilai tersebut kemudian di tambahkan dengan hasil perhitungan dari penanganan sampah yang diperoleh dari 3 R (reuse, recycle dan reduce) yang dilakukan dari sektor formal dan non formal. Sektor formal dari proses pemilahan sampah yang dilakukan oleh institusi yaitu bank sampah yang ada di Sekolah Adiwiyata dan bank sampah masyarakat, sedangkan yang non formal dilakukan oleh lapak-lapak pemulung dan pengumpul barang bekas dalam skala yang lebih besar. Volume sampah di Kota Pariaman berjumlah 173.464 m³ sedangkan yang terangkut sebanyak 98 m³.

$$\frac{98 \text{ m}^3}{173,464 \text{ m}^3} \times 100\% = 58 \%$$

Sehingga dari target 58% sampah yang terkelola dengan capaian 100% di tahun 2017, capaian ini juga sama dengan tahun 2016 dan 2015.

Untuk pengelolaan sampah perlu didukung dengan sarana dan prasarana persampahan yang memadai. Pemerintah Kota Pariaman menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 3R yang dikelola hanya 2 kawasan yaitu TPST Tungkal Selatan dan TPST Jati Mudik.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis bank sampah dilakukan pembinaan kepada masyarakat dengan membentuk kelompok masyarakat pengelolaan sampah berbasis Bank Sampah.

Tahun 2017 terbentuk 5 unit bank sampah, yaitu Desa Balai Kurai Taji, Desa Kampung Kandang, Desa Cubadak Mentawai, Desa Talago Sariak, dan Desa Rawang.

Sampai tahun 2017 sudah terbentuk 16 kelompok masyarakat pengelolaan sampah berbasis Bank Sampah, yaitu tahun 2017 terbentuk 5 kelompok, Tahun 2016 terbentuk 4 kelompok, Tahun 2015 juga 4 kelompok, sedangkan tahun 2014 terbentuk 3 kelompok.

2. Jumlah RTH Publik Kota Pariaman

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan hal yang wajib dimiliki oleh sebuah kota, jumlahnya mencapai 30% dari total luas wilayah sebuah kota. Ruang terbuka hijau terbagi atas RTH Publik dan RTH privat, RTH publik sebagian besar dikelola oleh pemerintah yang terdiri dari taman-taman yang berada di median jalan, kawasan wisata dan area publik lainnya. Dinas lingkungan hidup mempunyai kewajiban untuk memelihara RTH yang berada di kawasan publik. Perawatan atau pemeliharaan yang dilakukan meliputi kegiatan penyiangan gulma, pemotongan rumput, penyiraman, penyiangan tanaman yang mati, pemupukan, pembumbunan tanah, pemangkasan tanaman hias.

Jumlah RTH Publik Kota Pariaman yang ditargetkan 14 kawasan telah terealisasi 14 kawasan (100%) yaitu :

1. Taman Lapangan Merdeka
2. Taman Nan Tongga
3. Taman Muaro
4. Taman Anas Malik
5. Taman Pantai Kata
6. Pantai Gandoriah
7. Taman Pendopo Wali Kota
8. Taman Rumah Dinas Wakil Wali Kota
9. Balaikota
10. Rumah Tabuik Pasa
11. Terminal Jati
12. Median Jalan
13. Rumah Tabuik Subarang
14. Pulau Angso

Hal ini sama dengan tahun 2016, Sedangkan tahun 2015 hanya ada 13 kawasan.

3. Jumlah Jenis Pemantauan Kualitas Lingkungan yang Dilakukan

Pemantauan kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh instansi lingkungan hidup, karena merupakan salah satu upaya untuk mengetahui kualitas lingkungan

hidup di suatu daerah. Hasil pemantauan kualitas lingkungan ini nantinya akan digunakan sebagai data dasar dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, penyusunan Dokumen Informasi Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), dan dokumen Isian Non Fisik Adipura.

Pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan untuk :

- 1) kualitas air;
- 2) kualitas udara;
- 3) kualitas tanah dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) *Pemantauan kualitas air*, dilakukan pada air sungai, air talao, air laut dan kualitas air tanah atau air sumur gali.

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan untuk 3 tiga sungai utama yaitu :

- a. Batang Mangau;
- b. Batang Pariaman; dan
- c. Batang Manggung.

Sampel kualitas air yang dipantau diambil dari sungai bagian hulu, tengah dan hilir.

Talao diambil dari 3 lokasi, yaitu:

- a. Talao Pauh;
- b. Talao Naras; dan
- c. Talao Karan Aur.

Sedangkan untuk kualitas air laut dilakukan di 100 m dari daratan atau pantai.

Air sumur diambil dari air sumur penduduk.

Pemantauan kualitas air telah terlaksana seluruhnya sesuai dengan target yang direncanakan.

Pemantauan Kualitas Air (Sumber Air Permukaan)

- Pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan UPTD. Laboratorium Lingkungan DLH Kota Pariaman, dengan tahapan pelaksanaan: pengambilan sampel dilapangan dan pengujian/ analisa laboratorium serta evaluasi hasil analisa laboratorium. Pengujian kualitas air dilaksanakan 2 x periode pengambilan (kemarau dan hujan), dimana lokasi pengambilan sampel tersebut adalah :

Batang Pariaman (3 titik : hulu, rentang dan hilir)
Batang Pampan (3 titik : hulu, rentang dan hilir)
Batang Mangau (3 titik : hulu, rentang dan hilir)
Batang Manggung (3 titik : hulu, rentang dan hilir)
Laut Sunur (2 titik : jarak 50 m dan 100 m dari bibir pantai)
Laut Gandoriah (2 titik : jarak 50 m dan 100 m dari bibir pantai)
Laut Padang Birik-Birik (2 titik : jarak 50 m dan 100 m dari bibir pantai)
Talao di Karan Aur (1 titik)
Talao di Pauh (1 titik)
Talao di Manggung (1 titik)
Talao di Marunggi (1 titik)
Talao di Ampalu (1 titik)
Talao di Padang Birik-Birik (1 titik)

Pelaksanaan kegiatan telah terealisasi 100% (seratus persen), dimana hasil pemantauan kualitas air tersebut diketahui mayoritas parameter yang melebihi baku mutu adalah parameter biologi (parameter yang terkait dengan kandungan mikro organisme seperti : bakteri).

- 2) Pemantauan kualitas udara dibagi menjadi 2 yaitu:
- a. udara emisi; dan
 - b. udara ambien.

Untuk kualitas udara emisi diambil pada 9 (sembilan) titik dari lokasi perumahan, industri, perkantoran, lalu lintas ramai, dan terminal.

Sedangkan untuk udara emisi rencana dilakukan pada cerobong asap incenerator RSUD tidak dapat dilaksanakan karena incenerator mengalami kerusakan.

Selama tahun 2017 Pos Penyelesaian Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) telah menerima dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat sebanyak 2 (Dua) kasus, yaitu :

Pengaduan masyarakat mengenai usaha Ayam Potong di Kelurahan Pasir Kec. Pariaman Tengah, telah ditindak lanjuti

dilakukan mediasi intern dan pelaku usaha berjanji membuang limbah cair nya ke saluran pembuangan langsung.

Kasus Pengaduan masyarakat di Desa Kajai Kec Pariaman Timur yaitu mengenai pembakaran peleburan emas, setelah ditindak lanjuti pelaku usaha akan menghentikan kegiatan tersebut.

Pemantauan kualitas udara telah terlaksana seluruhnya sesuai dengan target yang direncanakan.

Pemantauan Kualitas Udara

Pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumatera Barat, dengan tahapan pelaksanaan: pengambilan sampel dilapangan dan pengujian/ analisa laboratorium serta evaluasi hasil analisa laboratorium. Hasil pemantauan kualitas udara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pemantauan kualitas udara emisi cerobong incenerator RSUD Pariaman tidak dapat dilaksanakan karena tidak beroperasionalnya incinerator RSUD tersebut karena patah.
- 2) Hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan pada 9 lokasi (Kantor Camat Pariaman Utara, Simpang Apar, TPA Tungkal Selatan, Pasar pariaman, Simpang Tabuik, Simpang DLLAJ, Simpang Lapai dan Simpang Jagung) diketahui mayoritas parameter yang melebihi baku mutu adalah TSP (debu) dan kebisingan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh :

Emisi gas buang dan suara knalpot dari kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4;

Masih rendahnya kualitas infrastruktur seperti jalan yang menyebabkan emisi debu;

Aktivitas manusia dilingkungan pemukiman.

- 3) Pemantauan kualitas tanah akibat biomassa dilakukan pada 8 (delapan) titik pantau yang terletak di 4 kecamatan di Kota Pariaman yang lokasinya dipilih berdasarkan jenis pemanfaatan tanah yaitu untuk pemakaian ladang dan persawahan.

Dari keseluruhan 3 (tiga) target yang direncanakan untuk dilakukan pemantauan semuanya terlaksana sebesar 100%.

Kualitas lingkungan juga dipengaruhi oleh kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu pemantauan lingkungan juga dilakukan terhadap unit usaha yang direkomendasikan kelayakan lingkungannya.

Pemantauan Kualitas Tanah

Pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan Laboratorium Ilmu Tanah Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas, dengan tahapan pelaksanaan: pengambilan sampel dilapangan dan pengujian/ analisa laboratorium serta evaluasi hasil analisa laboratorium. 4 (empat) sasaran objek pengambilan sampel kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa yaitu : Desa Cimparuh, Desa Jati Mudiak, Desa Jati Hilir dan Desa Pauh Timur. Masing-masing sasaran objek tersebut akan diambil 2 (dua) sampel yang memiliki kategori sumber pencemar, yaitu: kawasan pertanian dan kawasan perkebunan.

Pelaksanaan kegiatan telah terealisasi 100% (seratus persen) dimana hasil pemantauan kualitas tanah untuk produksi biomassa tersebut dapat disimpulkan bahwa :

Hasil uji tanah untuk produksi biomassa pada 4 (empat) objek sasaran masih dibawah ambang kritis;

Secara umum lahan ini bisa digunakan untuk usaha pertanian tanaman semusim terutama tanaman padi;

Produktifitas lahan untuk tanaman lahan kering bisa ditingkatkan dengan input tertentu, terutama memberi bahan organik (BO) secara regular ke dalam tanah disamping pupuk buatan;

Namun yang menjadi masalah pada 4 objek sasaran tersebut yaitu derajat pelolosan air (permeabilitas) yang tinggi, hal ini disebabkan oleh tekstur tanah yang termasuk kelas pasir (kasar) yang merupakan kondisi alami lahan pada daerah yang berada di dekat pantai;

Sasaran 2

Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun		
						2017	2016	2015
1	Persentase kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	100	%	100	%	100%	100%	100%
2	Jumlah Kasus kebakaran yang tertanggulangi	100	%	234	%	234%		
	Rata-rata capaian					167%	100%	100%

Dari sasaran Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2017 terdapat indikator dengan rata-rata capaian 167%, sedangkan tahun 2016 hanya 1 indikator kinerja, dengan capaian rata-rata 100% .

1. Indikator kinerja Persentase kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Indikator ini didukung dengan kegiatan:

- ✓ Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam, 2 (dua) jenis sarana adalah Peralatan keamanan dan perlindungan. Berupa BM Life Jacket dan BM Velbed dan perahu karet. Penambahan sarana prasarana tersebut diharapkan dapat membantu petugas dalam pelaksanaan tugas untuk mencegah bertambahnya jumlah korban bencana di pantai Pariaman. Mengingat Kota Pariaman adalah Kota Wisata bahari yang banyak dikunjungi wisatawan.
- ✓ melaksanakan Pendidikan dan pelatihan tukang bangunan, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat atau tukang pemula memahami tentang cara pembangunan tempat tinggal yang ramah gempa sebanyak 90 orang, teori diadakan di Hotel Al Madinah untuk Praktek diadakan di 3 (tiga) Desa/Kelurahan yaitu di Desa Batang Kabuang, Kelurahan Karan Aur dan Desa Mangguang. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya pengurangan korban bencana gempa di Kota Pariaman.

- ✓ Melaksanakan pelatihan konseling traumatik healing bagi tenaga relawan Desa/Kelurahan siaga bencana sebanyak 240 peserta. Kegiatan tersebut diadakan di Desa/Kelurahan : Pungguang Ladiang, Taluak, Karan Aur, Kampung Pondok, Cimparuah, Pauh Barat, Ampalu, Padang Birik-birik, Naras I, Balai Naras, Cubadak Air, dan Kampuang Gadang. Kegiatan tersebut dapat memberikan ilmu bagi relawan tentang penanganan korban bencana yang mengalami trauma.
- ✓ Pengadaan atribut Tim Reaksi Cepat (TRC), kegiatan tersebut mengupayakan atribut TRC yang mana pada Tahun 2017 adanya penambahan jenis atribut TRC sebanyak 11 jenis atribut diantaranya ; Sepatu PDL, Hand Mix, Kaca mata lapangan, tas ransel, celana pantai, Dry bag water proof, Pakaian PDL, pakaian olahraga, sepatu olahraga, Locker penyimpanan, BM pengadaan Radio Rig dan kelengkapannya dan BM pengadaan Radio Handy Talky Waterproof. Kelengkapan atribut tersebut diharapkan dapat membantu TRC dalam menjalankan operasional penanggulangan bencana.
- ✓ Melaksanakan pelatihan dan pendidikan Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dilaksanakan sebanyak 36 orang kegiatan tersebut melatih ketangguhan TRC dalam penanggulangan bencana.
- ✓ Operasional penanggulangan bencana selalu dilaksanakan secara kontinue dan rutin, baik di Pantai maupun waktu terjadinya bencana alam lainnya di Kota Pariaman selama 1 (satu) tahun. Dengan adanya operasional penanggulangan bencana ini diharapkan adanya penanganan dini dari bencana alam sehingga dampak atau korban bencana dapat diminimalisir.
- ✓ Melakukan Koordinasi penanggulangan bencana Kota Pariaman yang dilakukan dengan stackholder dan seluruh muspida yang terkait di Kota Pariaman dengan jumlah pertemuan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dalam setahun, dengan diadakannya rapat koordinasi kebencanaan diharapkan Kota Pariaman menjadi Kota Siaga Bencana yang mampu meminimasir korban dan dampak bencana yang mungkin terjadi.

- ✓ Melaksanakan pelatihan pengurangan resiko bencana terpadu bagi Desa/Kelurahan. Jumlah Desa/Kelurahan siaga bencana yang mendapatkan peningkatan pelatihan penanggulangan bencana Tahun 2017 adalah sebanyak 19 Desa/Kelurahan kegiatan tersebut bertujuan untuk membina Desa/Kelurahan siaga bencana yang telah terbentuk. Dengan adanya pelatihan secara kontinoe diharapkan masyarakat menjadi Desa/Kelurahan yang siaga bencana sehingga korban dampak bencana dapat diminimalisir.
- ✓ Menyediakan anggaran Operasional gudang logistik dan peralatan bencana yang harus ditata dan disimpan dengan baik, sehingga saat adanya penanganan keadaan darurat dapat dipergunakan dengan optimal.
- ✓ Namun penataan barang logistik belum optimal hal tersebut karena kurangnya sumber daya manusia yang melaksanakan tugas sebagai pendata, pencatat, sekaligus melakukan pengecekan barang secara rutin guna mengetahui apakah ada barang yang kadaluwarsa atau barang yang sudah tidak layak untuk dibagikan ke masyarakat ..
- ✓ Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan penanganan korban bencana alam yang dilaksanakan di sekolah siaga bencana di Kota Pariaman, pelatihan dan pendidikan yang secara terus-menerus dilakukan dengan tujuan siswa/i dapat melaksanakan pertolongan pada dirinya dan orang terdekat bahkan pada masyarakat yang mengalami bencana, untuk Tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) SLTA yang diberi pelatihan dan pendidikan tersebut adalah MAN Padusunan, SMA Global di Desa Ampalu, SMK Karya di Desa Toboh Palabah, SMK I di Desa Air Santok, SMK 2 Desa Kampung Baru, SMK 3 di Desa Mangguang dan SMK 4 Desa Taluak. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar siswa terlatih dalam penanganan korban bencana.
- ✓ Peningkatan peran serta masyarakat dan relawan dalam pengurangan resiko bencana. Untuk melihat adanya peningkatan dalam pengurangan resiko bencana perlu kiranya diadakan Jambore pengurangan resiko bencana, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk

memantapkan pelatihan yang telah dilaksanakan di Desa/kelurahan. Jumlah peserta Jambore adalah 20 orang yang diambil dari perwakilan Desa/Kelurahan di Kota Pariaman. Tingkat keberhasilan kegiatan ini adalah 100 %.

- ✓ Mengadakan dan melakukan perawatan peralatan penanggulangan bencana Tahun 2017 sebanyak 6 jenis diantaranya : Radio komunikasi, Plang penunjuk arah evakuasi, peta jalur evakuasi, plang daerah rawan bencana, komputer server DVB dan peralatan peringatan dini bahaya sunami. Tingkat keberhasilan kegiatan ini adalah 100 %.
- ✓ Melaksanakan kegiatan operasional pencegahan dan penanggulangan bencana, berupa kesiapsiagaan bencana baik ketersediaan logistik maupun ketersediaan alat penanggulangan bencana
- ✓ Sedangkan untuk peningkatan sDm tanggap darurat bencana dilakukan pelatihan Pelatihan pemantapan Satuan Tugas Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang bertujuan untuk menambah pengetahuan TAGANA dalam penanggulangan bencana, serta meningkatkan sumber daya manusia dalam menunjang implementasi penanggulangan bencana dalam berbasiskan masyarakat.

2. Jumlah kasus kebakaran yang tertanggulangi

Pengukuran indikator ini dapat dihitung dengan menganalisa kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. penghitungan diperoleh dari : “ *Jumlah Pelaksanaan penanggulangan kebakaran*”

Pada tahun 2017 output Jumlah Pelaksanaan penanggulangan kebakaran terletak pada kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan melakukan pencegahan, penanggulangan bencana kebakaran dan beberapa kegiatan non kebakaran lainnya, namun karena prioritas utama adalah bencana kebakaran maka target dari kegiatan ini adalah Jumlah Pelaksanaan penanggulangan kebakaran dengan jumlah 100 kejadian. Dari kegiatan tersebut didapatkan hasil (output) sebesar 234 kejadian penanggulangan bencana kebakaran.

Sasaran 3

Meningkatnya kapasitas infrastruktur permukiman dan perkotaan berbasis tata ruang untuk menunjang aktivitas masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun		
				2017	2016	2015
1	Jumlah infrastruktur pendukung aktifitas pasar dan kepariwisataan sebagai penunjang ekonomi masyarakat	15 jenis	15 jenis	100%	100%	100%
2	Persentase cakupan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	20%	20%	100%	100%	100%
3	Persentase pengurangan luas genangan air di Kota Pariaman	25%	98%	392%	100%	100%
4	jumlah regulasi tentang rancangan detail tata ruang kota khususnya pada kawasan-kawasan strategis	1 Perda	1 Perda	100%	100%	100%
	Rata-rata capaian			173%	100%	100%

Sasaran Meningkatkan kapasitas infrastruktur permukiman dan perkotaan berbasis tata ruang untuk menunjang aktivitas masyarakat di atas, tahun 2017 terdapat 4 indikator dengan rata-rata capaian 173%, sedangkan tahun 2016 dan tahun 2015 rata-rata capaian sebesar 100%.

1. Jumlah infrastruktur pendukung aktifitas pasar dan kepariwisataan sebagai penunjang ekonomi masyarakat ada 11 jenis, yaitu:

- 1) Perencanaan Pembangunan Jalan
 - a. Perencanaan Trotoar Simp. SDN 08 Toboh Palabah - Simp Lapangan Futsal Lambang (2,858 Km)
 - b. Perencanaan Jalan Simp - Apar - Padang Kajai (1.910)
 - c. Perencanaan Akses Kawasan Jembatan Benteng Pelataran
- 2) Pembangunan Jalan berupa peningkatan:
 - Jln. Jembatan Manggung – Penangkaran Penyu 0,800(Km);
 - Jln. Sp. Toboh palabah- Simpang jagung (1 Km);
 - Jln. Jembatan Sunur- pantai kata (3.0 Km);
 - Pembangunan trotoar Simpang Empat Pasar Pariaman – Simpang kampung Kaliang Syeh M.Jamil (0.950 Km);

- Pembangunan trotoar Simpang Taratak – Simpang Ujung Batung (1 Km)
- 3) Pembangunan Jembatan Pembangunan Oprit Jembatan Surau Kasiak ,
 - 4) Pelaksanaan Pengadaan Tanah:
 - a. Pengadaan Tanah Desa Naras I Pariaman Utara (37 M2) an. SUDIRMAN
 - b. Pengadaan Tanah Desa Naras I Pariaman Utara (42 M2) an. MASWARDI
 - c. Pengadaan Tanah Desa Balai Naras I (33 M2) sesuai Surat Ukur Pemecahan dari SHM No. 17 tanggal 10 Februari 2017
 - 5) Peningkatan Jalan terbagi dalam 2 (dua) Paket;
 - a. Paket I, Peningkatan Jalan Simp Padusunan - Padang Kajai (4,336 Km) ;dan
 - b. Paket II Peningkatan struktur jalan (Hotmix) simp Kp Pondok - simp IV Jati By Pass, namun tidak terealisasi karena usulan kegiatan tersebut pernah dibatalkan, tetapi muncul kembali pada APBD-P tahun anggaran .
 - 6) Kegiatan Pengembangan daerah tujuan wisata
 - a. BM Lanjutan tempat parkir Pantai Gandorih
 - b. Perencanaan perluasan tempat parkir Pantai Gandorih
 - c. Perencanaan Pagar Taman Anas Malik
 - d. Lanjutan Pembangunan area/kawasan MTQ
 - e. Pengawasan pembangunan area/kawasan MTQ
 - f. Pembuatan Plang merk Pulau Angso Duo
 - 7) kegiatan Pembangunan Dermaga Apung di pantai Gandorih
 - 8) Kegiatan Pembangunan Pengembangan Kawasan Pulau Tengah
 - 9) Kegiatan Operasional Objek Wisata Pantai dan Pulau Angso Duo yaitu Pembangunan WC objek Wisata Pantai di Pantai Kata
 - 10)Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk pekerjaan yang selesai dalam pelaksanaannya yaitu :
 - a. Perencanaan Pembangunan PasarPariaman.
 - b. UKL/UPL PasarPariaman;

11) Kegiatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan terdiri dari:

- a. Perencanaan periodik jalan paket 1
- b. Perencanaan periodik jalan paket 2
- c. Perencanaan Rehabilitasi Trotoar.

12) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan terdiri dari:

- a. Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi terdiri dari Stamper, Jack Hammer/Breaker, Compressor, Generator Set, dan Asphalt Cutter.
- b. Rehab Trotoar Simp Tabuik - Simp. Kampung Pondok
- c. Rehab Trotoar Depan Kantor Balai Kota Pariaman (Jln Imam Bonjol)
- d. Pengecoran Bahu Jalan Simp. Mushola Hidayah Kasiak Putih- Simp Lapau Baruah
- e. Pengecoran Bahu Jalan Simp Jembatan Sunur - Pantai Kata (Segmen Akhir)
- f. Pengecoran Bahu Jalan Simp IV Marabau - Simp IV Palak Aneh (Lanjutan).

13) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan dalam jembatan sungai pasak

14) Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan yang tersebar di 4 kecamatan :

15) Peningkatan sarana dan prasarana drainase meliputi pembangunan drainase lingkungan perumahan yang tersebar di 4 kecamatan .

Sedangkan pembangunan Masjid Terapung batal dilaksanakan karena Amdal dari pembangunan Masjid Terapung belum selesai.

2. Presentase cakupan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat didukung dengan:

Pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum Water Tread Plane (SPAM WTP) Cubadak Mentawai sampai saat ini telah melayani 620 sambungan rumah dengan kapasitas 10 m³ per detik . sedangkan untuk sanitasi berbasis masyarakat telah dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi berupa IPAL KOMUNAL bersumber dari dana DAK dan IDB yang berlokasi di Taratak 2 lokasi, Pondok dua, Kampung

Pondok, Kampung Baru Padusunan 2, Marunggi 2, Pakasai, Cubadak Mentawai, Kajai, Palak Aneh.

3. Prosentase pengurangan luas genangan air di Kota Pariaman dengan target didukung dengan kegiatan :
 - 1) Rehab/pemeliharaan saluran drainase lingkung
 - 2) Rehab/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
 - 3) Pembangunan saluran drainase gorong-gorong yang berlokasi di;
 - a. Pembangunan Drainase Hulu Lapai
 - b. Pembangunan Drainase Banda Peti Sunur
 - c. Pembangunan Ground Seal Batang Air Pampan KpPondok
 - d. Pengawasan Pembangunan Ground Seal Batang Air Pampan Kp. Pondok
 - e. Pembangunan Bronjong Padang Birik-birik
 - f. Pembangunan drainase Batang Kapau (Perum Padusunan Lestari)
 - g. Pembangunan Taludsamping Mesjid Badano
 - 4) Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 - a. Belanja Modal Peningkatan Jaringan irigasi sekunder DI Air Santok (Air Santok – Jati Mudik, Jati Hilir – Sei Pasak)
 - b. Belanja Modal Peningkatan Jaringan Irigasi sekunder DI Pakasai IV Angkek.
 - c. Rehab / Peningkatan Jaringan Irigasi sekunder DI Sungai Rambai
 - d. Peningkatan Jar. Irigasi Sekunder DI Ampang Bakuang
 - e. Peningkatan Jar. Irigasi Sekunder DI Banda Subarang
 - f. Peningkatan Bendungan dan Pengamanan Bendung DI Talang Kuning
 - 5) Pelaksanaan normalisasi saluran sungai.
 - a. Normalisasi Saluran Sungai Batang Jirak (Ljtn)
 - b. Normalisasi Saluran Batang Manggung (Tungkal Selatan)
 - c. Normalisasi Saluran Sungai Hulu Sikijang (BalaiNaras)
 - d. Normalisasi Saluran Sungai Batang Mangor (Kp.Apar Marunggi)
 - e. Normalisasi Saluran Sungai Batang Pariaman (Surau Gadang Tonggak - Mesjid Raya Ds Kp. Baru)

- f. BM Pemasangan Tie Rod dan Tiang Pancang Sheet Pile Saluran Batang Piaman
- g. Pengamanan Abrasi Pantai Gandoriah
- 6) Pembangunan jaringan rawa di Naras
- 7) Perencanaan dan pengembangan teknis bidang PSDA berupa Perencanaan Pendestrian Muaro Batang Piaman.
- 8) Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir.
- 9) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
 - a. Perencanaan Bendungan DI TalangKuning
 - b. Perencanaan rehab/peningkatan Jar Irigasi thn 2018
 - c. Peningkatan Jaringan Irigasi Kp. Sato DesaPauh Barat
 - d. Peningkatan Jaringan Irigasi Dusun Bulak'an Kp. Baru Padusunan
 - e. Peningkatan saluran irigasi pembuang desaSimp. Apar.
- 4. Jumlah regulasi tentang rancangan detail tata ruang kota khususnya pada kawasan-kawasan strategis, berupa Penyusunan Revisi RDTR Kota Pariaman

Sasaran 4

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi serta informatika dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Tahun		
						2017	2016	2015
1	Jumlah sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang berfungsi secara optimal	3	jenis	3	jenis	100%	100%	100%
2	Jumlah penambahan sarana dan prasarana pendukung keselamatan jalan raya	5	jenis	5	jenis	100%	200%	-
	Rata-rata capaian					100%	100%	33%

Dari sasaran Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi serta informatika dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat diatas tahun 2017 terdapat 2 indikator rata-rata capaian

100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dengan rata-rata capaian 100% sedangkan dari tahun 2015 ke 2016 naik sebesar sebesar 67%.

1. Jumlah sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang berfungsi secara optimal, ditargetkan 3 jenis, realisasi 3 jenis, capaian kinerja 100%

Indikator ini direalisasikan melalui Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kegiatan operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan serta Pengaturan Trayek, Perizinan Angkutan Laut dan Kapal Wisata serta Program Peningkatan Pelayanan Parkir Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Parkir.

Capaian indikator kinerja dengan tolak ukur sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kegiatan operasional Unit Pengujian Kendaraan Bermotor mengenai pelayanan terhadap uji KIR Kendaraan dan terdapat pungutan retribusi. Ketersediaan alat uji terdiri dari : alat uji utama , (brake tester dan axle meter, gas analyzer, diesel smoke tester dan headligh tester) dan alat uji pendukung (meteran, alat ukur ketebalan kaca, Kompresor udara, Generator set, Peralatan bantu berupa Dongkrak Palu Pengungkit Senter)

Dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor didukung dengan 1 (satu) tenaga penguji pelaksana.

- 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan serta Pengaturan Trayek, Perizinan Angkutan Laut dan Kapal Wisata .

Berdasarkan Undang - Undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dilakukan melaksanakan Monitoring dan Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan dan Pas Kecil untuk Kapal-kapal Nelayan dan Kapal Wisata. Hal ini sebagai upaya menjaga keselamatan Pelayaran dan memberikan perlindungan hukum bagi kapal yang berlayar. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan

kesadaran pengusaha kapal dan standarisasi kapal wisata dalam mewujudkan keselamatan dan kenyamanan pelayaran di laut.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan :

a. Monitoring :

- Pengecekan secara berkala kondisi kapal
- Pengawasan terhadap kapal yang belum dan sudah memiliki izin yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran

b. Evaluasi :

Mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan sehingga Izin kapal dapat berjalan dengan baik dan mengambil langkah-langkah yang baik.

c. Pelaporan :

Membuat Laporan rutin atas Monitoring yang telah dilakukan.

Permasalahan :

- Dari 37 unit kapal wisata yang beroperasi di Pantai Gandorih terdapat 7 unit kapal yang belum memiliki izin.
- Masih terdapat 12 unit kapal yang telah mempunyai izin, namun melakukan aktivitas sandaran kapal di lokasi illegal sehingga capaian retribusi sandaran kapal tidak bisa optimal.

Solusi :

Perlu dilakukan koordinasi antara SKPD dan Stakeholder terkait (Dishub, Disbudpar, Kamla, Satpol PP, Pol Air) untuk perumusan penyelesaian masalah serta tindakan tegas terhadap operasional kapal yang tidak sesuai ketentuan berlaku.

3) Program Peningkatan Pelayanan Parkir Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Parkir. kegiatan ini mengenai pelayanan parkir di Kota Pariaman yang meliputi Tempat khusus Parkir di yang berlokasi di objek wisata: Muaro, Pantai Gandorih dan Taman Anas Malik dan Parkir di Tepi Jalan Umum

4) Program Peningkatan Pelayanan Parkir Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Parkir

Pada kegiatan pengelolaan dan penataan parkir ini telah dilakukan penataan parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus.

Adapun lokasi parkir di tepi jalan umum antara lain :

- a. Lapangan Merdeka untuk parkir Roda 4
- b. Jalan Bagindo Aziz Chan untuk parkir Roda 2
- c. Jalan St Syahrir untuk parkir roda 2
- d. Pujasera untuk parkir roda 2
- e. Balai Kurai Taji untuk parkir roda 2 dan roda 4

Sedangkan lokasi parkir untuk tempat parkir khusus adalah sebagai berikut :

- a. Muara untuk parkir Roda 2 dan roda 4
- b. Gandoriah untuk parkir roda 2 dan roda 4
- c. Gandoriah samping Mesjid Nurul Bahari untuk parkir roda 4
- d. Taman Anas Malik untuk parkir roda 2 dan roda 4
- e. Pantai Kata untuk parkir roda 2 dan roda 4

Permasalahan yaitu berhubungan luasnya lahan parkir di beberapa titik pemungutan retribusi di lokasi objek parkir yang luas sehingga banyak masyarakat yang melakukan pemungutan liar, dan lokasi objek parkir banyak dipakai oleh pedagang untuk berjualan seperti lokasi objek muara, pantai Gandoriah dan taman Anas Malik, serta di Jalan Sutan Syahrir Pasar Pariaman.

Solusinya yaitu pada tahun 2018 untuk menghindari tidak terjadi pungli retribusi parkir, akan dilakukan koordinasi antara Dinas Perhubungan, tokoh masyarakat dan instansi terkait lainnya dalam penataan pengelolaan parkir.

2. Jumlah penambahan sarana dan prasarana pendukung keselamatan jalan raya, ditargetkan 5 jenis, realisasi 5 jenis, capaian kinerja 100 %

Jumlah penambahan sarana dan prasarana pendukung keselamatan jalan raya terealisasi melalui Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan Marka Jalan, Pengadaan CCTV, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan Pengadaan Pita Penggadu, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan traffic Light dan Kelengkapannya.

Adapun lokasi pemasangan pita pengaduh sebanyak 980 m² dengan rincian sebagai berikut :

NO	LOkasi	Volume (m ²)
1	Mesjid Al MukminSunur	54,6
2	Tapus	54,6
3	Belakang Kantor PU Kota Pariaman	27,3
4	Mesjid Istiqomah Adam Sorin (jl.Baru)	54,6
5	SD N 17 KpBaru	50,4
6	PasirSunur	54,6
7	Mushala Lereng Sunur	54,6
8	SMA 2 Pariaman	50,4
9	SMA 1 Pariaman	33,6
10	TK KartikaKpBaru	33,6
11	SMK 2 Pariaman (Perlintasan rel KA)	37,8
12	Simpang Kp. Kaliang Pariaman	33,6
13	SD 04 BatangTajongkek	50,4
14	Marabau (perlintasan rel KA)	33,6
15	Depan Pendopo Wakil Walikota Pariaman	50,4
16	SD IT Mutiara Ujung Batung	54,6
17	SMA 3 Pariaman	50,4
18	SP 3 Marunggi	50,4
19	TK Pembina (Pondok Duo)	50,4
20	PerlintasanRel KA (Kp.Baru)	37,8
21	Perlintasan Rel KA (Lohong)	33,6
22	SD 13 Lohong	33,6

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pita Pengaduh 2 lokasi Pariaman Tengah dan Pariaman Selatan
- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal.
- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan Marka Jalan.
- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan CCTV.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
Kegiatan pengadaan traffic Light dan kelengkapannya, Warning light dan Voice Announcer.

Disamping itu juga ada sarana dan prasarana pendukung keselamatan jalan raya yang dipelihara terealisasi melalui :

1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan berupa :

- Rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara 65 unit
- RPPJ yang dipelihara 10 unit
- Papan nama yang dipelihara 65 unit
- Deliniator yang dipelihara 100 unit

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan Pemeliharaan Halte

Jumlah halte yang dipelihara sebanyak 18 unit. Pemeliharaan rutin halte dilaksanakan sebagai bagian target capaian kinerja sesuai dengan RPJMD Kota Pariaman dan Renstra.

3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan Pemeliharaan Traffic light

Pemeliharaan rutin / berkala traffic light sangat penting dilakukan disebabkan kan traffic light merupakan sarana yang vital untuk mengatur kendaraan di persimpangan jalan dan dapat mengurangi terjadi kecelakaan di persimpangan. Pada saat sekarang Kota Pariaman ada 10 titik persimpangan traffic light dan 1 titik Warning Light yang hidup dan perlu perawatan dengan lokasi sebagai berikut:

- a. Simpang Apar kec.Pariaman Utara Kota Pariaman (simpang empat)
- b. Simpang Kampung Pondok kec.Pariaman Tengah (simpang empat)
- c. Simpang Tabuik kec.Pariaman Tengah (simpang empat)
- d. Simpang sianik kec. Pariaman tengah (simpang empat)
- e. Simpang Alai Gelombang Kec.Pariaman Tengah (simpang tiga)
- f. Simpang LLAJ Lama Kec.Pariaman Tengah (simpang tiga)

- g. Simpang lapai Kec. Pariaman Tengah (simpang tiga)
 - h. Simpang Jagung Kec. Pariaman Selatan (simpang tiga)
 - i. Simpang Basoka Kec. Pariaman Selatan (simpang empat)
 - j. Simpang Jati Kec. Pariaman Tengah (simpang empat)
 - k. Lokasi ZOSS kp Jawa
- 4) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kegiatan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Kegiatan Pemeliharaan Alat PKB Meliputi Pemeliharaan Alat-alat Pengujian Kendaraan Bermotor seperti perawatan rutin dan sensor adjusment, kalibrasi, perbaikan software.
- Terdapat 4 alat PKB yang dipelihara yaitu :
- Brake Tester & Axle Load Meter
 - Gas Analyzer
 - Diesel Smoke Tester
 - Headlight Tester.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran pendapatan sebelum perubahan APBD tahun 2017 adalah Rp. 645.650.815.874,47
2. Jumlah Anggaran pendapatan setelah perubahan APBD tahun 2017 adalah Rp.659.243.244.334,47
3. Jumlah Anggaran belanja sebelum perubahan APBD tahun 2017 adalah Rp. 704.005.568.594,47
4. Jumlah Anggaran belanja setelah perubahan APBD tahun 2017 adalah Rp. 725.250.218.005,47
5. Penerimaan pembiayaan sebelum perubahan APBD tahun 2017 Rp. 58.354.752.720,00
6. Penerimaan pembiayaan setelah perubahan tahun APBD 2017 Rp. 77.189.993.671.
7. Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan APBD tahun 2017 Rp. 0.

8. Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan APBD tahun 2017
Rp.11.183.000.000,-

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2015 s/d 2017.

TAHUN	PAD	NAIK/TURUN	PENDAPATAN DAERAH	PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)
		(%)		
2014	20,586,706,403.00	0,002 (turun)	57,068,171,408.00	3.61
2015	27,451,580,059.00	33,34 (naik)	584,071,942,218.00	4,7
2016	33,298,813,558.30	21,3 (naik)	599,857,784,593.30	5,5
2017	34,601,974,884.47	3.76 (naik)	659,243,224,334.47	5.2

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran pendapatan pada tahun 2015 sebesar Rp. 27.451.580.059,00 ditahun 2016 anggaran PAD meningkat sebesar 21,3, % dan pada tahun 2017 penganggaran PAD kembali meningkat dari tahun 2016 sebesar 3,91 %. Dengan meningkat dan menurunnya anggaran PAD maka proporsi PAD terhadap pendapatan juga mengalami hal yang sama, pada tahun 2015 proporsi PA sebesar 4,7 % dari total pendapatan, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5.5 % dari tahun 2015 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan 5,2 % dari tahun 2016

10. Dana Perimbangan

TAHUN	DANA PERIMBANGAN	NAIK/TURUN	PENDAPATAN DAERAH	PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)
		(%)		
2014	474.065.998.059,00	11,19 (naik)	570.681.714.908,00	77,27
2015	474.065.998.059,00	0 (tetap)	584.071.942.218,00	81,16
2016	538.808.525.892,00	13,6 % (naik)	599.857.784.593,30	89,82
2017	549.829.481.904,00	2.04 % (naik)	659.243.244.334,47	83,40

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran dana perimbangan ditahun 2015 yaitu sebesar Rp. 474.065.998.059,00 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 13,6 % dari tahun 2015, dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 2,04% dari tahun 2016, Sedangkan proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan pada tahun 2015

sebesar 81,16 % , pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 8,66 % dari tahun 2015, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 6,42 %.

11. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

TAHUN	DANA LAIN-LAIN	NAIK/TURUN	PENDAPATAN DAERAH	PROPORSI TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)
		(%)		
2014	109.143.295.000,00	50,79 (naik)	570.681.714.908,00	19,13
2015	82.554.364.100,00	24 ,36 (turun)	584.071.942.218,00	14,13
2016	27.750.445.143,00	66,38 (turun)	599.857.784.593,30	4,6
2017	85.111.754.450,00	67,39 (naik)	659.243.244.334,47	12,91

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2015 sebesar Rp. 82.554..364.100,00 dan turun sebesar 66,38 % pada tahun 2016,dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan 56,49 % dari tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 85.111.754.450,00 pada tahun 2017. Sedangkan proporsi lain –lain pendapatan daerah terhadap pendapatan pada tahun 2015 sebesar 14,13 %, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 9,53 % dari tahun 2016 dan pada tahun 2017 juga mengalami Kenaikan sebesar 8,31 % dibandingkan tahun 2016.

12. Perkembangan Belanja Daerah

TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	NAIK/TURUN	BELANJA LANGSUNG	NAIK/TURUN
		(%)		(%)
2014	355.627.468.401,33	41,52(naik)	302.806.086.659,00	19.87 (naik)
2015	345.446.153.567,77	2,94 (Turun)	365.309.576.011,00	20,64 (Naik)
2016	356.361.923.262,77	3,1 (naik)	363.841.410.624,80	0,4 (Turun)
2017	336.141.822.534,47	6,01 (turun)	389.108.395.471,00	6,49 (Naik)

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran belanja tidak langsung mengalami peningkatan sebesar 41,52% ditahun 2014 namun mengalami penurunan ditahun 2015 sebesar 2,94% kemudian meningkat lagi sebesar 3,1% ditahun 2016. Sedangkan penganggaran belanja langsung mengalami peningkatan sebesar 19,87%, ditahun 2014 dan sebesar 20,64% ditahun 2015 kemudian mengalami penurunan sekitar 0,4% pada tahun 2016, sedangkan tahun 2017 naik sekitar 6.49%.

13. Kondisi Pembiayaan Daerah

TAHUN	PENERIMAAN	NAIK/TURUN	PENGELUARAN	PROPORSI TERHADAP PEMBIAYAAN
		(%)		(%)
2014	92.862.840.152,33	29,61 (turun)	5.111.000.000,00	5.8
2015	131.198.787.360,77	29,21 (Naik)	7.515.000.000,00	5,93
2016	120.345.549.294,27	8,2 (turun)	0	
2017	77.189.993.671,00	55,90 (turun)	11.183.000.000,	14,48

Dari tabel diatas dapat dilihat penganggaran pembiayaan daerah pada tahun 2014 turun 29,61% dan pada tahun 2015 naik sebesar 29,21% dibandingkan dengan tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan penganggaran sekitar 8,2%. Sedangkan proporsi pengeluaran pembiayaan terhadap pembiayaan pada tahun 2014 sebesar 5,8% , pada tahun 2015 sebesar 5,93% naik sekitar 0,13%. Untuk tahun 2016 pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan sehingga proporsi terhadap pengeluaran pembiayaan terhadap pembiayaan 0, sedangkan untuk tahun 2017 pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 11.183.000.000,- proporsi terhadap penerimaan pembiayaan sebesar 14,48 %.

14. Realisasi Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp)	%
		(Rp)		
A	Pendapatan asli daerah	34.601.974.884,47	30.874.454.262,42	89,22
	Pajak Daerah	7.818.416.831,47	8.297.421.245,00	106,12
	Retribusi Daerah	5.252.775.712,00	3.369.793.263,00	64,15
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.290.774.658,00	6.290.774.658,00	100,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.	15.240.007.683,00	12.916.465.096,00	84,75
B	Dana perimbangan	539.529.495.000,00	522.676.988.201,00	96,88
	Dana Bagi Hasil Pajak	14.136.960.000,00	13.263.238.050,00	93,82
	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.935.804.000,-	1.091.771.997,00	56,40
	Dana Alokasi Umum	415.241.327.000,-	415.241.327.000,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus DAK	59.552.000.000,00	50.474.764.247,00	84,76
	Dana Alokasi Khusus DAK Non Fisik	41.163.404.000,00	35.105.886.907,00	85,28
	Dana Insentif daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00
C	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	85.111.754.450,00	85.473.917.642,00	100,42
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	22.819.512.050,00	22.836.260.931,00	100,07
	Pendapatan Hibah	12.293.569.400,00	1.891.522.500,00	15,39
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	5.850.000.000,00	5.850.000.000,00	100,00
	Pendapatan lainnya	44.148.673.000,00	44.148.673.000,00	100,00
	Jumlah Pendapatan daerah	659.243.224.334,47	627.988.214.082,42	95,26

Dari tabel diatas dapat dilihat ada dua jenis pendapatan tidak tercapai 100 % dari target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan PAD hanya mencapai 89,22 %, dan dana perimbangan tercapai 96,88 %, Sementara dari lain –lain pendapatan daerah yang sah tercapai sebesar 100, 42 % sehingga realisasi pendapatan daerah tercapai sebesar 95,26 %.

15. Realisasi Belanja Daerah

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI (Rp.)	%
		(Rp)		
1	Belanja Tidak langsung	336.141.822.534,47	305.401.005.693	90,85
	Belanja Pegawai	224.455.980.527,47	196.265.259.9731	87,44
	Belanja Hibah	13.103.800.000,00	13.103.800.000,00	100
	Belanja Bantuan Sosial	5.550.000.000,00	5.338.750.000,00	96,19
	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	1.307.119.220,00	763.246.055,00	58,39
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik	90.291.170.787,00	89.496.197.665,00	99,12
	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	0	0
2	Belanja Langsung	389.108.395.471,00	334.035.168.225,40	85,85
	Belanja Pegawai	25.235.190.000,00	22.484.663.250,00	89,10
	Belanja Barang dan Jasa	190.816.663.093,00	158.813.539.540,00	85,23
	Belanja Modal	173.056.542.378,00	152.736.965.734,72	88,26

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi belanja tidak langsung tercapai sebesar 90,85 % dari anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan untuk belanja langsung sebesar 85,85 %. Jadi jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 639.436.173.918,40 dari total anggaran belanja Rp. 725.250.218.005,47 atau sebesar 88,16 %

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja yang tersaji ini merupakan cerminan kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2017 yang merupakan media pertanggungjawaban dari upaya pencapaian Visi dan Misi dalam RPJMD 2013-2018 Kota Pariaman.

Dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pariaman dimaksud, secara tahunan Pemerintah Kota Pariaman juga telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Untuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Pemerintah Kota Pariaman juga telah menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017, yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pariaman berjumlah 35 sasaran yang diukur dengan dengan 110 indikator kinerja sasaran.
2. Pada Misi I terdapat 33 indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja 136%.
3. Misi 2 terdapat 40 indikator kinerja sasaran dengan capaian rata-rata 119%.
4. Misi 3 terdapat 26 indikator kinerja sasaran dengan capaian rata-rata 140%.
5. Misi 4 terdapat 11 indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian 152%.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja selama tahun 2017 melalui indikator kinerja sasaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pariaman

dapat tercapai dengan sangat baik, dengan ditunjukkannya ada beberapa indikator kinerja yang mencapai lebih dari 100%.

Pencapaian yang sangat baik ini, diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, dimulai dari proses perencanaan, Perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi yang mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh hasil yang dicapai, namun masih ada beberapa indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan.

Hal ini disebabkan karena dalam proses pencapaian target dari beberapa sasaran tersebut tergantung pada OPD terkait, disamping itu kualitas perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen Sistem AKIP belum terbangun secara baik. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perencanaan belum seluruhnya memenuhi persyaratan dan kriteria sasaran dan indikator kinerja yang baik

Agar dalam upaya pencapaian indikator sasaran dan pencapaian target kinerja tahun kedepannya dapat lebih optimal, maka dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain :

1. Sasaran dan indikator yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Pariaman 2013-2018 diselaraskan dengan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mulai dari penyusunan Renja OPD, RKPD, Perencanaan Anggaran dan Perjanjian Kinerja Pemerintah dan OPD Kota Pariaman.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja setiap triwulan oleh masing-masing OPD yang menjadi pelaksana tugas teknis tiap indikator kinerja tersebut dan menyampaikan ke Bagian Organisasi dan Aparatur Setda Kota Pariaman.
3. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul sejak dini pada saat pelaksanaan program dan kegiatan, jika muncul suatu permasalahan dapat segera terkoreksi dan diberikan langkah solusinya agar dalam pelaksanaan selanjutnya dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.

4. Seluruh pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman harus mempunyai kepedulian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan mengontrol kinerja jajaran dibawahnya .
5. Melakukan koordinasi yang baik dan intensif antar OPD, serta pihak-pihak yang terkait lainnya.

PENGHARGAAN-PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Adapun Penghargaan yang telah diperoleh Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017 adalah:

1. Rating Ekonomi Cerdas (Smart Economy) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada kegiatan Rating Kota Cerdas Indonesia
2. Rating Sosial Cerdas (Smart Social) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada kegiatan Rating Kota Cerdas Indonesia
3. Rating Lingkungan Cerdas (Smart Environment) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada kegiatan Rating Kota Cerdas Indonesia
4. Rating Kesehatan Cerdas (Smart Health) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada kegiatan Rating Kota Cerdas Indonesia
5. Rating Mobilitas (Smart Mobility) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada kegiatan Rating Kota Cerdas Indonesia
6. Rating Keamanan dan Kebencanaan Kota (Safe and Secure City) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada kegiatan Rating Kota Cerdas Indonesia
7. Rating Digital Government Readiness dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada kegiatan Rating Kota Cerdas Indonesia
8. Rating Kesiapan Infrastruktur (infrastruktur Readiness) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada kegiatan Rating Kota Cerdas Indonesia
9. Rating Ekosistem Kompetitif dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada kegiatan Rating Kota Cerdas Indonesia

10. Rating Ekosistem Inovasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada kegiatan Rating Kota Cerdas Indonesia
11. Terbaik tiga pada Perlombaan Anugerah Media Humas (AMH) 2017 kategori siaran pers atau pemberitaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
12. Penghargaan Kota Peduli HAM dari Menteri Hukum dan HAM RI
13. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI
14. Penghargaan Anugerah Pesona Indonesia dari Kementerian Pariwisata RI



PIAGAM PENGHARGAAN

Penghargaan
Rating Kota Cerdas Indonesia 2017
Kategori :

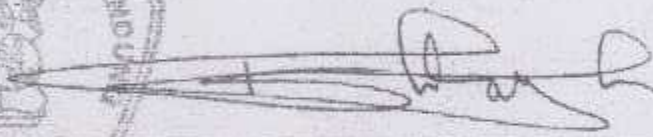
**RATING EKONOMI CERDAS
(SMART ECONOMY)**

Diberikan Kepada :

KOTA PARIAMAN

Bandung, 11 Desember 2017

Rektor Institut Teknologi Bandung


Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

RKCI RATING
2017 KOTA CERDAS
INDONESIA



Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mendapatkan Piagam Penghargaan Rating Kota Cerdas (RKCI) dari Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo, dimana Kota Pariaman mendapat 10 penghargaan



PIAGAM PENGHARGAAN

Penghargaan
Rating Kota Cerdas Indonesia 2017
Kategori :

**RATING SOSIAL CERDAS
(SMART SOCIAL)**

Diberikan Kepada :

KOTA PARIAMAN

Bandung, 11 Desember 2017

Rektor Institut Teknologi Bandung



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA





PIAGAM PENGHARGAAN

Penghargaan
Rating Kota Cerdas Indonesia 2017
Kategori :

**RATING LINGKUNGAN CERDAS
(SMART ENVIRONMENT)**

Diberikan Kepada :

KOTA PARIAMAN

Bandung, 11 Desember 2017

Rektor Institut Teknologi Bandung

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

RKCI RATING
2017 KOTA CERDAS
INDONESIA





PIAGAM PENGHARGAAN

Penghargaan
Rating Kota Cerdas Indonesia 2017
Kategori :

**RATING KESEHATAN CERDAS
(SMART HEALTH)**

Diberikan Kepada :

KOTA PARIAMAN

Bandung, 11 Desember 2017

Rektor Institut Teknologi Bandung



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

RKCI RATING
2017 KOTA CERDAS
INDONESIA



PIAGAM PENGHARGAAN

Penghargaan
Rating Kota Cerdas Indonesia 2017
Kategori :

**RATING MOBILITAS
(SMART MOBILITY)**

Diberikan Kepada :

KOTA PARIAMAN

Bandung, 11 Desember 2017

Rektor Institut Teknologi Bandung



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

RKCI RATING
2017 KOTA CERDAS
INDONESIA



PIAGAM PENGHARGAAN

Penghargaan

Rating Kota Cerdas Indonesia 2017

Kategori :

**RATING KEAMANAN DAN
KEBENCANAAN KOTA
(SAFE & SECURE CITIES)**

Diberikan Kepada :

KOTA PARIAMAN

Bandung, 11 Desember 2017

Rektor Institut Teknologi Bandung

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA





PIAGAM PENGHARGAAN

Penghargaan
Rating Kota Cerdas Indonesia 2017
Kategori :

**RATING DIGITAL GOVERNMENT
READINESS**

Diberikan Kepada :

KOTA PARIAMAN

Bandung, 11 Desember 2017

Rektor Institut Teknologi Bandung



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

RKCI RATING
2017 KOTA CERDAS
INDONESIA



PIAGAM PENGHARGAAN

Penghargaan
Rating Kota Cerdas Indonesia 2017
Kategori :

**RATING KESIAPAN INFRASTRUKTUR
(INFRASTRUCTURE READINESS)**

Diberikan Kepada :

KOTA PARIAMAN

Bandung, 11 Desember 2017

Rektor Institut Teknologi Bandung

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

RKCI
2017
RATING
KOTA CERDAS
INDONESIA



PIAGAM PENGHARGAAN

Penghargaan
Rating Kota Cerdas Indonesia 2017
Kategori :

RATING EKOSISTEM KOMPETITIF

Diberikan Kepada :

KOTA PARIAMAN

Bandung, 11 Desember 2017

Rektor Institut Teknologi Bandung



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA

RKCI
2017 RATING
KOTA CERDAS
INDONESIA



PIAGAM PENGHARGAAN

Penghargaan
Rating Kota Cerdas Indonesia 2017
Kategori :

RATING EKOSISTEM INOVASI

Diberikan Kepada :

KOTA PARIAMAN

Bandung, 11 Desember 2017

Rektor Institut Teknologi Bandung

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA



amb

ANUGERAH
MEDIA HUMAS

2017



KOMINFO



**BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT**

Memberikan Penghargaan
Kepada

Kota Pariaman

Sebagai

TERBAIK III

ANUGERAH MEDIA HUMAS 2017

Kategori

Siaran Pers/Pemberitaan
Provinsi/Kabupaten/Kota

Palembang, 23 November 2017

Pembina BAKOHUMAS

Menteri Komunikasi & Informatika RI



Rudiantara



Wakil Walikota Pariaman Genius Umar menerima penghargaan Kota Peduli HAM yang diserahkan oleh dari Menteri Hukum dan HAM, RI, Yassona Laoly



Walikota Pariaman Mukhlis Rahman Menerima Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Yang Diserahkan Langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Eliza



Wakil Walikota Pariaman Genius Umar dan istri bersama Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman berfoto bersama setelah menerima penghargaan Anugerah Pesona Indonesia dari Kementerian Pariwisata RI atas Pesta Budaya Tabuik Piaman-nya yang mendapatkan Peringkat ke III Kategori Atraksi Budaya Terpopuler



Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mendapatkan penganugerahaan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya, dari Presiden RI Joko Widodo yang disematkan oleh Menteri Dalam Negeri Djahyo Kumolo



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 579 /060/ 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2013-2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 484/060/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memperbaiki Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Pariaman;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Indikator Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen yaitu:

- a. rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. penetapan Kinerja Pemerintah Daerah.
- c. laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pariaman.
- d. evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Pariaman
- e. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan lingkup SKPD.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pariaman Nomor 484/060/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Desember 2017



WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 579 / 060 / 2017

TANGGAL : 28 Desember 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2013 - 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN		SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Persentase angka melek huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas dapat membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}}$	x100%	BPS Kota Pariaman	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase Angka putus sekolah	$\frac{\text{Jumlah murid putus sekolah}}{\text{Jumlah seluruh murid}}$	x100%	BPS Kota Pariaman	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh tenaga pendidik dan kependidikan}}$	x100%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan	Jumlah sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Rata-rata lama sekolah	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang menyelesaikan/sedang mengikuti pendidikan formal}}{\text{Jumlah pendidikan berusia 15 tahun keatas}}$	X 100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ SDLB/ Paket A	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ SDLB/ Paket A	$\frac{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12}} \times 100$		
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ MTs/ Paket B	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SLTP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100\%$		
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ MTs/ Paket B	$\frac{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 yang sekolah di SLTP}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \times 100\%$		
		Jumlah kunjungan siswa ke perpustakaan		Bagian Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretariat Daerah
		Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti pelatihan		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah armada yang berkualitas dan memadai		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
2.	Pengembangan pendidikan formal dan non formal	Jumlah sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal	Jumlah sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal		

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
3.	Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan	Persentase pemanfaatan TIK dalam tata pemerintahan		Diskominfo	Diskominfo
		Jumlah kelompok informasi masyarakat yang dibina			
		Jumlah informasi yang disampaikan melalui media massa	$\frac{\text{Jumlah informasi yang keluar di media massa}}{\text{Jumlah seluruh informasi yang disampaikan ke media massa}} \times 100 \%$		
4.	Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	Persentase tingkat pemahaman keagamaan dimasyarakat		Bag. Kesra	Sekretariat Daerah
		Persentase keikutsertaan siswa terhadap kegiatan keagamaan			
5.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya	Jumlah Lembaga Pemuka Adat yang difasilitasi		DPMD	DPMD
		Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu		SATPOL PP dan Damkar	SATPOL PP dan Damkar
6.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup (AHH) per tahun	$\frac{\text{Jumlah usia kematian penduduk}}{\text{Jumlah semua penduduk yang meninggal dunia}}$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Jumlah Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi saat lahir}}{\text{Jumlah seluruh bayi yang lahir}} \times 1000$		

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
		pertahun			
		Jumlah Angka Kematian Ibu per 1.000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu saat melahirkan}}{\text{Jumlah seluruh kelahiran hidup}} \times 1000$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan Antenatal Minimal 4 kali (K4)	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil}} \times 100 \%$		
		Persentase Balita Bergizi Buruk pertahun	$\frac{\text{Jumlah balita bergizi buruk}}{\text{Jumlah seluruh balita}} \times 100 \%$		
		Rasio Posyandu per satuan Balita pertahun	$\frac{\text{Jumlah posyandu}}{\text{Jumlah seluruh balita}} \times 100 \%$		
		Jumlah penduduk miskin yang tercover pembiayaan kesehatan (JKSS) per tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin yang tercover pembiayaan miskin}}{\text{Jumlah penduduk miskin}} \times 100 \%$		
		Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi}}{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 11 bulan}} \times 100 \%$		
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pariaman	Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru positif (Succes Rate) minimal 85%	$\frac{\text{Jumlah pasien TB paru positif yang sembuh}}{\text{Jumlah pasien TB paru positif yang diobati}} \times 100 \%$		

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Puskesmas dengan Indence Rate (IR) DBD <49 per 1.000 penduduk			
8.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit layanan terpadu}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu}} \times 100 \%$	DP3AKB	DP3AKB
		Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100 \%$		
9.	Meningkatnya Produktifitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Persentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah seluruh kontibusi sektor pertanian}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100 \%$	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase penambahan produksi padi per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi padi tahun berjalan kurang jumlah produksi padi tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah seluruh produksi padi tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$		
		Persentase penambahan populasi ternak pertahun	$\frac{\text{Jumlah seluruh populasi ternak (sapi, kambing, ayam pedaging) tahun berjalan kurang jumlah populasi tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah seluruh populasi ternak tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100 \%$		
		Persentase penambahan produksi hasil ternak			

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Jumlah rata-rata pendapatan petani binaan			
		Jumlah Gerakan Pengendalian Organisme Penyakit tanaman		Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penurunan Jumlah kasus rabies			
		Jumlah kelompok tani yang menggunakan TTG dan Alsintan			
		Jumlah Kerjasama pemasaran hasil produksi ternak			
10.	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan daerah	Persentase ketersediaan sumber energi dan protein perkapita		Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase penguatan cadangan pangan			
		Persentase Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan			
11.	Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian	Jumlah jenis produk olahan hasil pertanian			
12.	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya [(ton/tahun)	$\frac{\text{Jumlah produksi dan produk tiftas perikanan budidaya}}{\text{Jumlah seluruh produksi dan produktiftas perikanan}} \times 100 \%$	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
	budidaya dan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun)	$\frac{\text{Jumlah produksi perikanan tangkap}}{\text{Jumlah seluruh produksi perikanan}} \times 100\%$		
13.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan nelayan dan petani ikan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibina Jumlah unit pengolahan ikan		Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
14.	Meningkatnya pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah bibit restocking Luas hutan mangrove Luas terumbu karang yang dipelihara			
15.	Meningkatnya jumlah koperasi aktif, mandiri, UMKM, dan usaha ekonomi kreatif dan Profesional	Jumlah koperasi Jumlah UMKM	Koperasi adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi Jumlah seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Disperindagkop & UKM	Disperindagkop & UKM
16.	Tersedianya Pasar yang Representatif dan Nyaman	Jumlah Kawasan Pasar yang dibangun dan ditata	Jumlah Kawasan Pasar yang dibangun, direhabilitasi/renovasi, ditata dan dikelola oleh Dinas Perindagkop dan UKM		
17.	Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku	Jumlah alat ukur yang ditera ulang Jumlah penurunan temuan barang yang tidak memenuhi standar			

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
18.	Meningkatnya Sektor Industri dan Industri Kreatif dan komoditi unggulan	Persentase pertumbuhan industri	$\frac{\text{Jumlah Industri pada Tahun n} - \text{Jumlah Industri pada Tahun penetapan target}}{\text{Jumlah Industri pada tahun penetapan target}} \times 100 \%$		
		Jumlah industri kreatif		Disperindagkop & UKM	Disperindagkop & UKM
		Jumlah teknologi tepat guna yang diciptakan		DPMD	DPMD
19.	Meningkatnya pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata	Jumlah kawasan wisata yang dibangun, dikembangkan dan ditata		Disparbud	Disparbud
20.	Meningkatnya Promosi wisata secara konsisten, baik dalam lingkup Regional, Nasional dan Internasional	Jumlah team jaringan kerjasama promosi pariwisata			
		Jumlah ivent promosi yang dilaksanakan			
		Jumlah buku statistik wisata terpadu yang disusun			
		Jumlah Bahan Promosi Wisata yang dibuat			
		Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina			
21.	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan, dibina dan dilestarikan			

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya		Disparbud	Disparbud
22.	Meningkatnya jumlah penanaman modal	Jumlah Investor yang menanamkan modal		DPMPTSP & Naker	DPMPTSP & Naker
		Jumlah perizinan yang di terbitkan		DPMPTSP & Naker	DPMPTSP & Naker
23.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	Persentase tingkat disiplin aparatur	$\frac{\text{Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin}}{\text{Jumlah seluruh PNS yang ada}} \times 100 \%$	BKPSDM	BKPSDM
		Persentase ketersediaan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintah daerah		BAPPEDA	BAPPEDA
24.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah	Tingkat penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah		BKD	BKD
25.	Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintahan berbasis web dan secara online (e-Government)	Persentase peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan		BAPPEDA	BAPPEDA
		Jumlah informasi dan data yang jelas, akurat, mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan terutama dalam perencanaan pembangunan			

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
26.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan		Disdukcapil	Disdukcapil
		Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik			
		Persentase yang memilik KK		Disdukcapil	Disdukcapil
		Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran			
		Jumlah dokumen profil kependudukan yang diterbitkan			
		Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang dilayani			
27.	Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah	Tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target PAD	$\frac{\text{Realisaasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$	BKD	BKD
		Persentase tingkat kenaikan PAD			
28.	Terwujudnya peñatausahaan keuangan dan pengelolaan asset	Persentase asset yang terdata		Bag. Asset	SETDA
		Nilai dan Predikat Akuntabilitas Kinerja		Bag. Organisasi	

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
	daerah yang akurat dan akuntabel	Pemerintah		dan Aparatur	SETDA
		Nilai dan peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Bag. Pemerintahan	SETDA
29.	Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang asiratif, aplikatif dan akuntabel	Persentase tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang		BAPPEDA	BAPPEDA
		Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan			
		Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas			
30.	Menurunnya angka pengangguran	Persentase penurunan jumlah pengangguran		DPMPTSP dan Naker	DPMPTSP dan Naker
		Jumlah tenaga kerja yang berkualitas			
31.	Mengurangi tingkat kemiskinan	Persentase keterpaduan program dalam penanggulangan kemiskinan		BAPPEDA	BAPPEDA
		Persentase menurunnya angka kemiskinan			
		Jumlah KK miskin yang terlayani		Dinas Sosial	Dinas Sosial

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Jumlah KK Miskin yang diberdayakan di Desa Prioritas			
		Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang terlayani			
		Persentase dan KK miskin dan kelompok rentan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar		Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang menerima bantuan stimulan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin			
32.	Meningkatnya kualitas lingkungan untuk	Persentase sampah Kota Pariaman yang terkelola dengan baik	$\frac{\text{Jumlah sampah yang ditangani (m}^3\text{)}}{\text{Volume produksi sampah (m}^3\text{)}} \times 100 \%$	DLH	DLH

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
	menciptakan pembangunan yang berkelanjutan	Persentase pemantauan kualitas lingkungan (tanah, udara dan air)	$\frac{\text{Jumlah titik pemantauan kualitas tanah, udara dan air yang sesuai baku mutu}}{\text{Jumlah titik pemantauan kualitas tanah, udara dan air yang dilakukan}} \times 100 \%$		
		Jumlah Ruang Terbuka Hijau			
33.	Meningkatnya kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana		BPBD, DINAS SOSIAL	BPBD DINAS SOSIAL
		Jumlah kasus kebakaran yang tertanggulangi	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan penanggulangan kebakaran}}{\text{Target pelaksanaan penanggulangan kebakaran}} \times 100 \%$	SATPOL PP & DAMKAR	SATPOL PP & DAMKAR
34.	Meningkatnya kapasitas infrastruktur pemukiman dan perkotaan berbasis tataruang untuk menunjang aktivitas masyarakat	Jumlah infrastruktur pendukung sebagai penunjang aktifitas masyarakat		PUPR dan Dinas Perumra, Kawasan Pemukiman & Pertanahan	PUPR dan Dinas Perumra, Kawasan Pemukiman & Pertanahan
		Persentase cakupan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat			
		Persentase pengurangan luas genangan air yang tertangani	$\frac{\text{Luas Daerah masih tergenang}}{\text{Luas Daerah Rawan Genangan}} \times 100\%$	DINAS PUPR	DINAS PUPR

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan air irigasi (lt/det pada setiap musim tanam)}}{\text{Jumlah kebutuhan air irigasi (lt/det)}} \times 100\%$		
35.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi dan informatika dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	<p>Jumlah sarana dan prasarana transportasi darat yang berfungsi secara optimal</p> <p>Jumlah penambahan sarana pendukung keselamatan jalan raya</p>		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

WALIKOTA PARIAMAN



MUKHLIS R



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
INSPEKTORAT

Jl. Rohana Kudus No. 44 Taratak Kota Pariaman
Telp./Fax. (0751) 91557



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pemerintah Daerah Kota Pariaman untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Pariaman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pariaman, 22 Maret 2018


INSPEKTUR


Dra. LUKMAN SYAM, BA., M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19590404 198503 1 005



PERJANJIAN KINERJA

**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018**

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Jl. Imam Bonjol No. 44 Pariaman

Telp. (0751) 92202, 91012 Fax : (0751) 91012

www.pariamankota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subbahanahuwata'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka kepada Penyelenggara Negara diminta untuk menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja secara berjenjang. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Kota Pariaman telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini, menyajikan informasi pencapaian Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu kepada RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018, Renstra Organisasi Perangkat Daerah serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja. Penyajian informasi pencapaian target kinerja dalam laporan tersebut, telah diupayakan serasi dan selaras dengan target kinerja pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 ini memuat data-data sasaran, indikator kinerja, target, program dan jumlah anggaran untuk tahun 2018, yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Akhirnya, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam proses penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 ini. Semoga Perjanjian Kinerja ini dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pimpinan instansi yang lebih tinggi memberikan tugas kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sehingga terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Masing-masing unit kerja diwajibkan menyusun perjanjian kinerja setiap awal tahun anggaran. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya dirangkum dalam Perjanjian Kinerja yang disusun dalam bentuk Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja ini adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
3. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah ; dan
4. sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 mencakup pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah yang dijabarkan dalam

indikator - indikator kinerja beserta target-target yang akan dicapai pada tahun ini, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013 – 2018 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pariaman Tahun 2013-2018.

Perjanjian Kinerja ini juga didukung dengan Perjanjian Kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), yang mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian ruang lingkup Perjanjian Kinerja SOPD ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama, yaitu program-program yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai SOPD pada tahun 2018, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pada Rencana Strategis Pemerintah Kota Pariaman.

D. Format Perjanjian Kinerja

Secara umum Perjanjian Kinerja memuat:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja;

Merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu.

2. Lampiran Perjanjian Kinerja berisi

a. *Sasaran strategis*

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu satu tahun.

b. *Indikator kinerja*

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja dapat berupa hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh SOPD ataupun keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.

c. Target kinerja

Target kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun tertentu.

d. Jumlah anggaran yang dialokasikan

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran tersebut, didasarkan pada dokumen anggaran yang telah disetujui.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tujuan, ruang lingkup, format dan sistematika Perjanjian Kinerja

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Berisikan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB III PERJANJIAN KINERJA

Terdiri dari Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, Program dan jumlah anggaran yang dialokasikan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2013 – 2018 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

A. Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang berisikan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kota Pariaman, RTRW Kota Pariaman dengan memperhatikan dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

B. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud sebagai acuan tertulis yang memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam mendorong proses pembangunan daerah, yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).

RPJMD Kota Pariaman Tahun 2013-2018 bertujuan untuk menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kota Pariaman serta pedoman dalam penyusunan Renstra SOPD.

C. Visi dan Misi

a. Visi

Visi berkaitan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Berdasarkan kondisi Kota Pariaman dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan **MUKHLIS RAHMAN (Walikota)–GENIUS UMAR (Wakil Walikota)** membuat Visi Kota Pariaman tahun 2013-2018 sebagai berikut:

“ PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF BERBASIS LINGKUNGAN, BUDAYA DAN AGAMA ”.

Penjelasan dari Visi sebagai berikut:

- 1) Kepariwisata adalah Suatu gerakan dengan menyatukan seluruh potensi daerah dan stakeholder dalam penyediaan sarana pariwisata dan prasarana wisata atau fasilitas umum sehingga menarik wisatawan untuk datang ke destinasi wisata yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kota Tujuan Wisata merupakan Kota Pariaman yang diarahkan sebagai kota tujuan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun domestik.
- 3) Ekonomi Kreatif merupakan suatu gerakan pengembangan industri kerakyatan atau ekonomi kreatif yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, inovasi, keterampilan serta bakat individu menjadi nilai ekonomi tinggi untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplorasi kreasi daya cipta individu dan potensi daerah.
- 4) Berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama berarti dalam pelaksanaan pembangunan selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dengan

menjadikan Pariaman Kota Hijau serta melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai adat, budaya dan agama dalam setiap sendi kehidupan.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi atau kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan memperhatikan kondisi objektif daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi jangka menengah Kota Pariaman sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama maka misi Kota Pariaman dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Membangun sumberdaya manusia yang berkompetensi, Berbudaya, Beriman dan Bertakwa melalui Penguasaan Iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi.
- 2) Penguatan Struktur perekonomian melalui peningkatan daya saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan potensi daerah.
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri.
- 4) Optimalisasi hasil pembangunan dan sarana prasarana daerah dalam menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang dan Mitigasi Bencana.

c. Hubungan Visi, Misi, Agenda dan Prioritas Pembangunan

VISI	MISI	AGENDA	PRIORITAS	
Pariaman Sebagai Kota Tujuan Wisata Dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan, Budaya Dan Agama	Membangun Sumberdaya Manusia Yang Berkompetensi, Berbudaya, Beriman Dan Bertaqwa Melalui Penguasaan Iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia berbasis iptek	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan daya saing	
	Penguatan Struktur Perekonomian Melalui Peningkatan Daya Saing Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Potensi Daerah	Pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan potensi unggulan daerah	Pengembangan sektor Kepariwisataaan	
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Mendorong Dunia Usaha Dan Masyarakat Lebih Mandiri	Perbaikan tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	
	Optimalisasi Hasil Pembangunan Dan Sarana Prasarana Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Kesesuaian Tata Ruang Dan Mitigasi Bencana		Peningkatan infrastruktur, kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan
				Peningkatan kualitas pendidikan
			Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	
			Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi kerakyatan	
			Pelestarian lingkungan hidup dan Mitigasi Bencana	

VISI : PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF BERBASIS LINGKUNGAN, BUDAYA DAN AGAMA

Misi 1 : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Berkompetensi, Berbudaya, Beriman Dan Bertakwa Melalui Penguasaan Iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan akses dan mutu pendidikan wajib belajar 12 tahun yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan baik formal dan non formal	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan dan produk lulusan SMK yang memiliki keahlian dan mampu bersaing dipasar kerja, nasional dan internasional	
			Meningkatkan kualitas lulusan SMA yang dapat diterima oleh perguruan tinggi ternama/favorit	
			Pelaksanaan kegiatan School Net pada setiap jenjang pendidikan (SD, SMP/SMK)	
			Wajib belajar 12 tahun yang bebas biaya dan berkualitas	
				Optimalisasi perpustakaan daerah dan sekolah
			Peningkatan mutu pendidik, tenaga kependidikan dan manajemen sekolah	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai
				Peningkatan akses pendidikan melalui penyediaan sarana transportasi gratis yang berkualitas dan memadai

	Pengembangan pendidikan formal dan non formal	Membina pendidikan formal dan non formal ditengah masyarakat	Penyiapan tenaga pendidik yang sesuai Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal Fasilitasi kegiatan PKBM dan Lembaga pendidikan keterampilan
Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi	Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatkan sarana informasi dan telekomunikasi setiap wilayah Meningkatkan informasi melalui media massa
Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di sekolah	Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan disekolah dan masyarakat
	Peningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya	Mendalami pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan adat istiadat
			Mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat
		Meningkatnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan peran Lembaga, Pemuka Adat dan Tokoh Agama Peningkatan peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat
Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Meningkatkan kualitas akses masyarakat dalam pelayanan kesehatanyang bermutu,mudah, merata dan terjangkau

			Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan keutuhan
			Melanjutkan program jaminan kesehatan bagi masyarakat
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pariaman	Meningkatkan kualitas pola hidup sehat masyarakat		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan dalam berperilaku hidup sehat dan bersih
			Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih melalui pelayanan sanitasi dasar dan sanitasi umum
			Meningkatkan kualitas advokasi masyarakat dalam pengembangan hidup sehat terhadap masyarakat
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga		Meningkatkan upaya pengarusutamaan gender
			Mewujudkan pemenuhan hak anak dan noema keluarga kecil bahagia sejahtera

MISI 2 : Penguatan Struktur Perekonomian Melalui Peningkatan Daya Saing Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Potensi Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Meningkatnya produksi pertanian, perikanan untuk peningkatan taraf hidup petani, nelayan serta untuk mendukung ketahanan pangan</p>	<p>Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</p>	<p>Peningkatan produktifitas produksi dan daya saing pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p>	<p>Peningkatan Produktifitas produksi dan daya saing pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</p>
			<p>Peningkatan kemampuan petani dan lembaga pendukung</p>
			<p>Perluasan akses petani dalam pengembangan usaha melalui teknologi informasi serta penyediaan sarana dan prasarana</p>
			<p>Penyusunan kebijakan teknis pencegahan alih fungsi lahan pertanian</p>
			<p>Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tanaman pangan, hortikulturadan perkebunan</p>
			<p>Peningkatan pelayanan umum dibidang kehutanan</p>
			<p>Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan Daerah</p>
<p>Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan bahan pangan</p>			

			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap mutu pangan, distribusi dan pengolahan bahan pangan
	Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian	Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok -kelompok usaha pengolahan	Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil
	Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya melalui perluasan lahan dan teknologi	Pengembangan kawasan air payau, air tawar dan pembudidayaan ikan serta pengembangan sumber daya perairan umum
			Peningkatan produksi serta sarana dan prasarana perikanan tangkap
	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan nelayan dan petani ikan	Mengembangkan produktifitas kelautan dan perikanan yang berorientasi pada agribisnis	Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan sumber daya perikanan
			Peningkatan pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan
	Meningkatnya pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan	Meningkatnya pengetahuan kesadaran masyarakat tentang pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta kualitas sumber daya kelautan dan perikanan
Pemberdayaan usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	Meningkatnya jumlah koperasi aktif, mandiri, UMKM dan usaha ekonomi kreatif dan professional	Mengembangkan peran Koperasi dan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing	Mendorong tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM
			Promosi perdagangan dalam negeri dan luar negeri

			Peningkatan kemampuan ekonomi dan wirausaha masyarakat melalui lembaga keuangan
	Tersedianya pasar yang representatif dan nyaman	Penataan Pasar serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Pembangunan Pasar yang representative dan nyaman
	Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku	Mengoptimalkan fungsi pengawasan	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
	Meningkatnya jumlah industri kreatif dan komoditi unggulan	Meningkatkan SDM pelaku industri kreatif	Memfasilitasi peningkatan SDM melalui pelatihan dan magang
		Fasilitasi akses 3M (Money, Material, Marketing)/permodalan, material dan pemasaran	Menyusun rencana Pengembangan Kawasan Industri
		Meningkatkan ekonomi serta daya saing masyarakat melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Memfasilitasi bantuan berupa peralatan, modal dan pemasaran
Pengembangan Pariwisata Daerah	Meningkatnya pembangunan, Pengembangan, Penataan dan Pembenahan objek serta daya tarik wisata	Pembangunan terhadap objek wisata yang telah ada dan penambahan objek wisata pendukung baru yang belum dikembangkan	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			Penyiapan infrastruktur fisik dan non fisik penunjang kepariwisataan
	Meningkatnya promosi wisata secara konsisten baik dalam	Meningkatnya promosi wisata secara konsisten baik dalam lingkup Regional dan	Peningkatan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan kepariwisataan
			Penyelenggaraan even-even wisata berskala Regional, Nasional dan

	lingkup Regional dan Internasional	Internasional	Internasional
	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	Meningkatnya pelestarian budaya daerah yang mendukung pariwisata	Melestarikan dan mengembangkan seni budaya daerah
			Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni daerah
Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya jumlah penanaman modal	Menciptakan iklim investasi yang kondusif	Peningkatan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investor
			Meningkatkan pelayanan investasi melalui kemudahan, penyederhanaan perizinan penanaman modal
MISI 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Mendorong Dunia Usaha Dan Masyarakat Lebih Mandiri			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui pemantapan reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Memperkuat kelembagaan, tugas pokok, fungsi serta norma standar pelayanan SKPD	Menciptakan Tata Kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih
	Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Daerah	Pemantapan system birokrasi yang berkeadilan, dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	Pemantapan sistem birokrasi yang berkeadilan dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan
			Menciptakan Tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani

			Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
Mewujudkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Terlaksananya Akuntabilitas dan Birokrasi Pemerintah berbasis Wb dan secara Online (E-Government)	Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada sistem informasi keang daerah, pengembangan one stop service, pengembangan bursa tenaga kerja on line, penerapan mekanisme complain	Meningkatkan sistem informasi dan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan Pemerintahan
	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik	Optimalisasi SIAK Online	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan kebutuhan universal
			Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sampai tingkat pemerintahan terendah
			Menyempurnakan data administrasi kependudukan
Meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan	Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi dalam penatausahaan dan penggunaan anggaran daerah	Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penatausahaan dan penggunaan anggaran daerah
	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pengelolaan asset daerah yang akurat dan	Tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas	Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

	Akuntabel		
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif dan partisipatif	Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas musrenbang daerah
			Meningkatkan terwujudnya pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat
Perluasan kesempatan bekerja, berusaha, perlindungan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional	Menurunnya angka pengangguran	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas dengan didasari oleh analisis studi yang baik
			Penyediaan lapangan kerja
		Peningkatan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh lapangan kerja	Membuka lapangan kerja baru dan memperbesar peluang dan kesempatan kerja bagi calon tenaga kerja local
			Membangun kerjasama dengan pelaku bidang dunia usaha dalam penyaluran tenaga kerja
			Membangun BLK dan pemberdayaan lembaga pendidikan non formal yang dibutuhkan pasar kerja industri dan jasa
			Meningkatkan keterampilan kompetensi pencari kerja
Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dalam upaya	Mengurangi tingkat kemiskinan	Meningkatkan integrasi sasaran pelaksanaan program penanggulangan	Meningkatkan efektifitas penggunaan data kemiskinan

peningkatan kesejahteraan		kemiskinan yang tepat dan jaminan pelaksanaan program tepat pada sasaran keluarga miskin	Meningkatkan efektifitas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Pariaman
		Meningkatkan kualitas kinerja pelaku penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan Kapabilitas/kemampuan aparatur dalam penanggulangan kemiskinan pada semua tingkatan
			Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan

MISI 4 : Optimalisasi Hasil Pembangunan Dan Sarana Prasarana Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Kesesuaian Tata Ruang Dan Mitigasi Bencana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan	Peningkatan layanan pengelolaan lingkungan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran masyarakat	Peningkatan pelayanan persampahan skala Kota dan di tingkat masyarakat (3R)
			Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah, sekolah, masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan kualitas lingkungan	
	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

Meningkatkan kapasitas sarana prasarana daerah	Meningkatnya kapasitas infrasturuktur permukiman dan perkotaan berbasis tata ruang untuk menunjang aktivitas masyarakat	Pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat	Menyediakan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat
			Menyediakan infrastruktur penunjang peningkatan kesehatan dan sanitasi masyarakat
	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi serta informatika dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan pelayanan transportasi dan angkutan umum	Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan dan memfungsikan terminal sebagai sarana penghubung antar wilayah
			Meningkatnya keselamatan di jalan raya
	Penyediaan informasi dan layanan komunikasi untuk semua lapisan masyarakat	Penyebarluasan hasil pembangunan melalui system informasi berbasis teknologi	

BAB III

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan strategis yang akan dicapai melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

Perjanjian Kinerja terdiri atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman yang meliputi Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Tabel Perjanjian Kinerja, serta Perjanjian Kinerja 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh pejabat eselon II dan eselon III yaitu :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pertanian dan Pangan
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19. Dinas Perikanan
20. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
21. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
22. Badan Keuangan Daerah
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
26. Kecamatan Pariaman Tengah
27. Kecamatan Pariaman Utara
28. Kecamatan Pariaman Selatan
29. Kecamatan Pariaman Timur

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahun 2018 yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Pariaman beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) . Penyusunan Perjanjian Kinerja bermanfaat bagi Walikota dan Kepala OPD untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan/ kegagalan organisasi.

Demikian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKHLIS R
Jabatan : WALIKOTA PARIAMAN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KOTA PARIAMAN**

NO	VISI/MISI/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
VISI : PARIAMAN SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA DAN EKONOMI KREATIF BERBASIS LINGKUNGAN, BUDAYA DAN AGAMA			
Misi 1 : Membangun Sumberdaya Manusia Yang Berkompetensi, Berbudaya, Beriman Dan Bertaqwa Melalui Penguasaan Iptek serta memiliki etos kerja yang tinggi			
1	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Persentase angka melek huruf	99,70%
		Persentase Angka putus sekolah	0,25%
		Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi	80%
		Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana pendukung yang memadai dalam menunjang pendidikan	10 sekolah
		Rata-rata lama sekolah	10,20 tahun
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ SDLB/ Paket A	100,2%
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ SDLB/ Paket A	95%
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/ MTs/ Paket B	105%
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP/ MTs/ Paket B	90%
		Jumlah kunjungan siswa ke perpustakaan	4.200 orang
		Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti pelatihan	2.000 orang
		Jumlah armada yang berkualitas dan memadai	9 unit
2	Pengembangan pendidikan formal dan non formal	Jumlah sarana dan prasarana belajar pendidikan non formal	2 jenis
3	Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan	Jumlah informasi yang disampaikan melalui media massa	2000 informasi
4	Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa	Persentase tingkat pemahaman keagamaan dimasyarakat	100%
		Persentase keikutsertaan siswa terhadap kkegiatan keagamaan	80%
5	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya	Jumlah Lembaga Pemuka Adat yang difasilitasi	12 Lembaga
		Gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	100%
6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Jumlah Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup pertahun	23/1.000 K H
		Jumlah Angka Kematian Ibu per 1.000 Kelahiran Hidup	102/100.000 KH

		Persentase Balita Bergizi Buruk pertahun	2%
		Rasio Posyandu per satuan Balita pertahun	1/50 baalita
		Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan Antenatal Minimal 4 kali (K4)	78%
		Jumlah penduduk miskin yang tercover pembiayaan kesehatan (JKSS) per tahun	9215 jiwa
		Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	93%
7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pariaman	Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru positif (Succes Rate) minimal 85%	84%
		Persentase Puskesmas dengan Indence Rate (IR) DBD <49 per 1.000 penduduk	64%
8	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	100%
		Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	66%
MISI 2 : Penguatan Struktur Perekonomian Melalui Peningkatan Daya Saing Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Potensi Daerah			
9	Meningkatnya produktifitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Persentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,5%
		Persentase penambahan produksi padi per tahun	2,9%
		Persentase penambahan populasi ternak pertahun	6%
		Persentase penambahan produksi hasil ternak	3%
		Jumlah rata-rata pendapatan petani binaan	Rp.1.500.000,-
		Penurunan Jumlah kasus rabies	56 kasus
10	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan daerah	Persentase ketersediaan sumber energi dan protein perkapita	90%
		Persentase penguatan cadangan pangan	90%
		Persentase Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	95%
11	Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian	Jumlah jenis produk olahan hasil pertanian	11 jenis
12	Meningkatnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tagkap	Jumlah produksi perikanan budidaya	304 ton
		Jumlah produksi perikanan tangkap	6.500 ton
13	Meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan dan petani ikan	Tingkat konsumsi ikan	35 kg/kapita/th
		Jumlah Kelompok Pengolah Ikan	20 UPI
14	Meningkatnya pengawasan dan perlindungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah bibit restocking	28.500 ekor
15	Meningkatnya jumlah koperasi aktif, mandiri	Jumlah koperasi	78 Koperasi

	dan UMKM dan Usaha Ekonomi Kreatif dan profesional	Jumlah UMKM	7.150 unit
16	Tersedianya Pasar yang Representatif dan Nyaman	Jumlah Kawasan Pasar yang dibangun dan ditata	3 unit
17	Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku	Jumlah alat ukur yang ditera ulang	350 unit
		Temuan barang yang tidak memenuhi standar	5 temuan
18	Meningkatnya Sektor Industri, Industri Kreatif dan komoditi unggulan	Persentase pertumbuhan industri	1,2%
		Jumlah industri kreatif	829 unit
		Jumlah teknologi tepat guna yang diciptakan	15 buah
19	Meningkatnya pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata	Jumlah kawasan wisata yang dibangun, dikembangkan dan ditata	1 unit
20	Meningkatnya promosi wisata secara konsisten baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional	Jumlah team jaringan kerjasama promosi pariwisata	6 team
		Jumlah event yang dilaksanakan	10 event
21	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan, dibina dan dilestarikan	1 kesenian
22	Meningkatnya jumlah penanaman modal	Jumlah Investor yang menanamkan modal	3 investor
MISI 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Mampu Mendorong Dunia Usaha Dan Masyarakat Lebih Mandiri			
23	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah	Persentase tingkat disiplin aparatur	98%
		Persentase ketersediaan data yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintah daerah	100%
24	Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah	Tingkat penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP
25	Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah berbasis Web dan secara Online (E-Government)	Persentase peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan pemerintahan	90%
		Jumlah informasi dan data yang jelas, akurat, mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan terutama dalam perencanaan pembangunan	1 aplikasi
26	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	100%
		Persentase penduduk yang memiliki KTP Elektronik	100%
		Persentase penduduk yang memiliki KK	97%

		Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	85%
		Jumlah dokumen profil kependudukan yang diterbitkan	1 dokumen
		Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang dilayani	6 dokumen
27	Terwujudnya optimalisasi pendapatan	Tingkat realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target PAD	100%
28	Terwujudnya penata-usahaan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang akurat dan akuntabel	Persentase aset yang terdata	100%
		Nilai dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	cc
		Nilai dan peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi
29	Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif, dan akuntabel	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	300 orang
		Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas	5 dokumen
30	Menurunnya angka pengangguran	Persentase penurunan jumlah pengangguran	1,5 %
31	Mengurangi tingkat kemiskinan	Persentase keterpaduan program dalam penanggulangan kemiskinan	80%
		Persentase menurunnya angka kemiskinan	0,03 %
MISI 4 : Optimalisasi Hasil Pembangunan Dan Sarana Prasarana Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Kesesuaian Tata Ruang Dan Mitigasi Bencana			
32	meningkatkan kualitas lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan	Persentase sampah Kota Pariaman yang terkelola dengan baik	48%
		Pemantauan kualitas lingkungan yang dilakukan	3 jenis
33	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	100%
		Jumlah kasus kebakaran yang tertanggulangi	100%
34	Meningkatnya kapasitas infrastruktur pemukiman dan perkotaan berbasis tataruang untuk menunjang aktivitas masyarakat	Jumlah infrastruktur pendukung sebagai penunjang aktifitas masyarakat	3 jenis
		Persentase cakupan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	15%
		Persentase pengurangan luas genangan air yang tertangani	20%
35	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana transportasi darat yang berfungsi secara optimal	4 jenis
		Jumlah penambahan sarana dan prasarana pendukung keselamatan jalan raya	4 jenis

WALIKOTA PARIAMAN



MUKHLIS. R

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	
1	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1,934,988,000
2	Pendidikan Menengah	320,700,000
3	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	6,999,928,500
4	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	926,592,500
5	Manajemen Pelayanan Pendidikan	471,661,700
6	Peningkatan peran serta kepemudaan	1,039,775,200
7	Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	382,062,600
8	Pendidikan Menengah	320,700,000
9	Peningkatan Pelayanan Angutan	1,835,644,600
2	Pengembangan pendidikan formal dan non formal	
1	Pendidikan Non Formal	78,177,000
2	Pendidikan Anak Usia Dini	724,525,500
3	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	51,560,000
3	Pengembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat dan tata pemerintahan	
1	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	2,901,976,250
2	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	994,250,000
4	Terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beriman dan	
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengetahuan Keagamaan Non Formal	170,192,500
5	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat istiadat dan budaya	
1	Pengembangan Nilai Budaya Budaya	2,029,483,500
2	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1,463,388,000
3	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,945,913,000
4	Pengelolaan Keragaman Budaya	439,899,900
6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	
1	Perbaikan Gizi Masyarakat	393,399,000
2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	198,850,000
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	100,997,500
4	Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	113,327,500
5	Upaya Kesehatan Masyarakat	147,200,000
6	Pengawasan Obat dan Makanan	141,940,000
7	Obat dan Perbekalan Kesehatan	44,215,000
8	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	10,000,000
9	Pengawasan Obat dan Makanan	117,060,000
10	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	3,997,575,000
7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
1	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	326,809,000
2	Pengembangan Lingkungan Sehat	271,284,000
3	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	441,706,744
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	506,919,500
8	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
1	Keluarga Berencana	243,055,500
2	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	88,271,900
3	Kesehatan Reproduksi Remaja	101,299,000
4	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	195,955,500
5	Pelayanan Kontrasepsi	61,999,000
6	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	167,867,500
7	Pembinaan Peran Serta masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang mandiri	43,999,000
8	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	238,931,000
9	Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi tanaman pangan, hortikultura,	

	perkebunan dan peternakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	
1	Peningkatan Kesejahteraan petani	146,690,000
2	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	112,396,000
3	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	2,200,000,000
4	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	405,540,000
5	Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan	172,845,000
6	Perencanaan Pembangunan Darah	31,780,000
7	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	114,810,000
8	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	22,780,000
9	Peningkatan Pemasaran hasil produksi Peternakan	86,050,000
10	Penyediaan dan Pengembangan prasarana dan sarana Pertanian/Peternakan	194,410,000
10	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan daerah	
11	Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian	1,213,755,000
1	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	
12	Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap	
1	Pengembangan Budidaya Perikanan	884,140,050
2	Pengembangan Perikanan Tangkap	584,704,000
13	Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani ikan	
1	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	92,850,000
2	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	207,715,000
14	Meningkatnya pengawasan dan perlindungan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan	
1	Pengembangan data statistik tahunan kelautan dan perikanan	17,653,000
15	Meningkatnya jumlah koperasi aktif, mandiri dan UMKM dan Usaha Ekonomi Kreatif dan profesional	
1	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	92,290,000
2	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	59,900,000
2	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil	43,010,000
3	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	55,550,000
16	Tersedianya Pasar yang Representatif dan Nyaman	
1	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1,379,824,501
17	Meningkatnya kesadaran pedagang terhadap peraturan yang berlaku	
1	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	142,185,300
18	Meningkatnya Sektor Industri dan Industri Kreatif dan komoditi unggulan	
1	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2,078,460,000
19	Meningkatnya pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata	
1	Pengembangan Kemitraan	306,500,000
2	Pengembangan Destinasi Pariwisata	3,850,300,000
3	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Wisata	574,752,000
20	Meningkatnya promosi wisata secara konsisten baik dalam lingkup regional, nasional dan internasional	
1	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2,814,254,400
21	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal	
1	Pengembangan Nilai Budaya	272,250,200
2	Pengelolaan Keragaman Budaya	1,306,744,000
3	Pengelolaan Kekayaan Budaya	102,100,200
22	Meningkatnya jumlah penanaman modal	

	1	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	10,000,000
	2	Pengembangan Pelayanan Perizinan	308,909,500
	3	Peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi	282,479,800
23		Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	
	1	Peningkatan Disiplin Aparatur	24,750,000
	2	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2,063,887,050
	3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	261,750,000
24		Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah	
	1	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,192,664,200
		Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	993,843,200
	2		
	3	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	535,800,500
25		Terlaksananya akuntabilitas dan birokrasi pemerintah berbasis Web dan secara Online (E-Government)	
	1	E-Planning	191,610,000
	2	Forum Data Perencanaan Pembangunan Daerah	87,000,000
	3	Pengembangan dan Pengelolaan Webgis Kota Pariaman	106,285,000
26		Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang baik	
	1	Penataan Administrasi Kependudukan	391,975,500
27		Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah	
		Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,192,664,200
28		Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset daerah yang akurat dan akuntabel	
	1	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	276,500,000
	2	Pengembangan Ketatalaksanaan	41,000,000
	3	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	156,212,400
29		Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan produk perencanaan yang aspiratif, aplikatif, dan akuntabel	
	1	Pengembangan Data/Informasi/Statistik	212,000,000
	2	Perencanaan pengembangan kota-kota menengah besar	396,635,000
		Perencanaan Pembangunan Daerah	3,438,566,000
	3	Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik	85,600,000
	4	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	571,586,000
	5	Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	215,200,000
	6	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	295,600,000
	7	Perencanaan Tata Ruang	479,400,000
	8	Pemanfaatan Ruang	100,000,000
30		Menurunnya angka pengangguran	
	1	Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	662,172,000
31		Mengurangi tingkat kemiskinan	
	1	Perencanaan Sosial dan Budaya	215,200,000
	2	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) lainnya	908,164,500
	3	Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanggulangan Bencana	209,620,000
	4	Rehabilitasi Sosial, Anak, Lansia, Tuna Sosial, Napza	235,456,500
	5	Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	132,368,000
	6	Dukungan Manajemen Teknis	311,067,000

32	Meningkatnya kualitas lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan	
1	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4.431.132.500
2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.745.360.000
3	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	751.425.000
4	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	456.830.000
5	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	169.485.000
6	Peningkatan Pengendalian Polusi	135.200.000
7	Pengembangan Kota Hijau	100.000.000
33	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	
1	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	2.640.378.450
2	Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	697.900.000
34	Meningkatnya kapasitas infrastruktur pemukiman dan perkotaan berbasis tata ruang untuk menunjang aktivitas masyarakat	
1	Pembangunan Infrastruktur pedesaan	12.290.408.100
2	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	317.000.000
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan	905.584.000
3	lainnya	
4	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3.002.096.700
5	Pembangunan jalan dan jembatan	50.654.842.594
6	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	10.514.170.000
6	Pemanfaatan Ruang	11.700.000.000
7	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	173.000.000
8	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	23.461.308.500
9	Koordinasi Perencanaan Air Minum, drainase, dan sanitasi Perkotaan	71.825.000
35	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi serta informatika dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	
1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	10.000.000
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas T.LAJ	194.500.000
3	Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.835.644.600
4	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	886.281.380
5	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	69.946.000
6	Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut	359.256.500

